

Inflasi Inti Jepang Melambat ke Level Terendah, Perang Iran Bayangi Kenaikan Harga

Jumat, 22 Mei 2026 09:57 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-inti-jepang-melambat-ke-level-terendah-perang-iran-bayangi-kenaikan-harga>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Inflasi inti tahunan Jepang melambat ke level terendah dalam empat tahun pada April 2026. Perlambatan ini dipengaruhi oleh subsidi pemerintah untuk bahan bakar dan pendidikan, meski analis memperkirakan lonjakan biaya energi akibat perang di Timur Tengah akan kembali mendorong kenaikan harga dalam beberapa bulan mendatang.

Data yang dirilis pada Jumat (22/5/2026) menunjukkan, indeks harga konsumen (CPI) inti Jepang yang tidak memasukkan komponen harga makanan segar naik 1,4% pada April dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kenaikan 1,8% pada Maret dan juga di bawah proyeksi median pasar sebesar 1,7%.

Kenaikan tersebut menjadi yang paling lambat sejak Maret 2022. Penurunan biaya pendidikan sebesar 10,6% menekan inflasi sektor jasa dan mengimbangi kenaikan harga berbagai komoditas lain, termasuk makanan.

Sementara itu, indeks terpisah yang mengecualikan harga makanan segar dan bahan bakar — yang dipantau ketat oleh Bank of Japan (BOJ) sebagai indikator inflasi berbasis permintaan — naik 1,9% pada April secara tahunan, setelah sebelumnya meningkat 2,4% pada Maret.

Ekonom Senior APAC Capital Economics, Abhijit Surya, menilai tekanan inflasi hanya mereda sementara.

“Meski tekanan inflasi mereda pada April, kenaikan harga kemungkinan akan kembali meningkat dalam waktu dekat. Karena itu, kami masih melihat Bank of Japan kemungkinan akan melanjutkan siklus pengetatan moneterinya lebih cepat daripada nanti,” ujar Surya.

Peluang Kenaikan Suku Bunga BOJ Menguat

Data inflasi ini menjadi salah satu faktor yang akan dicermati BOJ dalam rapat kebijakan bulan depan. Dewan gubernur diperkirakan luas akan menaikkan suku bunga acuan jangka pendek menjadi 1% dari sebelumnya 0,75%.

Pasar global juga terguncang setelah perang Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima aliran minyak dan gas dunia. Kondisi ini mendorong kenaikan harga minyak mentah dan penguatan dolar AS sebagai aset safe haven terhadap yen Jepang.

Perang tersebut memperumit rencana kenaikan suku bunga BOJ karena meningkatkan tekanan inflasi, sekaligus membebani ekonomi Jepang yang sangat bergantung pada impor bahan bakar dari Timur Tengah.

Inflasi grosir Jepang, yang menjadi indikator awal harga konsumen, tercatat meningkat paling cepat dalam tiga tahun pada April. Kenaikan harga minyak dan produk kimia akibat perang Iran memperkuat alasan bagi BOJ untuk segera menaikkan suku bunga.

Anggota Dewan BOJ, Junko Koeda, pada Kamis mengatakan pihaknya tengah mencermati kecepatan dan besarnya transmisi inflasi dari tingkat grosir ke harga konsumen sebagai dasar menentukan waktu dan besaran kenaikan suku bunga berikutnya.

“Saya percaya menaikkan suku bunga kebijakan secara bertahap dan tepat merupakan langkah yang wajar untuk menghadapi inflasi tinggi, sambil tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian,” kata Koeda.

Ia juga memperingatkan bahwa guncangan energi berpotensi mendorong inflasi inti melampaui target 2% yang ditetapkan bank sentral.

Gubernur BOJ Kazuo Ueda dijadwalkan menyampaikan pidato pada 3 Juni mendatang. Pernyataannya akan dicermati pasar untuk mencari petunjuk apakah bank sentral Jepang benar-benar akan menaikkan suku bunga pada rapat kebijakan 15-16 Juni mendatang.

Defisit Inggris Melejit, 24,3 Miliar Poundsterling Lenyap dari Anggaran!

Jumat, 22 Mei 2026 15:17 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

https://internasional.kontan.co.id/news/defisit-inggris-melejit-243-miliar-poundsterling-lenyap-dari-anggaran#goog_rewarded

KONTAN.CO.ID - LONDON. Kondisi fiskal Inggris menghasilkan defisit yang lebih besar dari perkiraan. Defisit fiskal Inggris di April mencapai £ 24,3 miliar, sekitar Rp 5.779,11 triliun.

Reuters melaporkan, realisasi tersebut merupakan defisit tertinggi kedua untuk periode April dalam sejarah, menurut angka resmi yang dirilis pemerintah Inggris, Jumat (22/5/2026).

Konsensus proyeksi ekonom memprediksi defisit Inggris di periode tersebut cuma sebesar £ 20,9 miliar.

Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves mengatakan, ia akan tetap berpegang pada targetnya untuk menyeimbangkan pengeluaran sehari-hari dengan pendapatan pajak pada akhir dekade ini.

Reeves saat ini tengah menghadapi tekanan membantu membalikkan posisi Partai Buruh yang rendah dalam jajak pendapat. Kondisi ini dapat memaksa Perdana Menteri Keir Starmer keluar dari jabatannya.

Perang Iran telah membuat tantangan semakin sulit. Perang meningkatkan risiko perlambatan ekonomi, yang akan merugikan pendapatan pajak.

Perang juga telah menambah tuntutan pada Reeves untuk pengeluaran publik yang lebih besar guna melindungi rumah tangga dan bisnis dari guncangan harga energi yang disebabkan oleh konflik tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis (21/5/2026), Reeves mengatakan, ia akan menaikkan pajak dari perusahaan minyak dan gas untuk mendanai langkah-langkah dukungan.

Data Jumat yang dirilis Inggris menunjukkan penerimaan pemerintah naik 2,9% pada April, dibandingkan bulan yang sama di 2025. Sementara pengeluaran naik 6,5%.

Para ekonom bidang anggaran Inggris mengatakan awal Maret lalu, mereka memperkirakan pinjaman sektor publik akan menyusut menjadi 3,6% dari produk domestik bruto pada tahun pajak 2026-2027. Itu akan menjadi defisit terkecil sejak sebelum pandemi COVID-19.

Reuters memberitakan, mengutip Office for National Statistics (ONS) Inggris, pinjaman pada tahun fiskal yang berakhir Maret lalu lebih rendah £ 3 miliar dari perkiraan awal sebesar £ 129 miliar. Ini setara 4,2% dari PDB, turun dari 5,2% pada tahun pajak 2024/25.

Investor juga khawatir tentang kemungkinan perubahan kepemimpinan politik di Inggris, dengan banyak anggota parlemen Partai Buruh menuntut agar Starmer mundur. Penerus yang paling mungkin, walikota Manchester Andy Burnham, mengatakan ia akan tetap berpegang pada aturan fiskal yang diterapkan oleh Reeves.

Langkah Pemerintah Redam Biaya Hidup Buat Inflasi Jepang Melambat

Jumat, 22 Mei 2026 07:50 WIB

Toru Fujioka

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109719/langkah-pemerintah-redam-biaya-hidup-buat-inflasi-jepang-melambat/2>

Bloomberg, Indikator utama inflasi Jepang melambat lebih dalam dari yang diperkirakan. Langkah pemerintah untuk meringankan biaya hidup berhasil meredam dampak dari pelemahan mata uang yen dan tingginya harga energi.

Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang pada hari Jumat (22/5) melaporkan bahwa indeks harga konsumen (IHK) inti Jepang, yang tidak memperhitungkan sektor bahan pangan segar, naik 1,4% pada bulan April dibanding tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih rendah dari seluruh estimasi ekonom dalam survei Bloomberg. Jika komponen harga energi juga ikut dikeluarkan, IHK inti tersebut tumbuh 1,9% secara tahunan, yang mana angka ini juga berada di bawah ekspektasi.

Melambatnya angka inflasi ini tertahan oleh harga makanan olahan yang tumbuh jauh lebih lambat dibanding bulan Maret. Selain itu, biaya sekolah menengah swasta turun lebih tajam, sementara laju kenaikan harga barang tahan lama mulai melandai. Di sisi lain, biaya energi terpantau turun, meski dalam ritme yang lebih lambat dibanding bulan sebelumnya.

Awal pekan ini, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengubah arah kebijakan sebelumnya dengan menyatakan perlunya anggaran tambahan. Ia menambahkan bahwa dirinya berencana untuk memberlakukan kembali subsidi energi yang selama ini dinilai efektif menahan laju inflasi agar tidak melonjak.

Angka inflasi yang lebih rendah ini berpotensi mempersulit ekspektasi pasar terhadap rencana Bank of Japan (BOJ) untuk menaikkan suku bunga bulan depan. Kendati demikian, para pembuat kebijakan tetap waspada bahwa tekanan inflasi dapat meluas ke luar sektor energi akibat dampak perang di Iran. Banyak perusahaan yang terpantau terus membebaskan kenaikan biaya tenaga kerja dan bahan baku kepada konsumen. Anggota Dewan Kebijakan BOJ Junko Koeda menyoroti meningkatnya kecenderungan perusahaan tersebut dalam pidatonya hari Kamis, senada dengan pernyataan Gubernur BOJ Kazuo Ueda awal pekan ini.

PM Takaichi menyatakan bahwa anggaran tambahan tersebut tidak akan membutuhkan terlalu banyak pembiayaan utang baru. Namun, pasar tetap mengkhawatirkan potensi pembengkakan pengeluaran pemerintah. Sentimen ini memicu aksi jual besar-besaran pada obligasi pemerintah Jepang, yang menjadi bagian dari tren kenaikan imbal hasil (yield) obligasi global akibat kekhawatiran inflasi akibat perang.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa harga beras naik 0,6% secara tahunan. Angka ini berbanding terbalik dengan lonjakan tajam sebesar 98,4% yang terjadi pada April 2025 lalu. Sementara itu, inflasi sektor jasa—yang menjadi indikator acuan BOJ untuk mengukur kekuatan fundamental harga—melambat ke level 0,9%.

Proyeksi internal BOJ sendiri memperkirakan inflasi akan meningkat secara signifikan pada tahun fiskal yang dimulai bulan lalu. Anggota Dewan BOJ Koeda dan Kazuyuki Masu, yang pada bulan April lalu sama-sama sepakat untuk mempertahankan suku bunga, baru-baru ini menyatakan bahwa bank sentral harus menaikkan suku bunga sambil tetap mencermati risiko terhadap perekonomian.

Di sisi lain, pelemahan mata uang yen membuat biaya impor Jepang menjadi jauh lebih mahal, meskipun pemerintah diduga telah melakukan beberapa kali intervensi untuk menyokong mata uang tersebut. Nilai tukar yen berada di angka rata-rata 159,18 per dolar AS pada bulan April, melemah dibanding periode yang sama tahun lalu di level 143,07 per dolar AS, serta jauh di bawah rata-rata 10 tahunnya di posisi 124,77 per dolar AS.

Mata uang Jepang tersebut juga gagal mendapatkan sentimen positif dari peringatan Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama, maupun dukungan dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent agar BOJ menjalankan kebijakannya "dengan sukses". Kedua pejabat tersebut menyampaikan pernyataan mereka di sela-sela pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G-7 di Paris pekan ini.

Purbaya Soal Aturan DHE Ekspor Molor: Banyak Lobi Sampai Istana

Jumat, 22 Mei 2026 16:50 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109814/purbaya-soal-aturan-dhe-ekspor-molor-banyak-lobi-sampai-istana/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui aturan pemerintah terkait dengan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang seharusnya ditandatangani pada 1 Januari 2026 menjadi tertunda hingga 1 Juni 2026 karena banyaknya pebisnis yang melakukan lobi hingga Istana.

"Saya duga banyak pelaku bisnis yang melobi sampai ke Istana. Jadi bukan Presiden ya, sekeliling-sekelilingnya ada yang memperlambat," kata Purbaya dalam sebuah acara festival finansial di Jogjakarta secara daring, Jumat (22/5/2026).

Purbaya mengatakan bahwa aturan ini sudah beberapa kali mundur dan menilai bahwa keputusan mengenai DHE Sumber Daya Alam (SDA) ini merupakan keputusan yang berani dan baik buat Indonesia.

Menurut Purbaya, kebijakan sebelumnya dinilai belum efektif karena dana devisa hasil ekspor hanya ditempatkan sementara di dalam negeri sebelum kembali mengalir ke luar negeri.

Ia menjelaskan eksportir sebelumnya diperbolehkan menempatkan DHE di berbagai bank di Indonesia sepanjang dikonversi ke rupiah. Namun, pemerintah menilai mekanisme tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa nasional.

"Tapi ternyata kita lihat kan devisa kita nggak naik, seolah-olah kebijakan itu tidak berfungsi sama sekali. Setelah dianalisa, kesimpulan Bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri ke Singapura sehingga dolar kita di sini habis." kata Purbaya

Sehingga menurut Purbaya, walaupun ekspor Indonesia selalu surplus, dolarnya lebih banyak, namun tak ada dampaknya ke cadangan devisa.

“Jadi dengan cara menarik ke bank-bank negara, bank-bank Himbara, kan pengawasannya lebih gampang nanti. Jadi kalau bank Himbaranya main-main ya kita pecat direksinya, Pak. Jadi kita harapkan dampak dari devisa hasil ekspor itu ke devisa akan semakin signifikan yang akan memperkuat nilai tukar juga.” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang perekonomian, Airlangga Hartanto menyebut bahwa beleid terkait dengan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) dari kegiatan perusahaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) akan berlaku mulai 1 Juni 2026.

“Pemasukan atau repatriasi penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank Himbara. Jadi saya tegaskan kembali, retensi DHE SDA ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Batas konversi devisa hasil ekspor valas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%,” kata Airlangga, Rabu (20/5/2026).

Dalam pemaparannya, Airlangga menyebutkan ketentuan utama dari aturan ini. Pertama, eksportir SDA wajib memasukkan DHE SDA 100% ke dalam sistem keuangan Indonesia atau repatriasi dengan tingkat kepatuhan 100%.

Kedua, Eksportir SDA wajib menempatkan DHE dengan retensi minimal 30% untuk industri migas dan 100% untuk industri nonmigas pada rekening khusus untuk jangka waktu minimal 3 bulan untuk migas 12 bulan untuk non-migas.

Rupiah Terbenam Akibat Defisit Neraca Pembayaran yang Makin Dalam

Jumat, 22 Mei 2026 15:35 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109775/rupiah-terbenam-akibat-defisit-neraca-pembayaran-yang-makin-dalam/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) kuartal I-2026 dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan fondasi eksternal mulai melemah. Hal ini berdampak pada pergerakan rupiah yang pada kuartal II-2026 menjadi mata uang terlemah di kawasan.

Hari ini, Jumat (22/5/2026), BI mengumumkan NPI kuartal I-2026 tercatat defisit US\$9,15 miliar. Jauh lebih dalam daripada defisit kuartal sebelumnya US\$6,07 miliar.

Transaksi berjalan juga mencatat defisit sebesar US\$4 miliar atau 1,1% terhadap Produk Domestik Bruto. Angka ini memburuk tajam dibandingkan kuartal sebelumnya yang masih surplus US\$2,5 miliar. Artinya, dalam satu kuartal saja terjadi perubahan sekitar US\$6,5 miliar.

Penyebab Defisit Makin Dalam

Kondisi ini mengindikasikan bahwa mesin penghasil devisa Indonesia mulai kehilangan tenaganya. Hal ini terlihat dari menyusutnya surplus perdagangan barang dari US\$10,2 miliar, tergerus menjadi hanya US\$8 miliar. Padahal, selama beberapa tahun belakangan, surplus perdagangan ini kerap jadi bantalan utama stabilitas eksternal Indonesia.

"Kinerja ekspor nonmigas triwulan I-2026 tidak setinggi capaian pada triwulan sebelumnya, yang dipengaruhi oleh perlambatan ekspor riil, di tengah perbaikan indeks harga," sebut laporan BI.

Meski ekspor CPO masih tercatat naik menjadi 14,5% secara tahunan tertopang oleh permintaan dari India, tetapi kinerja ekspor besi dan baja masih berkontraksi 0,6%, dikontribusi oleh ekspor riil yang berkontraksi lebih dalam dari 4,3% pada kuartal sebelumnya, menjadi 5,2% pada kuartal I-2026.

Begitu juga dengan ekspor batu bara masih mengalami kontraksi 8,4%, meski sedikit membaik dari kontraksi kuartal sebelumnya sebesar 15,6%. Tekanan ini datang bukan hanya dari turunnya harga komoditas, melainkan juga adanya pelemahan permintaan global.

Ekspor nonmigas ke Malaysia juga berkontraksi 8%, lebih dalam dari kontraksi sebelumnya 1,5%. Begitu juga dengan ekspor ke Vietnam yang melambat dari 2,4% menjadi 0,1%, dan ekspor ke Thailand melambat dari 17,5% menjadi tumbuh hanya 12% secara tahunan.

"Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan ekspor besi dan baja serta logam tidak mengandung besi, sejalan dengan tertahannya kinerja perekonomian Vietnam," sebut Laporan BI.

Alhasil, secara nominal kinerja ekspor nonmigas pada kuartal I-2026 tercatat melambat menjadi US\$63,5 miliar, lebih rendah dibandingkan ekspor kuartal sebelumnya sebesar US\$69,7 miliar.

Lebih lanjut, neraca perdagangan nonmigas juga tercatat lebih rendah menjadi US\$13,3 miliar, dari sebelumnya US\$16 miliar.

Di sisi lain, tekanan terhadap devisa masih tetap tinggi. Kenaikan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik Timur Tengah menyebabkan defisit migas mencapai US\$5,3 miliar, memang sedikit membaik dari kuartal sebelumnya sebesar US\$5,7 miliar.

Namun, harga impor minyak naik dari US\$74,5 per barel menjadi US\$80,1 per barel. Padahal, volume impor sudah sedikit menurun menjadi 36,2 juta barel dari sebelumnya 37,5 juta barel pada kuartal IV-2025. Alhasil, biaya yang harus dikeluarkan untuk importasi minyak ini mencapai US\$7,5 miliar.

Selain itu, tekanan struktural juga datang dari defisit neraca jasa dan pendapatan primer. Defisit jasa meningkat menjadi US\$4,6 miliar dari sebelumnya US\$3,5 miliar. Sementara, defisit pendapatan primer tetap sangat besar di US\$9,2 miliar.

Sebagai catatan, defisit pendapatan primer ini mencerminkan adanya aliran devisa yang keluar untuk pembayaran bunga utang, kupon surat utang negara, dividen investor asing, serta repatriasi keuntungan perusahaan multinasional.

Artinya, sebagian keuntungan dari pertumbuhan ekonomi domestik juga masih terus mengalir ke luar negeri.

Sementara, investasi langsung alias foreign direct investment (FDI) juga melambat dengan pertumbuhan sebesar US\$2 miliar dari kuartal sebelumnya US\$3,2 miliar.

Sepertinya, investor mulai lebih berhati-hati terhadap Indonesia di tengah ketidakpastian dan rendahnya prediktabilitas kebijakan domestik.

Bantalan Modal Menipis

Tergerusnya NPI membuat stabilitas eksternal Indonesia kini semakin bergantung pada transaksi modal dan finansial. Memang, pada kuartal I-2026 transaksi modal dan finansial masih mencatat surplus US\$4,9 miliar. Namun angka ini sebenarnya turun tajam dari capaian kuartal sebelumnya yang tercatat surplus US\$9 miliar.

Meski surplus kondisi bantalan modal ini sangat mengkhawatirkan. Sebab, sebagian besar aliran modal masuk tersebut berasal dari investasi portofolio jangka pendek ke instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Utang Negara (SUN).

Investasi portofolio asing tercatat surplus US\$0,7 miliar. Sementara kepemilikan asing di pasar SUN sebesar US\$50,2 miliar, atau sekitar 12,4% dari total posisi SUN berdenominasi rupiah.

Kondisi ini menjelaskan mengapa rupiah menjadi kian volatil dalam beberapa bulan terakhir dan semakin sensitif terhadap arah suku bunga The Fed, pergerakan yield US Treasury, hingga pergerakan harga minyak mentah global.

Di sisi lain, volatilitas rupiah selama kuartal pertama dan berlanjut hingga kuartal kedua, juga telah menggerus cadangan devisa RI. Cadangan devisa tercatat turun dari US\$156,5 miliar menjadi US\$148,1 miliar, pada kuartal pertama.

Jika digabung hingga akhir April, maka penurunan devisa telah mencapai US\$10,3 miliar dan posisi terbaru US\$146,2 miliar. Penurunan cadangan devisa disebabkan oleh intervensi moneter untuk menjaga stabilitas rupiah.

Meski cadangan devisa terhadap utang luar negeri jangka pendek masih tercatat naik 55,8%, tetapi posisi utang luar negeri (ULN) terhadap cadangan devisa juga ikut terkerek menjadi 292,5%.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter akhirnya dipaksa untuk menjaga aset rupiah melalui suku bunga tinggi dan instrumen berimbang hasil menarik seperti SRBI.

Konsekuensi yang harus dibayar lebih mahal lagi, lantaran stabilitas rupiah harus diganjar dengan biaya dana yang tinggi serta perlambatan pertumbuhan ekonomi seperti saat ini.

Nasib Rupiah

Laporan NPI kuartal pertama tahun ini menggambarkan kondisi fondasi eksternal Tanah Air mulai melemah dan tergerus secara perlahan.

Memang, masalahnya bukan karena Indonesia sudah masuk fase krisis. Namun datang dari kualitas ketahanan eksternal yang makin rapuh dan ketergantungan yang makin besar pada arus modal asing jangka pendek untuk menopang stabilitas rupiah.

Tak heran jika pergerakan rupiah masih terus melemah meski BI telah mengambil langkah agresif dengan kenaikan suku bunga acuan sebanyak 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%.

Sejak awal 2026 hingga hari ini, rupiah telah melemah 5,79%.

Ekonom: Kenaikan Suku Bunga 50 Bps Jadi Langkah Agresif BI

Jumat, 22 Mei 2026 11:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109747/ekonom-kenaikan-suku-bunga-50-bps-jadi-langkah-agresif-bi>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) baru saja menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Salah satu alasan kenaikan ini adalah untuk mengendalikan pergerakan rupiah yang sempat berada di level Rp17.700 di pekan ini.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menilai bahwa kenaikan BI Rate yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar ini dikarenakan tekanan rupiah yang sangat berat. Selain itu, BI juga telah menggunakan cadangan devisa lebih dari US\$10 miliar untuk langkah stabilisasi ini.

“Jadi, langkah BI ini bukan sekadar penyesuaian biasa, melainkan langkah yang lebih agresif untuk memulihkan kepercayaan pasar dan memberi sinyal bahwa stabilitas rupiah menjadi prioritas utama,” kata Josua kepada Bloomberg Technoz, Kamis (21/5/2026).

Josua bilang, kenaikan suku bunga ini masih mampu menahan tekanan rupiah dalam jangka pendek, tetapi belum cukup untuk mengendalikan rupiah secara jangka panjang jika tidak didukung perbaikan faktor mendasar.

Dari sisi jangka pendek, kenaikan BI Rate membuat aset rupiah lebih menarik, membantu menahan arus keluar modal, mengurangi tekanan spekulatif di pasar valas, dan memperkuat sinyal bahwa BI tidak membiarkan rupiah melemah terlalu jauh.

“Ini merupakan langkah pro-stabilitas untuk memperkuat rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran. Namun, nilai tukar tidak hanya ditentukan oleh suku bunga. Rupiah juga dipengaruhi harga minyak, kebutuhan dolar untuk impor energi, pembayaran dividen dan utang luar negeri, arus modal asing, kredibilitas fiskal, serta persepsi investor terhadap arah kebijakan pemerintah,” kata Josua.

Menurut Josua, untuk jangka panjang kenaikan BI Rate hanya akan efektif bila menjadi bagian dari bauran kebijakan yang lebih luas.

BI tetap perlu menjaga pasokan valuta asing melalui intervensi yang terukur, memperkuat instrumen seperti SRBI, menjaga stabilitas pasar SBN, dan membatasi permintaan dolar yang tidak didukung transaksi nyata.

“Namun pemerintah juga harus membantu dari sisi fiskal dan sektor riil, terutama dengan menjaga defisit tetap kredibel, mengendalikan subsidi energi agar tidak membengkak, memperkuat penerimaan negara, mempercepat devisa hasil ekspor, dan menurunkan ketergantungan impor energi,”

Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata

Menurutnya, jika hal ini tidak dilakukan kenaikan suku bunga ini niscaya hanya akan menjadi rem sementara, sementara karena sumber tekanan rupiah tetap berasal dari neraca eksternal dan kepercayaan pasar.

Meski cadangan devisa April 2026 memang masih tinggi sebesar 146,2 miliar dolar AS, setara 5,8 bulan impor, tetapi sudah turun dari 148,2 miliar dolar AS pada Maret karena pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi rupiah.

Menurutnya, hal ini menunjukkan ruang intervensi masih ada, tetapi tidak boleh digunakan tanpa batas.

Tahan Pertumbuhan Ekonomi

Josua juga menyebut bahwa kenaikan suku bunga ini juga akan menahan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui konsumsi barang tahan lama, investasi swasta, properti, otomotif, dan sektor yang banyak bergantung pada pembiayaan.

Ia juga bilang kenaikan BI Rate akan menaikkan biaya dana perbankan secara bertahap, lalu berpotensi masuk ke suku bunga kredit baru.

“Dampaknya tidak selalu langsung, karena bank masih memiliki likuiditas dan suku bunga kredit sebelumnya sempat turun,” lanjutnya.

Josua memaparkan, data SBDK (suku bunga dasar kredit) menunjukkan pada Februari 2026 SBDK turun menjadi 8,63% dan suku bunga kredit rupiah secara agregat masih menurun pada Maret 2026, tetapi pertumbuhan kredit saat itu sudah melambat menjadi 9,37% secara tahunan dan permintaan kredit terindikasi masih terbatas.

Artinya, kenaikan BI Rate akan datang pada saat kredit belum benar-benar kuat, sehingga risiko perlambatan kredit menjadi lebih nyata pada semester II 2026.

Sementara itu, dari sisi kredit, dampak paling cepat akan terasa pada kredit konsumsi, kredit kendaraan, kredit properti, kredit UMKM yang berisiko lebih tinggi, dan kredit modal kerja sektor yang margin usahanya tipis.

Apalagi, survei Perbankan BI menunjukkan penyaluran kredit baru pada triwulan I 2026 memang tetap tumbuh, tetapi lebih rendah dibanding triwulan IV 2025, sementara standar penyaluran kredit bank menjadi lebih berhati-hati.

“Dengan kata lain, kenaikan BI Rate bisa membantu stabilitas rupiah, tetapi konsekuensinya adalah bank akan makin berhati-hati memilih debitur, terutama pada segmen yang arus kasnya rentan terhadap kenaikan biaya bahan baku, pelemahan daya beli, dan volatilitas nilai tukar,” katanya.

Namun, dampak negatif terhadap pertumbuhan dan kredit tidak boleh dibaca secara satu arah. Jika BI tidak menaikkan suku bunga dan rupiah terus melemah, dampaknya bisa lebih buruk karena harga impor, energi, bahan baku, obat, pangan, dan biaya produksi akan naik lebih luas.

Pelemahan rupiah yang tidak terkendali juga dapat memukul kepercayaan investor, menaikkan imbal hasil SBN, memperberat biaya pembiayaan pemerintah, dan akhirnya menekan pertumbuhan lebih dalam.

“Jadi, kenaikan BI Rate adalah pilihan yang mahal, tetapi bisa menjadi biaya yang diperlukan untuk mencegah risiko yang lebih besar. Pilihan kebijakan saat ini bukan antara pertumbuhan dan stabilitas, melainkan bagaimana menjaga stabilitas agar pertumbuhan tidak terganggu lebih dalam,” katanya.

Airlangga Sebut Pengusaha Respons Positif BUMN Ekspor

Jumat, 22 Mei 2026 09:50 WIB

Sultan Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109734/airlangga-sebut-pengusaha-respons-positif-bumn-ekspor>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim kalangan pengusaha eksportir menyambut positif soal adanya perusahaan pelat merah yang diberikan mandat untuk melakukan ekspor komoditas baru dalam waktu dekat.

Hal itu ia sampaikan usai melakukan sosialisasi kehadiran BUMN tersebut, termasuk perubahan mekanisme pengelolaan ekspor sejumlah komoditas andalan dalam negeri di kantornya, Kamis (21/5/2026).

"Tanggapannya relatif positif dan mereka mengapresiasi. Terutama bahwa ini kan tujuannya untuk mengoptimalkan harga," ujar Airlangga kepada wartawan usai rapat tersebut, dikutip Jumat (22/5/2026).

Airlangga mengaku hadirnya BUMN ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tersebut mampu menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di sektor perdagangan komoditas.

Dia juga mengatakan negara-negara mitra kerja sama bisnis dengan Indonesia tidak mempermasalahkan rencana tersebut, yang pada dasarnya menjadi hak prerogatif Indonesia.

"Ini kan tujuannya untuk mengoptimalkan harga dan juga supaya leverage Indonesia di perdagangan komoditas ini menjadi lebih kuat," kata dia.

"Ini kan haknya Indonesia. Jadi kalau haknya Indonesia ya kita jalankan saja. Dan negara lain melakukan hal yang sama seperti Thailand, Malaysia.

Dalam sosialisasi tersebut, Airlangga setidaknya mengundang belasan kalangan asosiasi pengusaha. Dia didampingi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua DK OJK Frederica Widyasari, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Berikut daftar pengusaha yang hadir dalam sosialisasi tersebut:

- Kamar Dagang Industri (Kadin)
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
- Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA)
- Forum Industri Nikel Indonesia (FINI)
- Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI)
- Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI)
- Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas)
- American Chambers of Commerce (AMCHAM)
- US-ASEAN Business Council (USABC)
- Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)
- Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)
- Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI)
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
- European Business Chamber or Commerce Indonesia (EUROCHAM)
- Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)
- Gabungan Pengusaha Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
- Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN)
- Indonesian Petroleum Association (IPA)

Defisit Transaksi Berjalan dan NPI RI Berpotensi Memburuk pada Tahun Ini

Jumat, 22 Mei 2026 17:02 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-transaksi-berjalan-dan-npi-ri-berpotensi-memburuk-pada-tahun-ini#goog_rewarded

KONTAN.CO.ID-MAKASSAR. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia berpotensi makin melebar tahun ini seiring tekanan pada ekspor, pelemahan rupiah, hingga terus turunnya cadangan devisa.

Josua menilai, kondisi CAD dan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) menjadi salah satu cerminan fundamental ekonomi domestik. Menurutnya, memburuknya transaksi berjalan saat ini perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi investor dan penilaian lembaga pemeringkat (rating agency) terhadap ekonomi Indonesia.

“Kalau kita lihat CAD kita, ini salah satu angka yang menunjukkan sebenarnya kondisi fundamental ekonomi kita,” ujar Josua kepada Kontan, Jumat (22/5).

Bank Indonesia sebelumnya mencatat transaksi berjalan pada kuartal I 2026 defisit sebesar US\$ 4 miliar atau 1,1% terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dibandingkan kuartal IV 2025 sebesar US\$ 2,5 miliar atau 0,7% terhadap PDB.

Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I 2026 tercatat defisit sebesar US\$ 9,1 miliar, berbalik dari kuartal IV 2025 yang mencatat surplus US\$ 6,1 miliar.

Josua mengatakan, tekanan terhadap transaksi berjalan dan NPI tidak lepas dari turunnya cadangan devisa yang banyak digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global.

“Cadangan devisa kita empat bulan saja sudah turun US\$ 10 miliar. Itu mencerminkan NPI kita sedang defisit,” katanya.

Selain faktor global seperti perlambatan ekonomi dunia dan kenaikan harga minyak mentah, Josua menilai ekspor Indonesia juga menghadapi tekanan dari sisi domestik, termasuk kebijakan baru terkait badan ekspor.

Menurutnya, selama Indonesia masih mengandalkan ekspor komoditas mentah tanpa nilai tambah tinggi, maka rupiah akan tetap rentan mengalami tekanan.

“Kalau investasi kita tidak jalan, ekspor kita cuma barang mentah saja, kita tidak akan bisa bersaing. Rupiah kita tidak akan bisa menguat banyak,” ujar Josua.

Ia menekankan pentingnya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah industri untuk memperkuat transaksi berjalan dalam jangka panjang. Menurut Josua, upaya hilirisasi yang selama ini dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil, seperti peningkatan nilai tambah dari pengolahan nikel dan tembaga.

“Sebelumnya kita hanya mengandalkan CPO dan batubara. Sekarang mulai ada diversifikasi dan peningkatan nilai tambah,” katanya.

Namun demikian, Josua mengingatkan bahwa Indonesia masih membutuhkan aliran investasi asing dan dana investor portofolio untuk menopang transaksi eksternal karena kondisi transaksi berjalan masih defisit.

“Kalau current account kita masih defisit, kita masih butuh foreign investor di pasar modal,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan, memburuknya transaksi berjalan dan NPI berpotensi menjadi perhatian lembaga pemeringkat global seperti Moody's dan Fitch dalam menilai prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Menurut Josua, lembaga pemeringkat akan melihat dampak kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia terhadap kondisi eksternal Indonesia dalam 12 hingga 18 bulan mendatang.

“Kalau terjadi pemburukan dan tidak ada perbaikan dalam 12 sampai 18 bulan ke depan, tentu akan ada assessment lagi kepada Indonesia,” jelasnya.

Josua memperkirakan NPI Indonesia sepanjang 2026 masih berpotensi mencatat defisit karena surplus transaksi modal dan finansial belum cukup untuk menutupi pelebaran defisit transaksi berjalan.

“Tahun ini potensinya memang masih defisit NPI secara keseluruhan, karena current account memburuk sementara surplus financial account belum bisa menutupi,” katanya.

Meski begitu, Josua menilai pemerintah tetap perlu menjaga transparansi komunikasi kebijakan dan mempercepat reformasi struktural untuk memperkuat daya saing ekspor serta menciptakan lapangan kerja.

“Yang lebih penting adalah mengatakan apa adanya dan menyelesaikan masalah bersama-sama,” pungkas Josua.

Uang Beredar (M2) Tumbuh 9,2% Pada April 2026 Menjadi Rp 10.253,7 Triliun

Jumat, 22 Mei 2026 15:07 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/uang-beredar-m2-tumbuh-92-pada-april-2026-menjadi-rp-102537-triliun>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) melambat pada April 2026.

Posisi M2 pada April 2026 tercatat sebesar Rp 10.253,7 triliun atau tumbuh 9,2% secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 9,7% yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan perlambatan pertumbuhan M2 tersebut tetap ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 13,6% yoy dan uang kuasi sebesar 4,7% yoy.

“Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 13,6% (yoy) dan uang kuasi sebesar 4,7% (yoy),” ujar Denny dalam keterangan resmi, Kamis (22/5/2026).

Bank Indonesia menjelaskan, perkembangan M2 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat (Pempus) dan penyaluran kredit.

Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 38,6% yoy pada April 2026, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan Maret 2026 sebesar 39,1% yoy.

Sementara itu, penyaluran kredit pada April 2026 tercatat sebesar Rp 8.606,6 triliun atau tumbuh 9,4% yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,9% yoy.

Adapun aktiva luar negeri bersih tumbuh 3,7% yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 2,7% yoy.

BI juga mencatat uang primer (M0) adjusted pada April 2026 mencapai Rp 2.232,2 triliun atau tumbuh 14,3% yoy. Namun, pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan Maret 2026 yang tumbuh 16,8% yoy.

Perkembangan uang primer didorong oleh pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted sebesar 21,6% yoy, uang kartal yang diedarkan sebesar 14,6% yoy, serta giro sektor swasta di BI sebesar 1,5% yoy.

Di sisi lain, surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta mengalami kontraksi sebesar 54,6% yoy.

Berdasarkan komponennya, M1 dengan pangsa 57,9% dari total M2 tercatat sebesar Rp 5.936,1 triliun atau tumbuh 13,6% yoy.

Pertumbuhan M1 dipengaruhi oleh giro rupiah yang tumbuh 21,3% yoy dan tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu tumbuh 7,1% yoy.

Sementara itu, uang kuasi yang memiliki pangsa 41,5% dari M2 tercatat tumbuh 4,7% yoy menjadi Rp4.253,6 triliun.

Pertumbuhan uang kuasi didorong oleh giro valas yang tumbuh 0,6% yoy, simpanan berjangka tumbuh 4,6% yoy, dan tabungan lainnya tumbuh 17,4% yoy.

Defisit Transaksi Berjalan (CAD) RI Melebar Jadi US\$ 4 Miliar Pada Kuartal I 2026

Jumat, 22 Mei 2026 14:44 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-transaksi-berjalan-cad-ri-melebar-jadi-us-4-miliar-pada-kuartal-i-2026>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia melebar pada kuartal I 2026 di tengah perlambatan ekonomi global dan terganggunya rantai pasok perdagangan dunia.

Pada kuartal I 2026, transaksi berjalan tercatat defisit sebesar US\$ 4,0 miliar atau setara 1,1% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit ini melebar dibandingkan kuartal IV 2025 yang mencatat defisit US\$ 2,5 miliar atau 0,7% terhadap PDB.

Bahkan secara tahunan, CAD juga meningkat dibandingkan kuartal I 2025 yang hanya tercatat sebesar US\$ 0,2 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, melebarnya defisit transaksi berjalan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya surplus neraca perdagangan nonmigas.

Pada kuartal I 2026, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat sebesar US\$ 13,3 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus pada kuartal IV 2025 yang mencapai US\$ 16,0 miliar.

“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan kinerja ekspor nonmigas yang lebih dalam dibandingkan kinerja impor nonmigas,” ujar Denny dalam keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).

Menurut BI, surplus neraca perdagangan nonmigas yang turun sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta terganggunya rantai pasok perdagangan antarnegara.

Selain itu, defisit neraca pendapatan primer juga meningkat akibat kenaikan pembayaran kupon dan bunga.

“Defisit neraca perdagangan migas juga menurun di tengah aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga,” tambah Denny.

Sementara itu, kinerja neraca jasa tercatat membaik sejalan dengan penurunan impor jasa freight.

Dengan perkembangan tersebut, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I 2026 mencatat defisit sebesar US\$ 9,1 miliar, berbalik dari kuartal IV 2025 yang mencatat surplus US\$ 6,1 miliar.

Adapun posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tetap tinggi sebesar US\$ 148,2 miliar atau setara pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Ke depan, BI memperkirakan defisit transaksi berjalan sepanjang 2026 tetap terjaga rendah dalam kisaran 0,5% hingga 1,3% terhadap PDB.

Bank Indonesia menekankan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk memperkuat ketahanan eksternal.

BI: Pengetatan Underlying Pembelian Dolar Efektif Redam Spekulasi dan Jaga Rupiah

Jumat, 22 Mei 2026 12:53 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-pengetatan-underlying-pembelian-dolar-efektif-redam-spekulasi-dan-jaga-rupiah>

KONTAN.CO.ID - MAKASSAR. Bank Indonesia (BI) menilai kebijakan pengetatan aturan underlying atau dokumen dasar transaksi pembelian valuta asing (valas) dolar Amerika Serikat (AS) efektif dalam meredam aktivitas spekulasi di pasar keuangan domestik yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah.

Mulai Juni 2026, BI berencana kembali menurunkan batas transaksi pembelian dolar AS tanpa underlying dari sebelumnya US\$ 50.000 menjadi US\$ 25.000.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Cusoy Intama menjelaskan kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari penyesuaian threshold underlying yang sebelumnya telah diturunkan dari US\$ 100.000 menjadi US\$ 50.000 melalui PADG Nomor 7 Tahun 2026.

Menurut Ruth, kebijakan sebelumnya telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi transaksi pembelian dolar tanpa kebutuhan transaksi yang jelas.

“Ketika kita turunkan dari US\$ 100.000 ke US\$ 50.000 efektivitasnya sudah terlihat. Dari sekitar US\$ 76 juta-US\$ 78 juta rata-rata harian, itu berkurang menjadi sekitar US\$ 62 juta per hari,” ujar Ruth dalam paparannya pada Pelatihan Wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

BI berharap penurunan threshold menjadi US\$ 25.000 akan semakin membatasi aktivitas spekulatif di pasar valas domestik, khususnya di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi.

“Kalau dia spekulasi sifatnya di tengah jittery market saat ini, rasanya itu jumlah yang besar. Jadi kita coba turunkan lagi ke US\$ 25.000 dengan harapan trennya akan sama, akan mengurangi kebutuhan pembelian dolar tanpa underlying,” katanya.

Ruth menegaskan bahwa BI tidak membatasi masyarakat maupun pelaku usaha untuk membeli dolar AS atau mata uang asing lainnya. Namun, transaksi pembelian valas harus memiliki underlying atau kebutuhan dasar yang jelas agar tidak digunakan untuk kepentingan spekulatif.

“Sekali lagi message-nya (pesannya) adalah kita tidak membatasi beli valas, mau dolar mau non dolar silakan. Tapi kalau mau beli itu harus ada underlying-nya jadi tidak berupa spekulasi,” jelasnya.

Bank Indonesia mencatat lebih dari 90% transaksi valas di Indonesia saat ini sebenarnya telah memiliki underlying. Oleh sebab itu, kebijakan pengetatan difokuskan untuk mempersempit ruang transaksi spekulatif yang dapat memperlemah stabilitas rupiah.

Menurut Ruth, spekulasi di pasar valas dapat memengaruhi ekspektasi pelaku pasar terhadap pergerakan nilai tukar.

“Price dari suatu aset itu kan ekspektasi. Biasanya manusia cenderung exaggerate ketika kondisi seperti sekarang, spekulasinya. Inilah yang kita batasi,” ucapnya.

Selain memperketat transaksi spot pembelian dolar tanpa underlying, BI juga memberikan sejumlah relaksasi untuk mendukung suplai dolar di pasar domestik. Salah satunya melalui kenaikan batas transaksi swap dari US\$ 5 juta menjadi US\$ 10 juta per transaksi.

BI juga membuka fasilitas transaksi non-deliverable forward (NDF) jual rupiah di offshore bagi 14 bank dealer utama yang ditunjuk BI. Kebijakan ini bertujuan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memperkecil selisih harga antara pasar NDF offshore dan pasar spot domestik.

Meski memberikan relaksasi, BI memastikan pengawasan terhadap fasilitas tersebut akan dilakukan secara ketat dan dievaluasi setiap tiga bulan.

“Sebagai otoritas ini penting, jangan dipakai spekulasi karena kalau spekulasi itu yang suffer (menderita) pasti se-Indonesia,” kata Ruth.

Bank Indonesia, ISEI dan LPS Kompak Jaga Ekonomi Jawa Tengah, UMKM hingga Digitalisasi Jadi Fokus Utama

Jumat, 22 Mei 2026 10:40 WIB

Modesta Fiska, Suara Merdeka

<https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/0417158294/bank-indonesia-dan-lps-kompak-jaga-ekonomi-jawa-tengah-umkm-hingga-digitalisasi-jadi-fokus-utama>

SEMARANG, suaramerdeka.com - Bank Indonesia Jawa Tengah bersama Lembaga Penjamin Simpanan dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) memperkuat kerja sama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tetap kuat di tengah tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam Seminar Perekonomian Jawa Tengah dan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Gedung LPPM Universitas Negeri Semarang, Kamis 21 Mei 2026.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta dari kalangan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, hingga berbagai mitra strategis.

Dalam forum tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menjelaskan Bank Indonesia saat ini terus menjalankan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian inflasi, penguatan sektor UMKM, digitalisasi ekonomi dan keuangan, hingga penguatan sistem pembayaran dan pasar keuangan.

Menurutnya, kerja sama antarinstansi menjadi sangat penting agar ekonomi daerah tetap tumbuh dan mampu menghadapi dampak perlambatan ekonomi global.

“Sinergi antarpihak menjadi kunci agar ekonomi Jawa Tengah tetap kuat dan memiliki daya tahan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS, Doddy Zulverdi, menyampaikan kondisi ekonomi nasional dan sektor perbankan Indonesia sejauh ini masih cukup stabil.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa situasi global yang belum menentu tetap perlu diwaspadai, sehingga penguatan sistem keuangan harus terus dilakukan agar lebih adaptif menghadapi berbagai risiko ekonomi dunia.

Selain membahas kondisi ekonomi, acara tersebut juga menjadi momen pelantikan pengurus baru ISEI Cabang Semarang periode 2026–2029.

Pada kesempatan itu, Suharnomo menekankan pentingnya keberlanjutan organisasi dan peran ISEI dalam memberikan gagasan serta rekomendasi untuk pembangunan ekonomi daerah.

Sementara Ketua ISEI Cabang Semarang periode 2026–2029, Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, menegaskan pihaknya akan memperkuat kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha.

Fokus utama yang akan didorong antara lain penguatan riset ekonomi, pengembangan jejaring, publikasi ilmiah, serta kontribusi nyata terhadap berbagai isu ekonomi strategis di Jawa Tengah.

Melalui kerja sama ini, Bank Indonesia, LPS, dan ISEI berharap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tidak hanya tetap tumbuh, tetapi juga lebih merata dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

KEK Industropolis Batang Hadapi Tantangan Baru, Infrastruktur dan SDM Lokal Jadi Penentu Investasi

Jumat, 22 Mei 2026 09:44 WIB

Trisno Suhito, Suara Merdeka

<https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0417158079/kek-industropolis-batang-hadapi-tantangan-baru-infrastruktur-dan-sdm-lokal-jadi-penentu-investasi>

BATANG, suaramerdeka.com - Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Danareksa, dan Pemerintah Kabupaten Batang ke kawasan KEK Industropolis Batang memunculkan sejumlah persoalan strategis yang dinilai akan menentukan arah perkembangan kawasan industri tersebut ke depan.

Pembahasan dalam pertemuan itu tidak lagi hanya berfokus pada upaya menarik investasi, tetapi mulai bergeser pada kesiapan wilayah penyangga, kebutuhan lahan industri, hingga keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier menyampaikan bahwa keberhasilan kawasan industri tidak semata ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk.

Menurutnya, kesiapan fasilitas di wilayah sekitar seperti Gringsing dan kawasan penyangga lainnya menjadi faktor penting yang turut memengaruhi keputusan investor.

Ia menjelaskan bahwa investor umumnya mempertimbangkan tiga hal utama sebelum menanamkan modal, yakni kemudahan fasilitas daerah, insentif pajak, dan ketersediaan tenaga kerja.

Karena itu, DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang yang memberikan keringanan pajak bagi investor yang mampu menyerap minimal 70 persen tenaga kerja lokal.

Selain persoalan tenaga kerja, kebutuhan lahan industri juga menjadi tantangan besar di tengah meningkatnya minat investor terhadap kawasan industri terpadu Batang.

Rizal menyebut DPR RI akan membantu mempercepat penyelesaian persoalan lahan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PTPN dan kementerian terkait.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Batang, Sri Purwaningsih memanfaatkan momentum kunjungan tersebut untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri.

Pemerintah daerah mengusulkan dukungan anggaran pusat untuk pembangunan Pasar Plelen, alun-alun kawasan Gringsing, akses jalan menuju KEK, hingga pengembangan stasiun penunjang pekerja.

Menurut Sri, lahan untuk sejumlah proyek tersebut sebenarnya sudah tersedia dan tinggal menunggu dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN.

Pemkab Batang juga mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development atau TOD guna mendukung mobilitas pekerja dan distribusi logistik di sekitar kawasan industri.

Saat ini fasilitas stasiun di sekitar KEK masih bersifat sementara sehingga dinilai belum mampu menunjang kebutuhan industri yang terus berkembang.

Di sisi lain, kehadiran KEK Industropolis mulai membuka peluang keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengembangan ekonomi kawasan, termasuk melalui rencana pembangunan dryport dan jaringan gas daerah.

Pemerintah berharap manfaat pertumbuhan industri di Batang nantinya tidak hanya dirasakan investor, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan daerah sekitar.

Saat ini fasilitas stasiun di sekitar KEK masih bersifat sementara sehingga dinilai belum mampu menunjang kebutuhan industri yang terus berkembang.

Di sisi lain, kehadiran KEK Industropolis mulai membuka peluang keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengembangan ekonomi kawasan, termasuk melalui rencana pembangunan dryport dan jaringan gas daerah.

Pemerintah berharap manfaat pertumbuhan industri di Batang nantinya tidak hanya dirasakan investor, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan daerah sekitar.***

Wali Kota Semarang dorong sinergi lewat "Waras Ekonomi"

Jumat, 22 Mei 2026 19:38 WIB

<https://jateng.antaranews.com/berita/632824/wali-kota-semarang-dorong-sinergi-lewat-waras-ekonomi>

Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mendorong sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan terkait demi kemajuan ekonomi daerah lewat program "Waras Ekonomi".

"Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi ekonomi, seperti ISEI sangat krusial. Program 'Waras Ekonomi' tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pemikiran dari para pakar," katanya, di Semarang, Kamis.

Hal tersebut disampaikan menghadiri Pelantikan Pengurus dan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang Periode 2026–2029

"Kami berharap ISEI Semarang dapat menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga," katanya.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti saat menghadiri Pelantikan Pengurus dan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang Periode 2026–2029, di Semarang, Kamis (21/5/2026). (ANTARA/HO-Pemkot Semarang)

Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus ISEI Cabang Semarang yang baru saja dilantik untuk periode 2026–2029.

Ia menekankan pentingnya peran para sarjana ekonomi dan akademisi dalam memberikan sumbangsih pemikiran serta solusi nyata terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi Kota Semarang dan Jawa Tengah.

Sejalan dengan tema seminar nasional yang diangkat, yaitu “Mendorong Perekonomian Jateng Lebih Kuat, Merata dan Berkesinambungan melalui Sinergitas antar Pihak”, Pemerintah Kota Semarang memanfaatkan momentum ini untuk menggaungkan program "Waras Ekonomi".

Program inovatif yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Semarang itu berfokus pada pemulihan, penguatan, dan pemerataan ekonomi berbasis kemandirian masyarakat.

Melalui program "Waras Ekonomi", Pemkot Semarang berkomitmen untuk memastikan kesehatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta menciptakan lapangan kerja yang inklusif.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak pengurus ISEI Cabang Semarang yang baru dilantik untuk ikut ambil bagian menyukseskan program ini melalui kajian strategis dan pendampingan ekonomi di lapangan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti saat menghadiri Pelantikan Pengurus dan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang Periode 2026–2029, di Semarang, Kamis (21/5/2026). (ANTARA/HO-Pemkot Semarang)

Acara pelantikan ini juga diisi dengan penyerahan pataka/bendera organisasi dari Ketua ISEI Periode 2023–2026 Prof. Dr. Suharnomo kepada Ketua ISEI Periode 2026–2029 yang baru dilantik, Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti.

Setelah prosesi pelantikan, acara dilanjutkan dengan seminar nasional dan diseminasi kebijakan yang menghadirkan narasumber berkompeten.

Di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng M Noor Nugroho, dan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi.

Dengan kepengurusan yang baru dan sinergi yang makin kuat, ISEI Cabang Semarang diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan ekonomi yang konkret, seiring dengan gerak cepat Pemkot Semarang dalam mewujudkan kota yang semakin hebat dan sejahtera.

KDMP Undaan Lor Kudus panen perdana nila dari kolam bioflok bantuan KKP

Jumat, 22 Mei 2026 15:17 WIB

<https://jateng.antaranews.com/berita/632797/kdmp-undaan-lor-kudus-panen-perdana-nila-dari-kolam-bioflok-bantuan-kkp>

Kudus (ANTARA) - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Jumat, melakukan panen perdana ikan nila dari kolam bioflok bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Panen perdana tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Didik Tri Prasetyo mewakili Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri, Komandan Kodim 0722/Kudus Letkol Arh

Yuusufa Allan Andriasie, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo, Kepala Desa Undaan Lor, serta pengurus KDMP Undaan Lor.

"Dari KKP kami diarahkan melakukan budidaya ikan tematik, terutama ikan nila karena memiliki pangsa pasar cukup baik di Kabupaten Kudus," kata Ketua KDMP Undaan Lor Rifan Hamim di sela panen ikan nila di area persawahan Desa Undaan Lor.

Menurut dia budidaya ikan nila dengan sistem bioflok memiliki tantangan tersendiri karena teknologi tersebut selama ini lebih banyak digunakan untuk budidaya ikan lele.

Sistem bioflok sendiri mengandalkan kolam bundar berbahan terpal atau HDPE yang dilengkapi aerator untuk mengubah limbah budidaya menjadi flok atau pakan alami bernutrisi melalui bantuan probiotik dan molase.

"Alhamdulillah bantuan 24 kolam bioflok tahun anggaran 2025 akhirnya hari ini (22/6) bisa panen perdana," ujarnya.

Ia menjelaskan setiap kolam diisi sekitar 700 ekor ikan nila dengan masa pemeliharaan sekitar tiga hingga empat bulan. Untuk ukuran panen saat ini, satu kilogram berisi sekitar tiga hingga empat ekor ikan.

"Empat kolam bisa menghasilkan sekitar satu ton ikan saat panen," ujarnya.

Untuk menjaga keberlanjutan produksi, KDMP menerapkan sistem grading atau pengelompokan ukuran ikan sehingga panen dapat dilakukan bertahap dan berkesinambungan.

Hasil panen dijual dengan harga antara Rp25.000 hingga Rp40.000 per kilogram tergantung ukuran ikan. Selain dipasarkan ke warung makan, hasil panen juga akan disuplai untuk memenuhi kebutuhan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Undaan Lor.

Komandan Kodim 0722/Kudus Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie berharap budidaya ikan nila tersebut mampu mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.

"Protein ikan sangat baik untuk kesehatan dan kecerdasan anak sehingga bisa menciptakan generasi masa depan Indonesia yang lebih maju," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Didik Tri Prasetyo mengapresiasi keberhasilan panen perdana tersebut karena dinilai mendukung program ketahanan pangan sekaligus membuka peluang usaha baru di sektor perikanan.

"Program seperti ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa," ujarnya.

Ia berharap budidaya ikan nila bioflok di Desa Undaan Lor dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan menjadi sarana edukasi kepada masyarakat bahwa sumber protein tidak hanya berasal dari daging, tetapi juga ikan.

Menurut dia berkembangnya sektor budidaya ikan di desa akan berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, terbukanya lapangan kerja, hingga meningkatnya kesejahteraan warga.

"Pemerintah Kabupaten Kudus mendukung program-program produktif seperti ini agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga tumbuh kuat dari desa," ujarnya.

Harga Minyak Meledak, Inflasi Menggila, Ketua Baru The Fed Masuk Arena

Sabtu, 23 Mei 2026 05:55 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

https://internasional.kontan.co.id/news/harga-minyak-meledak-inflasi-menggila-ketua-baru-the-fed-masuk-arena#goog_rewarded

KONTAN.CO.ID - Kevin Warsh resmi dilantik sebagai ketua bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) pada Jumat (22/5/2026), di tengah situasi krusial bagi ekonomi AS. Lonjakan harga bensin akibat perang Iran mendorong inflasi naik dan melemahkan sentimen konsumen, menciptakan dilema kebijakan yang sarat implikasi politik.

Melansir Reuters, Warsh, mengenakan setelan jas gelap dan didampingi istrinya Jane Lauder, pewaris kerajaan bisnis kosmetik Estee Lauder, dilantik oleh Hakim Mahkamah Agung Clarence Thomas setelah diperkenalkan secara panjang lebar oleh Presiden AS Donald Trump. Ruang East Room Gedung Putih dipenuhi pejabat tinggi kabinet, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, serta sahabat lama Warsh seperti mantan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice.

Trump, yang selama ini terus mengkritik mantan Ketua The Fed Jerome Powell karena tidak memangkas suku bunga, mengatakan Warsh akan mendapat “dukungan penuh” dari pemerintahannya dan diharapkan tetap “sepenuhnya independen” dalam menjalankan tugasnya. Namun Trump juga menekankan bahwa “pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti inflasi.”

“Kita akan menurunkan suku bunga,” kata Trump di Rockland Community College, New York. “Suku bunga akan turun bersama harga energi. Kalian lihat saja nanti. Dulu saya punya kepala The Fed yang buruk, sekarang saya punya ketua The Fed yang hebat, Kevin Warsh.”

Menyebut jabatan itu sebagai “kehormatan terbesar dalam hidup”, Warsh berjanji memimpin Federal Reserve yang berorientasi reformasi dengan belajar dari keberhasilan maupun kesalahan masa lalu.

Ia menghadapi ledakan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dinilai pejabat The Fed dapat mengubah ekonomi secara mendalam bagi pekerja, perusahaan, dan konsumen, namun sulit diukur dampaknya secara real time.

Di saat yang sama, inflasi berada di level tinggi dan berpotensi meningkat lebih jauh akibat lonjakan harga minyak di atas US\$ 100 per barel karena perang AS-Israel melawan Iran, tarif impor tinggi, serta kenaikan biaya utilitas dan energi terkait ekspansi AI.

Menunjukkan tingginya taruhan politik dan ekonomi, survei konsumen Universitas Michigan pada Jumat menunjukkan sentimen konsumen jatuh ke level terendah sepanjang sejarah. Optimisme di kalangan pemilih Partai Republik maupun independen juga turun ke titik terendah selama masa jabatan kedua Trump.

“Mandat kami di The Fed adalah menjaga stabilitas harga dan lapangan kerja maksimum,” kata Warsh. “Jika kami menjalankan tujuan itu dengan kebijaksanaan, kejelasan, independensi, dan ketegasan, maka inflasi bisa lebih rendah, pertumbuhan lebih kuat, pendapatan riil masyarakat meningkat, dan Amerika menjadi lebih makmur sekaligus lebih aman secara global.”

The Fed pada Jumat malam menyatakan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) secara bulat memilih Warsh sebagai ketua, menjadikannya pemimpin resmi panel penentu suku bunga AS.

Waller Dorong The Fed Tinggalkan Bias Pemangkasan Suku Bunga

Perdebatan mengenai kebijakan The Fed kini semakin memanas. Gubernur The Fed Christopher Waller, yang juga ditunjuk Trump dan sempat menjadi kandidat kuat ketua The Fed, mengatakan bank sentral perlu menghapus “bias pelonggaran” dalam prospek kebijakan moneterinya dan membuka peluang kenaikan suku bunga.

Menurut Waller, data terbaru menunjukkan inflasi semakin meluas dan menguat di berbagai sektor ekonomi.

“The Fed harus menjelaskan bahwa peluang penurunan suku bunga kini tidak lebih besar dibanding peluang kenaikan suku bunga,” kata Waller sesaat sebelum Warsh dilantik.

Komentar tersebut langsung mendorong ekspektasi pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga paling cepat Oktober mendatang.

Warsh, 56 tahun, memenangkan dukungan Trump setelah proses seleksi publik yang berlangsung lebih dari setahun.

Ekonomi Global Terguncang, 27 Negara Resmi Ajukan Dana Darurat Bank Dunia 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 10.57 WIB

Arief Nugroho Santoso

<https://inikata.co.id/ekonomi-global-terguncang-27-negara-resmi-ajukan-dana-darurat-bank-dunia-2026>

Kondisi finansial global saat ini tengah berada dalam titik yang sangat mengkhawatirkan. Sebuah dokumen internal Bank Dunia yang bocor mengungkap bahwa puluhan negara sedang berupaya keras mengamankan dana darurat demi menghindari kebangkrutan ekonomi.

Setidaknya ada 27 negara yang dilaporkan bergerak secara senyap untuk mendapatkan akses bantuan keuangan tersebut. Langkah cepat ini diambil sebagai upaya membentengi stabilitas domestik mereka dari dampak negatif konflik bersenjata di Timur Tengah.

Dampak Perang Iran dan Krisis Logistik Global

Kepanikan ini dipicu oleh pecahnya perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sejak akhir Februari 2026. Konflik tersebut telah melumpuhkan jalur distribusi logistik global dan menyebabkan lonjakan harga energi yang luar biasa tinggi.

Situasi semakin parah karena pengiriman pupuk ke negara-negara berkembang ikut terhambat akibat ketegangan militer ini. Blokade di kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama yang memicu ketakutan akan terjadinya bencana kelaparan serta keruntuhan ekonomi massal.

Berikut adalah poin-poin utama penyebab krisis yang tercatat dalam laporan tersebut:

- **Gangguan Rantai Pasok:** Jalur distribusi barang dunia terhenti akibat blokade di titik-titik krusial.
- **Melambungnya Harga Energi:** Biaya bahan bakar minyak dan gas melonjak drastis di pasar internasional.
- **Krisis Sektor Pertanian:** Terhambatnya pasokan pupuk mengancam ketahanan pangan di banyak negara berkembang.

- **Penurunan Pendapatan Negara:** Negara pengekspor minyak pun terdampak karena volume pengiriman yang merosot tajam.

Poin-poin di atas menunjukkan betapa rapuhnya sistem ekonomi dunia saat menghadapi gangguan di jalur perdagangan energi utama. Dampak ini dirasakan mulai dari tingkat industri hingga menyentuh kebutuhan pokok masyarakat kecil di berbagai negara.

Upaya Penyelamatan Melalui Dana Darurat

Bank Dunia dikabarkan tengah memproses berbagai instrumen pendanaan darurat untuk meredakan guncangan ekonomi yang sedang terjadi. Meskipun dokumen tersebut telah beredar, pihak Bank Dunia sendiri memilih untuk tidak memberikan pernyataan resmi terkait kebocoran informasi tersebut.

Berdasarkan laporan yang beredar, saat ini terdapat tiga negara yang status pengajuan dananya telah disetujui. Sementara itu, 24 negara lainnya dilaporkan masih dalam tahap pemenuhan persyaratan administrasi agar bantuan tersebut bisa segera cair.

Informasi mengenai negara-negara yang terlibat dalam proses dana darurat:

| Kategori Status | Jumlah Negara | Contoh Negara Teridentifikasi |
|----------------------|---------------|------------------------------------|
| Dana Sudah Disetujui | 3 Negara | Kenya, Irak |
| Proses Administrasi | 24 Negara | Dirahasiakan demi stabilitas pasar |

Tabel ini menggambarkan bahwa upaya penyelamatan sedang berlangsung dengan tingkat kerahasiaan tinggi guna menjaga kepercayaan pasar. Identitas sebagian besar negara tidak dipublikasikan secara mendetail untuk mencegah kepanikan lebih lanjut di bursa saham dan nilai tukar mata uang.

Ironi Krisis Energi di Negara Penghasil Minyak

Kenya dan Irak menjadi dua negara yang telah mengonfirmasi niat mereka untuk mengajukan bantuan mendesak kepada Bank Dunia. Kedua negara ini menghadapi tekanan ekonomi berat setelah harga BBM di tingkat domestik melonjak hingga membebani daya beli masyarakat.

Kondisi yang dialami Irak tergolong cukup ironis mengingat statusnya sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Meski kaya akan sumber daya, pendapatan ekspor Irak justru anjlok drastis akibat blokade yang menghentikan arus keluar minyak mentah mereka.

Para analis memperkirakan bahwa jika negosiasi damai tidak segera membuahkan hasil, pasar minyak dunia akan memasuki fase kritis dalam waktu dekat. Situasi ini kemungkinan besar akan memaksa lebih banyak negara untuk bergantung pada bantuan lembaga keuangan internasional demi bertahan hidup.

Ekonom: BI Rate Tinggi Harus Diimbangi Makroprudensial Longgar

Sabtu, 23 Mei 2026 19:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109868/ekonom-bi-rate-tinggi-harus-diimbangi-makroprudensial-longgar/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) baru saja menaikkan BI Rate menjadi 5,25 dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pekan ini. Kenaikan tersebut dimaksud sebagai salah satu upaya untuk menstabilisasi nilai tukar.

Namun Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede beranggapan bahwa kenaikan BI Rate tak bisa berdiri sendiri. Harus dilakukan upaya lainnya supaya dampaknya tak terlalu menekan pertumbuhan, termasuk pertumbuhan kredit.

“Agar dampaknya tidak terlalu menekan kredit, kebijakan makroprudensial harus tetap longgar dan diarahkan ke sektor produktif, terutama pangan, energi, manufaktur, ekspor, perumahan terjangkau, dan UMKM yang masuk rantai pasok,” kata Josua.

Josua juga menyebut bahwa pemerintah perlu mempercepat belanja produktif, menjaga harga pangan dan energi, serta memperkuat kepastian fiskal agar pasar tidak hanya melihat BI bekerja sendirian

Tak cuma pemerintah, Ia juga menyebut bahwa sektor perbankan juga harus bisa menjaga keseimbangan antara kehati-hatian dan dukungan pembiayaan.

“Dengan memperkuat penilaian risiko berbasis arus kas, bukan sekadar agunan,” katanya.

Apalagi menurut Josua, proyeksi pertumbuhan kredit kemungkinan perlu direvisi lebih hati-hati.

Sebelum kenaikan BI Rate, kredit perbankan masih berpeluang tumbuh di kisaran menengah atas, tetapi setelah kenaikan 50 basis poin, realisasi kredit 2026 kemungkinan lebih dekat ke batas bawah kisaran proyeksi

“Terutama jika rupiah belum cepat stabil dan bank makin selektif,” katanya.

Menurutnya, kredit korporasi besar mungkin masih bertahan karena kebutuhan modal kerja dan proyek strategis, tetapi kredit UMKM, konsumsi, properti, dan otomotif lebih rentan tertahan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga masih bisa bertahan di atas 5% jika konsumsi domestik, belanja pemerintah, dan investasi tetap berjalan, tetapi peluang akselerasi menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, kenaikan BI Rate memperkuat stabilitas, tetapi mengurangi ruang ekspansi ekonomi.

Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo membeberkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia usai menaikkan suku bunga Bank Indonesia menjadi 5,25% termasuk kebijakan makroprudensial

Perry bilang, Bank Indonesia akan meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial kepada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Hingga Mei 2026, nilai Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah mencapai Rp424,7 triliun.

Likuiditas tersebut dialokasikan kepada bank-bank nasional, terdiri dari Bank BUMN sebesar Rp214,2 triliun, bank swasta Rp171,1 triliun, serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp30,6 triliun. Insentif juga diarahkan kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung program pemerintah dan penciptaan pertumbuhan ekonomi.

“Dari kebijakan makroprudensial longgar memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit dan menurunkan suku bunga yang menjaga suku bunga kreditnya tetap rendah,” kata Perry

Selain itu Bank Indonesia memperluas cakupan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) guna memperbesar kapasitas perbankan dalam mendorong pertumbuhan kredit. Dalam ketentuan RIM, perbankan diwajibkan menjaga rasio intermediasi pada kisaran 84% hingga 94%.

“Kami mendorong pemenuhan 84 sampai 94% ini adalah memperluas cakupannya dari sisi liabilities atau funding, kami memperluas cakupannya tidak hanya dana pihak ketiga yang tradisional ya rekening giro, tabungan deposito, tapi juga penerbitan sekuritas surat berharga, baik konvensional maupun syariah,” jelas Perry.

BI Catat Kredit Perbankan Tumbuh 9,4% YoY Per April 2026, Ditopang Kredit Korporasi

Sabtu, 23 Mei 2026 15:09 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-catat-kredit-perbankan-tumbuh-94-yoy-per-april-2026-ditopang-kredit-korporasi>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan kembali menguat pada April 2026 seiring meningkatnya penyaluran pembiayaan ke sektor korporasi, kredit modal kerja, serta kredit konsumsi.

Berdasarkan data BI yang rilis Jumat (22/5/2026), pertumbuhan kredit perbankan pada April 2026 mencapai 9,4% secara tahunan (year on year/yoy) dengan total outstanding sebesar Rp 8.606,6 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 8,9% yoy.

Peningkatan penyaluran kredit terutama didorong oleh pertumbuhan kredit kepada debitur korporasi dan perorangan. Kredit korporasi tumbuh sebesar 14,5% yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 13,9% yoy. Sementara itu kredit perorangan tumbuh 3,4% yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Maret 2026 sebesar 3% yoy.

Dari sisi penggunaan, Kredit Modal Kerja (KMK) menunjukkan percepatan pertumbuhan menjadi 5,8% yoy pada April 2026, naik dibandingkan Maret 2026 yang tumbuh 4% yoy.

BI menyebut peningkatan KMK terutama ditopang oleh penyaluran kredit pada sektor industri pengolahan, sektor keuangan, real estat, serta jasa perusahaan.

Sementara itu, Kredit Investasi (KI) tetap tumbuh tinggi sebesar 18,4% yoy meski sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 20,1% yoy. Pertumbuhan KI terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit pada sektor konstruksi serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Di sisi lain, Kredit Konsumsi (KK) juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan menjadi 6% yoy pada April 2026 dibandingkan 5,8% yoy pada Maret 2026.

Perkembangan KK tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit multiguna yang masing-masing tumbuh sebesar 4,8% yoy dan 8,5% yoy pada April 2026, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,5% yoy dan 8,3% yoy.

Namun demikian, kredit kendaraan bermotor masih mengalami kontraksi sebesar 9% yoy, sedikit lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 8,9% yoy.

BI juga mencatat penyaluran kredit properti pada April 2026 tumbuh sebesar 17,5% yoy, relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya.

Pertumbuhan kredit properti terutama ditopang oleh peningkatan kredit KPR/KPA dan real estate. Kredit KPR dan KPA tumbuh sebesar 4,8% yoy, sementara kredit real estate meningkat menjadi 13,9% yoy dibandingkan Maret 2026 sebesar 12,9% yoy.

Adapun kredit konstruksi masih tumbuh tinggi sebesar 46% yoy, meski melambat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 47,2% yoy.

Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM masih terbatas. Pada April 2026, kredit UMKM hanya tumbuh sebesar 0,2% yoy, sedikit lebih tinggi dibandingkan Maret 2026 sebesar 0,1% yoy.

Pertumbuhan kredit UMKM terutama didorong oleh kredit usaha mikro yang tumbuh sebesar 0,7% yoy.

Sebaliknya, kredit usaha kecil masih berkontraksi sebesar 0,2% yoy, sedangkan kredit usaha menengah berkontraksi sebesar 0,4% yoy.

Berdasarkan jenis penggunaan, ekspansi kredit UMKM terutama berasal dari kredit investasi yang tumbuh sebesar 10,1% yoy. Di sisi lain, kredit modal kerja UMKM masih mengalami kontraksi sebesar 4,1% yoy.

Ini Strategi BI Redam Kenaikan Bunga Kredit di Semester II-2026

Sabtu, 23 Mei 2026 13:29 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-skema-bi-redam-kenaikan-bunga-kredit-di-semester-ii-2026>

KONTAN.CO.ID-MAKASSAR. Bank Indonesia (BI) akan menerapkan skema baru penguatan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada semester II-2026 untuk meredam transmisi kenaikan BI Rate terhadap suku bunga perbankan, sekaligus menjaga likuiditas dan pertumbuhan kredit tetap terjaga.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Dhaha P. Kuantan mengatakan, reformulasi kebijakan tersebut dilakukan agar kenaikan BI Rate tidak langsung direspons agresif oleh perbankan melalui kenaikan bunga kredit maupun bunga dana.

Menurut Dhaha, selama ini desain KLM lebih diarahkan untuk mempercepat transmisi penurunan BI Rate ke suku bunga kredit. Namun setelah BI menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%, BI kini menyesuaikan desain kebijakan agar transmisi kenaikan suku bunga menjadi lebih terkendali.

“Nanti dihitung berdasarkan spread antara BI Rate dengan suku bunga kredit. Jadi pada saat BI Rate naik tapi bank-bank tidak melakukan kenaikan suku bunga kredit secara signifikan atau tidak manageable, bank-bank itu akan mendapatkan insentif,” ujar Dhaha dalam Pelatihan Wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Dhaha menjelaskan, insentif KLM yang dimaksud berupa pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang diberikan kepada bank-bank yang memenuhi target penyaluran kredit dan pembiayaan sektor prioritas.

Melalui skema tersebut, sebagian dana yang sebelumnya wajib ditempatkan di BI sebagai GWM dapat digunakan bank untuk mendukung pembiayaan ke sektor riil.

Dalam desain baru tersebut, BI akan memberikan insentif penuh kepada bank yang mampu menjaga spread bunga kredit terhadap BI Rate dalam level yang masih dinilai wajar.

Sebagai ilustrasi, apabila spread bunga kredit terhadap BI Rate masih berada di kisaran 3%, maka bank tetap dapat memperoleh insentif KLM secara penuh. Namun apabila bank menaikkan bunga kredit terlalu tinggi hingga spread melebar signifikan, maka insentif akan dikurangi bahkan tidak diberikan.

“Harapannya meskipun BI Rate naik, kenaikan suku bunga kredit menjadi lebih manageable sehingga transmisinya ke pertumbuhan kredit tetap berjalan,” katanya.

Selain memperkuat interest rate channel, BI juga memperkuat skema financing channel dan financing to funding channel untuk menjaga fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan.

Dhaha mengatakan, BI melihat tekanan pendanaan perbankan saat ini semakin meningkat akibat ketatnya persaingan dana, baik antarbank domestik maupun dengan instrumen keuangan lain.

Karena itu, BI menyesuaikan kebijakan RIM dengan memperluas cakupan sumber pendanaan non Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan non-kredit yang dapat diperhitungkan dalam rasio intermediasi.

“Bank jadi bisa lebih fleksibel mengatur sisi funding maupun financing-nya,” ujarnya.

BI juga memperkuat pelonggaran kebijakan makroprudensial guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan intermediasi perbankan, termasuk dari sisi pembiayaan non kredit dan pendanaan non DPK.

Salah satunya dilakukan melalui pelonggaran kebijakan RIM dengan memperluas cakupan dan memperkuat kriteria surat berharga maupun surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan bank sebagai dasar perhitungan RIM. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.

Selain itu, BI meningkatkan insentif KLM dengan tambahan insentif maksimal 0,5% dari DPK bagi bank yang memenuhi nilai RIM sesuai rentang yang ditetapkan BI namun belum memanfaatkan insentif maksimum KLM sebesar 5,5%. Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.

BI juga memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) guna menjaga pertumbuhan kredit dan pembiayaan tetap tinggi, baik dari sisi penawaran perbankan maupun permintaan dunia usaha.

Selain itu, BI akan memperdalam publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), termasuk untuk sektor-sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.

Dhaha menambahkan, skema KLM kini juga semakin bersifat forward looking. Dalam mekanisme tersebut, bank harus menyampaikan komitmen target pertumbuhan kredit terlebih dahulu untuk memperoleh insentif likuiditas dari BI.

Dengan skema tersebut, BI ingin memastikan likuiditas hasil pelonggaran GWM benar-benar digunakan untuk mendukung penyaluran kredit dan pembiayaan produktif.

“Jadi bank-bank mendapatkan insentif likuiditas makro itu memang untuk penyaluran kredit, bukan masuk ke aset lain,” ujar Dhaha.

Risiko Kredit Macet UMKM Tembus 4,62%, BI Soroti Perlambatan Pembiayaan

Sabtu, 23 Mei 2026 15:33 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/risiko-kredit-macet-umkm-tembus-462-bi-soroti-perlambatan-pembiayaan>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mewanti-wanti meningkatnya risiko kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kini mulai menekan laju pertumbuhan pembiayaan perbankan ke sektor tersebut.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Dhaha P. Kuantan mengatakan, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM tidak terlepas dari meningkatnya risiko NPL yang kini berada di level 4,62% per April 2026, atau semakin mendekati ambang batas aman 5%.

“Jadi karena risiko NPL-nya meningkat, bank menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke UMKM,” ujar Dhaha di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya daya beli masyarakat, terutama pada segmen menengah ke bawah, yang berdampak pada kemampuan debitur UMKM dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

Akibatnya, perbankan cenderung menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih hati-hati (selective lending), sehingga pertumbuhan kredit UMKM tertahan.

BI menilai kondisi ini menjadi perhatian penting, sehingga diperlukan berbagai kebijakan untuk kembali mendorong pembiayaan UMKM, termasuk penguatan kebijakan makroprudensial dan program penguatan pembiayaan sektor riil.

“Ini menjadi concern kita bagaimana mendorong kembali pertumbuhan UMKM, termasuk melalui penguatan kebijakan dan instrumen seperti RTIB,” kata Dhaha.

Ia menambahkan, ke depan, dukungan dari berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program Koperasi Desa (KDMP) diharapkan dapat memperbaiki kondisi UMKM pada 2026.

Dengan perbaikan tersebut, perbankan diharapkan kembali lebih agresif dalam menyalurkan kredit ke sektor UMKM.

Sementara itu, BI mencatat penyaluran kredit UMKM pada April 2026 hanya tumbuh 0,2% secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,1% yoy.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh kredit usaha mikro yang tumbuh 0,7% yoy. Namun, kredit usaha kecil masih berkontraksi 0,2% yoy, dan kredit usaha menengah berkontraksi 0,4% yoy.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM terutama ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 10,1% yoy. Sebaliknya, kredit modal kerja UMKM masih mengalami kontraksi 4,1% yoy.

BI menegaskan, penguatan pembiayaan UMKM ke depan perlu terus didorong seiring dengan peran strategis sektor tersebut dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying Dolar AS, BI: Bisa Menekan Rupiah

Sabtu, 23 Mei 2026 10:04 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/masyarakat-diminta-tidak-panic-buying-dolar-as-bi-bisa-menekan-rupiah>

KONTAN.CO.ID-MAKASSAR. Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat tidak melakukan aksi borong dolar Amerika Serikat (AS) secara berlebihan di tengah tekanan pelemahan rupiah. BI menilai kepanikan membeli valas justru dapat memperbesar tekanan di pasar keuangan domestik.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Cusoy Intama mengatakan, fenomena panic buying dolar mirip dengan perilaku masyarakat saat awal pandemi Covid-19, ketika masyarakat ramai-ramai membeli kebutuhan pokok karena khawatir terjadi kelangkaan.

“Kalau panik, orang biasanya langsung beli. Waktu Covid-19 juga begitu, orang langsung menyiapkan beras, minyak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya,” ujar Ruth dalam pelatihan wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Menurut Ruth, pola kekhawatiran serupa kini terjadi di pasar valuta asing. Masyarakat maupun pelaku usaha yang memiliki kebutuhan pembayaran dalam dolar AS cenderung mempercepat pembelian valas karena khawatir nilai tukar rupiah terus melemah.

Ia mencontohkan, orang tua yang memiliki anak berkuliah di luar negeri mulai membeli dolar lebih cepat karena takut biaya pendidikan dan kebutuhan hidup meningkat.

Hal serupa juga dilakukan importir yang memiliki kewajiban pembayaran barang dalam mata uang asing.

“Nasabah yang punya kewajiban impor biasanya berpikir kalau rupiah melemah terus bagaimana nanti bayar kewajibannya,” katanya.

Meski demikian, Ruth memastikan likuiditas dolar AS di pasar domestik masih sangat memadai. BI juga menjamin kebutuhan valuta asing bagi money changer maupun Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) tetap tersedia.

“Likuiditas dolar yang dibutuhkan money changer atau KUPVA harusnya ada, dan Bank Indonesia memastikan likuiditasnya tersedia,” ujarnya.

Ruth mengatakan, BI terus melakukan berbagai langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar keuangan. Namun, ia meminta masyarakat tetap membeli dolar sesuai kebutuhan riil dan tidak didorong faktor psikologis.

“Kalau memang kebutuhannya masih nanti, ya enggak usah beli sekarang,” pungkasnya.

BI Optimistis Kredit Perbankan Tetap Tumbuh Meski Yield SRBI Tinggi dan BI Rate Naik

Sabtu, 23 Mei 2026 11:31 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-optimistis-kredit-perbankan-tetap-tumbuh-meski-yield-srbi-tinggi-dan-bi-rate-naik>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) optimistis tingginya imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tidak akan mengganggu likuiditas perbankan untuk penyaluran kredit pembiayaan ke sektor riil.

Untuk diketahui, imbal hasil atau yield SRBI saat ini sudah naik ke kisaran 6,45% untuk tenor 12 bulan dan mencapai 6,75% untuk tenor tertentu. Kebijakan penyesuaian ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menarik arus modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Seiring dengan itu BI juga telah menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate ke level 5,25%.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Dhaha P. Kuantan mengatakan, meskipun kenaikan BI Rate dan yield SRBI berpotensi menarik dana perbankan masuk ke instrumen SRBI, bank diperkirakan tetap akan menjaga penyaluran kredit karena adanya insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Menurut Dhaha, hingga saat ini kondisi likuiditas perbankan masih memadai. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih mencapai 9,98% secara tahunan (year on year/yoy), sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 11,4% yoy.

“Dengan figur yang seperti itu saya masih melihat target pertumbuhan kredit 8%-12% itu masih visible untuk bisa tercapai,” ujar Dhaha dalam Pelatihan Wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Dhaha mengatakan, BI akan terus mencermati perkembangan ke depan, termasuk kemungkinan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) apabila diperlukan. Namun hingga saat ini, BI masih meyakini target pertumbuhan kredit tahun 2026 tetap realistis dicapai.

Terkait meningkatnya daya tarik SRBI setelah BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, Dhaha menilai bank tidak akan langsung mengalihkan likuiditasnya dari kredit ke SRBI.

Sebab, apabila bank terlalu agresif menempatkan dana di SRBI hingga pertumbuhan kredit melambat, maka bank berpotensi kehilangan insentif KLM yang diberikan BI.

“Kalau mereka switch signifikan ke SRBI, sementara kreditnya turun, berarti mereka tidak mendapatkan insentif KLM. Itu jadi trade off bagi bank,” katanya.

Ia menjelaskan, KLM dirancang BI untuk menjaga keseimbangan antara penempatan dana di instrumen moneter dan penyaluran kredit ke sektor riil.

Selain itu, BI juga mempertimbangkan sisi interest rate channel. Menurut Dhaha, apabila bank menaikkan suku bunga kredit terlalu tinggi mengikuti kenaikan yield SRBI dan biaya dana (cost of fund), maka insentif KLM juga dapat dikurangi.

“Kalau kenaikan suku bunga kredit terlalu tinggi dan deviasinya jauh dari BI Rate, tentunya insentifnya akan berkurang atau bahkan tidak mendapatkan insentif,” ujarnya.

Karena itu, BI berharap perbankan tetap menjaga kenaikan suku bunga kredit dalam level yang manageable agar permintaan pembiayaan tetap terjaga dan pertumbuhan kredit tidak terganggu.

Dhaha optimistis kombinasi kebijakan KLM, baik melalui financing channel maupun interest rate channel, akan membuat perbankan tetap menyalurkan kredit meskipun SRBI menawarkan imbal hasil yang menarik.

“Harapannya bank tetap balancing antara SRBI dan kredit karena ada insentif yang besar dari KLM,” imbuhnya.

BI: Insentif KLM Bakal Redam Kenaikan Bunga Kredit Perbankan Pasca BI Rate Naik

Sabtu, 23 Mei 2026 12:38 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-insentif-klm-bakal-redam-kenaikan-bunga-kredit-perbankan-pasca-bi-rate-naik>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyebut insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dapat meredam kenaikan agresif suku bunga kredit dan bunga pendanaan (DPK) perbankan pasca kenaikan BI Rate menjadi 5,25%.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Dhaha P. Kuantan mengatakan, skema insentif KLM dirancang agar perbankan tetap menjaga penyaluran kredit dan tidak menaikkan bunga kredit maupun bunga dana secara berlebihan.

Menurut Dhaha, hingga saat ini kondisi likuiditas perbankan masih cukup kuat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit dan DPK yang di kisaran 9% secara tahunan (year on year/YoY) pada April 2026.

“Dengan kondisi itu, target pertumbuhan kredit 8%-12% masih visible untuk tercapai,” ujar Dhaha dalam Pelatihan Wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Dhaha menjelaskan, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin memang berpotensi mendorong kenaikan yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), biaya dana (cost of fund), hingga bunga kredit perbankan. Namun, BI menilai bank tidak akan menaikkan bunga secara agresif karena adanya mekanisme insentif KLM.

Dalam skema tersebut, bank yang menjaga spread bunga kredit tetap wajar terhadap BI Rate akan memperoleh insentif likuiditas lebih besar dari BI.

“Kalau spread antara BI Rate dan suku bunga kredit masih sekitar 3%, itu kita anggap masih wajar dan bank akan mendapatkan insentif penuh,” katanya.

Sebaliknya, apabila perbankan menaikkan bunga kredit terlalu tinggi hingga spread terhadap BI Rate melebar signifikan, maka insentif KLM akan dikurangi bahkan tidak diberikan.

“Kalau spread-nya terlalu tinggi, insentifnya akan semakin berkurang bahkan tidak mendapatkan insentif,” ujar Dhaha.

Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan BI agar transmisi kenaikan suku bunga acuan tetap manageable dan tidak langsung membebani dunia usaha maupun debitur.

Dhaha mengatakan, KLM kini juga dirancang lebih forward looking. Dalam mekanisme baru tersebut, bank harus lebih dulu menyampaikan komitmen target penyaluran kredit untuk mendapatkan insentif likuiditas.

Dengan demikian, BI berharap likuiditas yang diberikan benar-benar digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor riil, bukan dialihkan ke instrumen lain.

Selain dari sisi penyaluran kredit, BI juga memperkuat efektivitas KLM melalui financing to funding channel untuk menjaga stabilitas pendanaan perbankan.

“Kalau funding-nya kuat, harapannya penyaluran kreditnya juga kuat,” katanya.

Dhaha menambahkan, BI juga terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pemerintah dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna meredam persaingan special rate bunga dana antarbank.

Menurut dia, penurunan special rate diperlukan agar biaya dana perbankan tidak meningkat terlalu tinggi pasca kenaikan BI Rate.

“Di forum KSSK juga kami koordinasi untuk menghimbau special rate ini bisa diturunkan,” imbuhnya.

Suku Bunga BI Naik 50 Bps, Ini Dampaknya ke Cicilan Rumah, Mobil, dan Daya Beli

Sabtu, 23 Mei 2026 03:57 WIB

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie, Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

<https://nasional.kontan.co.id/news/suku-bunga-bi-naik-50-bps-ini-dampaknya-ke-cicilan-rumah-mobil-dan-daya-beli>

KONTAN.CO.ID - Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.

Langkah ini diambil di tengah tekanan yang terus membayangi nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Kenaikan suku bunga ini sekaligus menjadi sinyal bahwa bank sentral akan mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat guna menjaga stabilitas rupiah serta memperkuat kredibilitas kebijakan moneter nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Tekanan terhadap rupiah sendiri masih cukup besar.

Secara month to date (MTD), nilai tukar rupiah tercatat telah terdepresiasi sekitar 2,2 persen dan sempat mendekati level Rp 17.700 per dollar Amerika Serikat (AS).

Lantas, bagaimana dampak kenaikan suku bunga acuan tersebut terhadap masyarakat, terutama bagi cicilan kredit dan daya beli?

Dampak kenaikan suku bunga BI

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, BI Rate merupakan acuan utama bagi pergerakan suku bunga di Indonesia, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman.

Menurut dia, kenaikan BI Rate pada akhirnya akan diikuti kenaikan berbagai jenis suku bunga di sektor perbankan, kecuali untuk pinjaman yang menggunakan bunga tetap atau fixed.

“Jika BI Rate naik, maka seluruh suku bunga pada dasarnya akan ikut naik, kecuali pinjaman dengan bunga fixed,” ujar Wijayanto kepada Kompas.com, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan BI Rate dari 4,75% menjadi 5,25% dilakukan dengan harapan dapat menarik lebih banyak investor untuk menempatkan dana di Indonesia, termasuk investor asing.

Dengan masuknya arus modal tersebut, pemerintah dan bank sentral berharap tekanan terhadap rupiah dapat berkurang sehingga nilai tukar menjadi lebih stabil.

“Harapannya, arus modal masuk meningkat sehingga rupiah bisa lebih stabil dan tekanan terhadap nilai tukar berkurang,” katanya.

Cicilan kredit berpotensi naik

Karena BI Rate menjadi referensi utama perbankan, kenaikan suku bunga acuan juga berpotensi membuat bunga kredit ikut meningkat.

Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada penjualan berbagai produk bernilai besar atau big ticket item, seperti rumah, apartemen, mobil, motor, hingga barang elektronik.

Wijayanto menilai kenaikan bunga kredit akan membuat cicilan bulanan masyarakat menjadi lebih mahal, sementara daya beli masyarakat saat ini juga sedang mengalami tekanan.

“Ketika bunga naik, cicilan otomatis ikut meningkat. Pada saat yang sama, daya beli masyarakat juga sedang melemah, sehingga penjualan produk-produk besar kemungkinan ikut tertekan,” jelasnya.

Meski demikian, tidak semua pinjaman akan langsung terdampak kenaikan bunga.

Hal tersebut bergantung pada jenis skema kredit yang digunakan nasabah.

Pinjaman dengan bunga tetap atau fixed rate tidak akan mengalami perubahan cicilan hingga masa bunga tetap berakhir.

Namun, kredit dengan bunga mengambang atau floating rate berpotensi mengalami kenaikan cicilan karena suku bunganya akan menyesuaikan dengan kenaikan BI Rate.

"Pinjaman yang sudah disepakati, apakah akan mengalami kenaikan suku bunga? Tergantung kesepakatan. Pinjaman dengan bunga tetap tidak akan mengalami kenaikan suku bunga. Tetapi, pinjaman dengan bunga floating (mengambang) akan mengalami kenaikan nilai cicilan," jelasnya.

"Hal ini karena suku bunga akan akan meningkat menyesuaikan suku bunga pasca kenaikan BI-rate," tambahnya.

Mengutip informasi dari laman Bank Indonesia, suku bunga acuan sangat memengaruhi suku bunga pada lembaga perbankan.

Ketika BI Rate naik, bunga deposito dan kredit perbankan juga cenderung ikut meningkat. Sebaliknya, apabila BI Rate turun, bunga deposito maupun kredit biasanya ikut menurun.

BI menjelaskan, saat suku bunga kredit rendah, masyarakat cenderung lebih mudah mengambil pinjaman untuk kebutuhan konsumsi maupun pengembangan usaha karena bunga yang lebih ringan.

Namun, ketika suku bunga tinggi, masyarakat biasanya akan lebih berhati-hati untuk meminjam uang ke bank karena cicilan menjadi lebih mahal.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga dapat mendorong masyarakat lebih tertarik menyimpan uang di bank karena bunga tabungan dan deposito menjadi lebih menarik.

Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, sebagian masyarakat cenderung memilih menggunakan uangnya untuk konsumsi, investasi, atau membuka usaha dibanding menyimpannya di tabungan.

BI juga menilai pemahaman mengenai BI Rate penting bagi masyarakat karena dapat membantu dalam mengambil keputusan keuangan, mulai dari mengelola pinjaman, menyusun strategi investasi, hingga mengatur tabungan.

Dalam pengelolaan pinjaman misalnya, masyarakat dapat memperkirakan potensi kenaikan cicilan ketika BI Rate naik sehingga bisa lebih siap mengatur arus kas maupun pengeluaran bulanan.

Sementara dalam strategi investasi, BI Rate yang tinggi biasanya membuat instrumen seperti deposito menjadi lebih menarik, sedangkan saat BI Rate rendah masyarakat mungkin akan mencari instrumen investasi lain dengan imbal hasil lebih tinggi.

Rupiah belum tentu langsung menguat

Meski BI telah menaikkan suku bunga secara agresif, Wijayanto menilai langkah tersebut belum tentu mampu membuat rupiah langsung stabil atau menguat.

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor jangka pendek, tetapi juga berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi nasional, terutama persoalan fiskal dan neraca pembayaran.

“Pelemahan rupiah terjadi karena kondisi fiskal yang buruk dan masalah struktural pada neraca pembayaran yang terus menunjukkan tren defisit,” ujarnya.

Ia menilai, tanpa pembenahan terhadap persoalan struktural tersebut, kebijakan BI kemungkinan hanya mampu meredam gejolak atau volatilitas rupiah dalam jangka pendek, namun belum cukup kuat untuk mendorong penguatan nilai tukar secara berkelanjutan.

“Kalau isu fiskal dan neraca pembayaran tidak dibenahi, kebijakan BI kemungkinan hanya bisa mengurangi volatilitas rupiah, bukan benar-benar memperkuat nilainya,” kata Wijayanto.

Tabel: Dampak Kenaikan BI Rate Menjadi 5,25 Persen

| Dampak | Penjelasan |
|--|---|
| Bunga pinjaman naik | Suku bunga kredit perbankan berpotensi meningkat |
| Cicilan floating rate naik | Kredit dengan bunga mengambang dapat mengalami kenaikan cicilan |
| Kredit fixed rate relatif aman | Cicilan tetap hingga masa bunga tetap berakhir |
| Daya beli masyarakat tertekan | Pengeluaran masyarakat meningkat akibat cicilan lebih mahal |
| Penjualan big ticket item berpotensi turun | Penjualan rumah, mobil, motor, dan elektronik bisa melambat |
| Rupiah diharapkan lebih stabil | Kenaikan suku bunga bertujuan menarik arus modal masuk |
| Rupiah belum tentu langsung menguat | Masalah fiskal dan neraca pembayaran masih membayangi |

Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Pengusaha Tiongkok

Sabtu, 23 Mei 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-genjot-investasi-ebt-dan-pengelolaan-sampah-ahmad-luthfi-tawarkan-ke-pengusaha-tiongkok/>

JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tak henti-hentinya mempromosikan potensi investasi di wilayahnya kepada para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satunya, saat menghadiri jamuan makan malam Pertukaran Tokoh Politik dan Bisnis Tiongkok-Indonesia, dalam rangka Program DBA Entrepreneur Scholar Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) angkatan 12, di Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan pengusaha asal Tiongkok yang sudah menanamkan investasi di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasi penyelenggaraan acara tersebut. Dia mengajak para pengusaha tersebut untuk berkunjung ke Jawa Tengah. Apalagi, provinsi ini terbuka untuk penanaman investasi.

Sebagai gambaran, pada 2025 lalu investasi di Jawa Tengah mencapai Rp110,02 triliun. Terdiri dari atas penanaman modal asing (PMA) Rp50,86 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp37,64 triliun, dan UMK Rp21,52 triliun. Sementara pada triwulan I 2026 sudah mencapai Rp23,02 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,89%.

Saat ini ada sekitar tujuh kawasan industri dan ekonomi khusus, yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Selain itu, 12 daerah sedang menyiapkan kawasan industri dan ekonomi khusus baru, untuk menunjang investasi dan pemerataan ekonomi.

“Tiongkok menjadi salah satu negara asal investasi tertinggi di Jawa Tengah, nilainya mencapai sekitar Rp10,13 triliun,” ungkapnya.

Luthfi menyampaikan, keseriusan Jawa Tengah dalam mengembangkan ekonomi baru terbarukan (EBT) dan pengelolaan sampah. Ada sekitar tujuh proyek yang siap ditawarkan kepada investor untuk sektor EBT. Di antaranya PLTS, mikrohidro, biogas, biomassa, gas rawa, energi sampah atau waste to energy, dan panas bumi atau geothermal.

“Kami membuka peluang lebar-lebar bagi investasi pengolahan sampah di Jawa Tengah, sehingga akan membantu kami dalam rangka energi terbarukan,” katanya.

Sementara itu, CEO PT WOOK Global Technology, Cu Longhua mengatakan, pertemuan para pengusaha dari berbagai industri ini perlu terus diperluas. Perusahaan yang hadir menawarkan sumber daya industri berkualitas tinggi yang sangat kompatibel dan dapat diterapkan secara mendalam. Mencakup perlindungan ekologis dan sumber daya limbah padat yang dipadatkan, memanfaatkan tambang untuk restorasi ekologis, industri energi baru, teknologi digital, manufaktur kelas atas, dan pertanian modern.

“Saat ini, Presiden Prabowo dengan penuh semangat mempromosikan pengelolaan sampah. Seperti menjadi pembangkit listrik. Kami adalah perusahaan terkemuka di industri ini di Tiongkok,” katanya.

Sementara, CEO PT AAC Technologies Holding, Benjamin Pan, mengatakan, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menawarkan ruang pasar yang luas, lingkungan pembangunan yang sangat baik, dan potensi pertumbuhan yang sangat besar.

“Kami melihat kemungkinan kolaborasi yang tak terbatas,” kata dia.

Sebagai informasi, program DBA Entrepreneur Scholar dari CKGSB merupakan program doktoral eksekutif bergengsi. Program itu menggabungkan riset akademik tingkat lanjut, dengan praktik kewirausahaan dan bisnis. Program tersebut ditujukan bagi para pendiri bisnis dan pemimpin perusahaan senior. CKGSB dikenal sebagai salah satu sekolah bisnis independen dan nirlaba terkemuka di Tiongkok, dengan jaringan alumni kuat dari berbagai perusahaan unicorn, hingga korporasi multinasional dunia. (Humas Jateng)*ul

Luthfi Tawarkan ke Pengusaha Tiongkok Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah

Sabtu, 23 Mei 2026

Penulis Budi Aris

<https://radioidola.com/2026/luthfi-tawarkan-ke-pengusaha-tiongkok-investasi-ebt-dan-pengelolaan-sampah/>

Semarang, Idola 92,6 FM-Pemprov Jawa Tengah terus mempromosikan potensi investasi, kepada para investor dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satunya, di acara jamuan makan malam Pertukaran Tokoh Politik dan Bisnis Tiongkok-Indonesia, dalam rangka Program DBA Entrepreneur Scholar Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) angkatan 12 di Grand Hyatt, Jakarta, kemarin.

Kegiatan tersebut dihadiri puluhan pengusaha asal Tiongkok, yang sudah menanamkan investasi di Indonesia.

Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasi penyelenggaraan acara itu, dan mengajak kepada para pengusaha Tiongkok untuk berkunjung ke Jateng.

Terlebih, provinsi ini terbuka untuk penanaman investasi.

“Tiongkok menjadi salah satu negara asal investasi tertinggi di Jawa Tengah, nilainya mencapai sekitar Rp10,13 triliun,” kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan, pada 2025 kemarin, investasi di Jateng mencapai Rp110,02 triliun.

Terdiri atas penanaman modal asing (PMA) Rp50,86 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp37,64 triliun dan UMK Rp21,52 triliun.

Sementara pada triwulan I 2026, sudah mencapai Rp23,02 triliun dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,89 persen.

“Kami membuka peluang lebar-lebar bagi investasi pengolahan sampah di Jawa Tengah, sehingga akan membantu kami dalam rangka energi terbarukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, program DBA Entrepreneur Scholar dari CKGSB merupakan program doktoral eksekutif bergengsi.

Program ini menggabungkan riset akademik tingkat lanjut, dengan praktik kewirausahaan dan bisnis. (Bud)

Minyak Mahal, Picu Gelombang Pengetatan Moneter Global

Minggu, 24 Mei 2026 12:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109900/minyak-mahal-picu-gelombang-pengetatan-moneter-global/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kenaikan harga minyak mentah telah mengerek inflasi global. Bukan hanya Amerika Serikat (AS), sejumlah negara diproyeksikan mengalami inflasi pada kuartal II-2026.

Jika harga minyak terus bertahan tinggi dan jalur perdagangan energi global tetap terganggu, bank sentral dunia kemungkinan akan kembali memasuki fase kebijakan moneter ketat lebih lama dari perkiraan sebelumnya.

Sejumlah bank sentral dunia diperkirakan mempertahankan bahkan menaikkan suku bunga untuk mengantisipasi lonjakan inflasi impor.

Jadwal bank sentral dunia menetapkan suku bunga acuan. (Bloomberg Economics)

Di Asia, Bank of Korea, Reserve Bank of New Zealand, hingga Reserve Bank of Australia menghadapi tekanan serupa. Inflasi kawasan diperkirakan tetap tinggi akibat kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global.

Singapura diperkirakan mencatat percepatan inflasi pada April menjadi 2,1%, sementara Jepang masih menghadapi tekanan harga yang membuka peluang kenaikan suku bunga lanjutan oleh Bank of Japan. Australia juga diperkirakan masih mencatat inflasi inti di atas target bank sentral.

Di Eropa, inflasi di negara-negara utama seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol diperkirakan tetap tinggi akibat lonjakan harga energi. Hal itu dapat memperumit langkah European Central Bank yang sebelumnya mulai mempertimbangkan pelonggaran moneter.

Konsensus yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan inflasi Italia mencapai 3,3% secara tahunan pada Mei, dari 2,8% pada April. Sementara, inflasi Spanyol diprediksi mencapai 3,4%, dari posisi April di 3,2%, dan Prancis 2,5% dari sebelumnya 2,2%.

Di sisi lain, Afrika Selatan bahkan diperkirakan akan menaikkan suku bunga pekan ini untuk menahan dampak inflasi akibat perang Iran. Langkah serupa juga berpotensi terjadi di negara berkembang lain yang rentan terhadap kenaikan harga minyak.

Di Australia, data inflasi yang dirilis Rabu kemungkinan menunjukkan indikator trimmed mean masih berada di atas target bank sentral pada April, mempertahankan tekanan terhadap Reserve Bank of Australia di tengah ekspektasi pasar akan kenaikan suku bunga tambahan pada Agustus atau September.

Sementara itu, laba industri China pada April akan menjadi indikator penting mengenai kemampuan manufaktur bertahan di tengah gejolak geopolitik global setelah mencatat kenaikan 15,5% pada kuartal pertama, menjadi kenaikan terbesar untuk periode tersebut dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, negara-negara pengimpor energi menghadapi tekanan ganda. Selain inflasi yang meningkat, pelemahan nilai tukar juga menjadi ancaman serius akibat membengkaknya kebutuhan impor minyak dan keluarnya arus modal asing dari pasar keuangan domestik.

Bagi negara berkembang, situasi ini menjadi pengingat bahwa konflik geopolitik dapat dengan cepat berubah menjadi tekanan ekonomi global. Perang tidak hanya memengaruhi stabilitas keamanan, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap harga energi, inflasi, suku bunga, hingga pertumbuhan ekonomi dunia.

Setelah Indonesia mengumumkan suku bunga acuan pada pekan lalu dengan menaikkan BI Rate secara agresif menjadi 5,25%, pekan ini beberapa bank sentral dijadwalkan mengumumkan kebijakan pekan ini.

Di antaranya Guatemala, Uruguay, Hungaria, Kirgistan, Sri Lanka, Mozambik, Korea Selatan, Selandia Baru, Afrika Selatan, Eswatini, dan Lesotho.

Jika harga minyak terus bertahan tinggi dan jalur perdagangan energi global tetap terganggu, bank sentral dunia kemungkinan akan kembali memasuki fase kebijakan moneter ketat lebih lama dari perkiraan sebelumnya.

Inflasi Global Memanas, The Fed Hadapi Tekanan Baru Akibat Perang

Minggu, 24 Mei 2026 13:30 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109899/inflasi-global-memanas-the-fed-hadapi-tekanan-baru-akibat-perang/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Lonjakan harga energi akibat konflik Iran mulai memunculkan kekhawatiran baru terhadap arah inflasi global. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang paling terdampak, terutama karena kenaikan harga minyak dan bahan bakar kini mulai merembet ke berbagai sektor ekonomi.

Bloomberg melaporkan indikator inflasi favorit Federal Reserve, yakni indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (personal consumption expenditures/PCE), diperkirakan naik menjadi 3,8% secara tahunan pada April 2026, dari sebelumnya 3,5% pada Maret.

Jika proyeksi itu terealisasi, inflasi AS akan meningkat satu poin persentase hanya dalam dua bulan terakhir, ini menjadi inflasi tercepat sejak akhir 2021. Kenaikan tersebut menunjukkan tekanan harga tidak lagi terbatas pada sektor energi semata.

Bahkan inflasi inti, yang mengecualikan komponen energi dan pangan, diperkirakan ikut meningkat ke level tertinggi sejak akhir 2023. Bloomberg memperkirakan inflasi inti AS akan berada di level 3,3% naik dari posisi sebelumnya 3,2%.

Kondisi ini menandakan dampak perang mulai menjalar ke biaya produksi, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga.

Situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi Federal Reserve yang sebelumnya mulai membuka ruang pelonggaran kebijakan moneter. Kini, bank sentral AS justru menghadapi risiko baru bahwa inflasi dapat kembali mengakar lebih lama akibat gangguan pasokan energi global.

Harga bensin di AS saat ini mendekati level tertinggi sejak 2022. Kenaikan biaya energi membuat masyarakat semakin pesimistis terhadap kondisi ekonomi. Sentimen konsumen bahkan tercatat jatuh ke rekor terendah, mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap daya beli rumah tangga.

Bukan hanya konsumen yang tertekan. Dunia usaha global juga mulai mengeluhkan lonjakan biaya bahan baku dan distribusi. Ketidakpastian jalur perdagangan energi, khususnya di Selat Hormuz, membuat biaya logistik dan premi risiko meningkat tajam.

Jika ketegangan geopolitik terus berlangsung dan gangguan pasokan minyak tidak segera mereda, tekanan inflasi diperkirakan semakin sulit dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, ruang bank sentral untuk memangkas suku bunga menjadi sangat terbatas.

Karena itu, pasar kini mulai mengubah ekspektasi terhadap arah kebijakan The Fed. Investor akan mencermati pidato sejumlah pejabat Federal Reserve pekan depan, termasuk John Williams, Philip Jefferson, dan Neel Kashkari, untuk mencari petunjuk mengenai langkah kebijakan berikutnya.

Sinyal paling jelas datang dari Gubernur The Fed Christopher Waller yang menyatakan peluang kenaikan suku bunga kini sama besar dengan kemungkinan penurunan suku bunga. Pernyataan itu memperlihatkan perubahan sikap otoritas moneter AS yang sebelumnya cenderung dovish.

Kondisi tersebut juga mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Investor mulai memperhitungkan kemungkinan suku bunga bertahan tinggi lebih lama di tengah meningkatnya risiko inflasi akibat perang.

“Jika kepercayaan konsumen terus melemah, risiko perlambatan momentum belanja hingga musim panas akan semakin besar. Laporan laba terbaru perusahaan sektor konsumsi non-primer seperti target menunjukkan pengembalian pajak sejauh ini menopang belanja masyarakat,” sebut analis Bloomberg Economics Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Winger, Chris G. Collins, Alex Tanzi, dan Troy Durie, dalam catatannya.

Bloomberg Economics menambahkan, jika Selat Hormuz tetap ditutup, harga bensin yang tinggi secara berkelanjutan akan menggerus bantalan dari dana pengembalian pajak tersebut.

Indikasi Ketidaknyamanan Asing dengan Ekspor SDA Satu Pintu

Minggu, 24 Mei 2026 12:00 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109889/indikasi-ketidaknyamanan-asing-dengan-ekspor-sda-satu-pintu/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pasar merespons negatif pembentukan BUMN yang khusus menangani ekspor sumber daya alam SDA satu pintu, Danantara Sumberdaya Indonesia.

Ketidaknyamanan itu tercermin dari pergerakan investor asing di bursa saham RI, yang masih menggerakkan aksi jual meski IHSG sendiri sudah tertekan beberapa waktu terakhir imbas tensi di Timur Tengah hingga situasi domestik.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing sejatinya sempat melakukan net buy Rp261,23 miliar di seluruh pasar pada Selasa (19/5/2026). Aksi beli ini dilakukan di tengah masih tertekannya IHSG hingga ditutup melemah 3,46% ke level 6.370,68 sore harinya.

Sehari setelahnya, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan badan ekspor SDA satu pintu dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI.

Investor asing tampak masih mencerna efek pembentukan badan tersebut. Ini tercermin dari posisi investor asing yang masih melakukan net buy Rp249,21 miliar di hari Rabu, meski IHSG ditutup melemah 0,82% di di hari ini.

Pada Kamis (21/5/2026), investor asing mendadak berbalik arah dengan melakukan net sell. Nilainya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp544,85 miliar. Imbasnya, IHSG anjlok 3,54% ke level 6.094,94.

Net sell tersebut terjadi bertepatan dengan dipublikasikannya laporan S&P Global Ratings terkait risiko di balik pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia.

Pada hari terakhir perdagangan pekan ini, Jumat (22/5/2026), investor asing masih melakukan net sell. Nilainya mencapai Rp309,52 miliar.

Laporan S&P

Setidaknya, terdapat tiga risiko utama menurut S&P, jika ekspor SDA dilakukan terpusat melalui satu BUMN, Danantara Sumberdaya Indonesia. Berikut ketiga risiko tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi S&P, Minggu (24/5/2026).

Risiko Pelaksanaan

Implementasi ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia dinilai terlalu cepat. Hal ini menimbulkan potensi pelaksanaan yang buruk, sehingga berimbas pada risiko rusaknya metrik kredit negara.

S&P juga menilai, langkah negara untuk memusatkan ekspor komoditas utama mungkin sulit untuk diimplementasikan dengan cepat.

Pengumuman kebijakan yang mendadak memiliki periode implementasi yang singkat, hanya sekitar tiga bulan, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan pelaksanaan.

Tuai Kontroversi, Ini Alasan Danantara Tunjuk Luke Thomas Pimpin DSI. (Diolah dari Berbagai Sumber)

Risiko Penurunan Pendapatan Negara

Implementasi ekspor SDA satu pintu yang terkesan terburu-buru tersebut dapat menimbulkan gangguan perdagangan, yang mana saat ini sektor industri juga sudah menghadapi gangguan rantai pasok imbas perang di Timur Tengah.

Belum lagi, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan untuk sektor komoditas, seperti perubahan kuota produksi, formula penetapan harga acuan, hingga royalti.

Kombinasi tersebut, ditambah faktor keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia, dapat memukul ekspor Indonesia yang berujung pada tertekannya pendapatan pemerintah dan neraca pembayaran negara.

Risiko Penurunan Peringkat

Faktor-faktor tersebut menciptakan ketidakpastian penurunan yang lebih besar terhadap peringkat S&P untuk Indonesia, yang saat ini berada di (BBB/Stable/A-2).

Langkah baru ini juga dapat merusak kepercayaan bisnis dan sentimen investor. Jika investor memandang pembuatan kebijakan negara sebagai sesuatu yang kurang dapat diprediksi, investasi dapat melambat, berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang berujung pada meningkatnya arus modal asing.

Ekspor SDA Satu Pintu Berisiko Tekan Rupiah ke Rp25.000/Dolar AS

Minggu, 24 Mei 2026 13:00 WIB

Nyoman Ary Wahyudi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109890/ekspor-sda-satu-pintu-berisiko-tekan-rupiah-ke-rp25-000-dolar-as/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Founder sekaligus Chief Marketing Officer & Partner Jarvis Asset Management Kartika Sutandi menilai, terdapat sejumlah risiko di balik penerapan ekspor SDA satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.

Bahkan, salah satu risiko terburuknya adalah, rupiah bisa anjlok hingga tembus Rp25.000/dolar AS.

Menurutnya, kebijakan ekspor SDA satu pintu dinilai terlalu terburu-buru. Pengalihan ekspor ke satu badan milik negara juga berisiko mengalihkan pelanggan luar negeri ke negara lain.

Dia menambahkan, juga terdapat risiko perlambatan penyesuaian jual beli dengan pelanggan luar negeri saat penjualan diserahkan ke Danantara Sumberdaya.

“Karena dipaksa badan ekspor immediately nggak pake pelan-pelan itu takutnya ada revenue dolar AS kita yang jeblok, kalau revenue jeblok S&P bisa downgrade pasti, Moody’s juga,” kata wanita dengan sapaan akrab Tjoe Ay tersebut, dalam kegiatan Stock Idea Festival di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Tjoe Ay juga mengatakan, penerapan badan ekspor satu pintu yang tidak sesuai dengan prinsip bisnis yang wajar akan berisiko terhadap posisi defisit fiskal dan nilai tukar rupiah di masa mendatang.

Risiko itu disebabkan karena ketidakpastian pendapatan pemerintah dalam bentuk dolar AS, akibat kemacetan dari ekspor komoditas utama penopang APBN seperti batubara dan minyak kelapa sawit atau CPO.

“Kalau kena downgrade, rupiah 25.000 itu possible karena bond dijualin secara masif, karena beberapa fund manager di luar yang main fixed income tidak bisa beli kalau dikasih downgrade,” tuturnya.

Rupiah Melemah Tekan Industri Manufaktur, Pertumbuhan Ekonomi RI Berisiko Melambat

Minggu, 24 Mei 2026 20:59 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-melemah-tekan-industri-manufaktur-pertumbuhan-ekonomi-ri-berisiko-melambat>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai mulai memberikan tekanan signifikan terhadap industri manufaktur nasional dan berpotensi membatasi ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Kondisi ini terutama dipicu oleh meningkatnya biaya produksi akibat ketergantungan bahan baku impor serta tekanan biaya energi dan logistik.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor tertentu, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Josua, tekanan terhadap sektor pengolahan terjadi melalui tiga jalur utama, yakni kenaikan biaya bahan baku impor, peningkatan biaya energi dan logistik, serta tertahannya rencana ekspansi usaha. “Tekanan kurs terhadap manufaktur bukan isu sektoral semata, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Josua kepada Kontan, Minggu (24/5/2026).

Manufaktur Masih Jadi Penopang Utama Ekonomi

Ia menjelaskan, industri pengolahan masih menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi nasional bersama sektor perdagangan, pertanian, dan konstruksi, seiring dengan produk domestik bruto (PDB) triwulan I 2026 yang tumbuh 5,61% secara tahunan.

Namun, jika rupiah bertahan lemah di kisaran Rp 17.500 hingga Rp 17.700 per dolar Amerika Serikat (AS), sektor yang bergantung pada bahan baku impor diperkirakan menghadapi tekanan biaya yang semakin berat.

Sektor Paling Rentan Terhadap Pelemahan Rupiah

Josua menyebut sejumlah sektor manufaktur paling rentan terhadap pelemahan rupiah, antara lain petrokimia, plastik, farmasi, elektronik, mesin, otomotif, tekstil, serta makanan dan minuman.

Tekanan tersebut juga mulai tercermin dari indikator aktivitas manufaktur. Data PMI manufaktur Indonesia dari S&P Global pada April 2026 turun ke level 49,1, yang menandakan zona kontraksi.

Dalam laporan tersebut, perang di Timur Tengah turut mendorong inflasi biaya input ke level tertinggi dalam empat tahun. Sementara itu, produksi tercatat turun paling tajam sejak Mei 2025 dan tingkat kepercayaan usaha melemah ke titik terendah sejak November tahun sebelumnya.

“Artinya, pelemahan rupiah datang pada saat industri sudah menghadapi tekanan dari harga energi, gangguan rantai pasok, dan permintaan yang mulai tertahan,” katanya.

Biaya Produksi dan Investasi Meningkat

Josua menegaskan bahwa jika kondisi ini berlanjut, kontribusi manufaktur terhadap PDB memang masih akan tetap positif, namun laju pertumbuhannya berisiko melambat pada triwulan II dan III 2026.

Ia menjelaskan, struktur biaya industri Indonesia masih sangat bergantung pada impor, dengan porsi bahan baku dan bahan pembantu mencapai sekitar 82% dari total biaya input manufaktur. Ketergantungan ini membuat pelemahan rupiah langsung berdampak pada biaya produksi.

Selain itu, defisit perdagangan nonmigas Indonesia terhadap Tiongkok yang mencapai US\$ 5,23 miliar pada Januari–Februari 2026 turut mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap barang modal dan komponen impor.

Akibatnya, pelemahan rupiah tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga memperbesar biaya investasi untuk pembelian mesin, ekspansi kapasitas, hingga pembangunan pabrik baru.

“Keputusan ekspansi bisa ditunda karena biaya proyek menjadi lebih mahal dan permintaan meningkat,” katanya.

Tekanan Harga hingga Daya Beli Masyarakat

Dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang diperkirakan muncul secara bertahap. Pada tahap awal, perusahaan cenderung menahan kenaikan harga dengan mengurangi margin keuntungan, menggunakan stok lama, atau menunda penyesuaian harga jual.

Namun, apabila rupiah tetap lemah dalam satu hingga dua kuartal ke depan, tekanan biaya diperkirakan sulit ditahan dan akan mulai diteruskan ke harga barang.

Produk yang berpotensi terdampak antara lain makanan olahan, obat-obatan, elektronik, suku cadang, kendaraan, produk plastik, tekstil, hingga barang rumah tangga.

Selain itu, pelemahan rupiah juga berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama setelah kebijakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.

Kenaikan suku bunga ini berpotensi meningkatkan beban cicilan kredit untuk pembelian rumah, kendaraan, elektronik, maupun modal usaha.

“Jika kenaikan harga manufaktur dan cicilan terjadi secara bersamaan, daya beli kelas menengah dan kelompok rentan akan lebih mudah tertekan,” jelasnya.

Prospek Ekonomi 2026 Masih Bertahan di Atas 5%

Josua memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertahan di atas 5% pada tahun ini. Namun, peluang percepatan ekonomi menjadi semakin terbatas apabila tekanan dari rupiah yang lemah, harga minyak yang tinggi, dan biaya pembiayaan yang meningkat terus berlanjut.

“Dalam skenario dasar, pertumbuhan Indonesia masih berkisar 5,0% hingga 5,2%, tetapi akan sulit mendekati target optimistis jika rupiah, minyak, dan biaya pembiayaan tetap tinggi,” tandasnya.

Aliansi Ekonom Ragukan Angka Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026

Minggu, 24 Mei 2026 07:12 WIB

Reporter: Avanty Nurdiana, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/aliansi-ekonom-ragukan-angka-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-i-2026>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliansi Ekonom Indonesia mempertanyakan kredibilitas angka pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2026 di 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi angka tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19.

Namun kajian terbaru Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI), Momamad Ikhsan dan Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky mengidentifikasi adanya inkonsistensi internal di dalam data BPS itu sendiri, yakni kontraksi sektor listrik sebesar -0,99% seiring dengan sektor manufaktur yang tumbuh sebesar +5,04%. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai integritas pengukuran.

Apabila inkonsistensi tersebut dikoreksi, maka menurut perkiraan para Aliansi Ekonom Indonesia, pertumbuhan yang wajar berkisar pada 4,4%-5,2%.

Riefky menambahkan, selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Selain itu, terus menurunnya kelas menengah, daya beli secara umum, dan stagnannya produktivitas sektoral masih menjadi masalah ekonomi yang belum terselesaikan.

"Salah mengartikan angka PDB dapat berisiko merumuskan kebijakan yang salah dan justru menunda reformasi yang sangat diperlukan," pendapat Riefky dalam diskusi terbuka Aliansi Ekonom Indonesia.

Senior Researcher LPEM UI Vid Adrison juga mengingatkan angka belanja kuartal I-2026 yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan kesehatan APBN secara keseluruhan. Menurut dia, front-loading belanja di kuartal I-2026 memberi ilusi kesehatan fiskal.

"Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada kuartal II hingga kuartal IV di tahun 2026, yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita", ungkap Vid Adrison.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berlapis. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, ruang fiskal APBN yang menyempit, tantangan pertumbuhan ekonomi kuartal II-kuartal IV 2026, transmisi konflik Iran-AS terhadap harga minyak global, hingga implikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS yang ditandatangani 19 Februari 2026.

Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan menambahkan pelemahan rupiah menjadi sinyal yang lebih dalam dari sekadar volatilitas nilai tukar. "Pelemahan rupiah bukan sekadar isu teknis, ia adalah cermin dari struktur pendanaan yang terlalu bergantung terhadap portfolio luar negeri dan arus modal yang tidak percaya pada arah kebijakan.

"Kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan burden sharing yang menggerus kepercayaan investor, hanya berperan sebagai parasetamol dalam meredakan pelemahan nilai tukar. Pemulihan total bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan," kata Dwi Wulan.

Pada hal menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, kepastian menjadi kunci penting dalam menavigasi ketidakpastian dan tantangan perekonomian saat ini. "Di era yang penuh

ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian, termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust”, ucap Wijayanto dalam rilis Sabtu (23/5/2026).

Ekonom: Transmisi Kenaikan BI Rate ke Bunga Kredit Butuh Waktu 3–6 Bulan

Minggu, 24 Mei 2026 21:18 WIB

Reporter: Selvi Mayasari, Editor: Handoyo

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ekonom-transmisi-kenaikan-bi-rate-ke-bunga-kredit-butuh-waktu-36-bulan>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah ekonom memperkirakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% belum akan langsung ditransmisikan penuh ke bunga kredit perbankan.

Di tengah permintaan kredit yang masih lemah dan daya beli masyarakat yang belum pulih, bank diperkirakan lebih memilih menaikkan bunga kredit secara bertahap demi menjaga pertumbuhan kredit dan kualitas aset tetap sehat.

Berdasarkan data Bank Indonesia, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah justru masih turun menjadi 8,73% pada April 2026, dibandingkan 8,76% pada Maret 2026. Penurunan tersebut ditopang oleh turunnya suku bunga kredit baru menjadi 8,95%.

Kelompok bank BUMN menjadi penopang utama penurunan bunga kredit baru. Suku bunga kredit baru bank BUMN tercatat turun menjadi 7,31% pada April 2026 dari sebelumnya 7,84% pada Maret 2026. Kondisi itu ditopang tambahan likuiditas Rp 100 triliun kepada Himbara pada Maret 2026.

Sebaliknya, kelompok BPD, BUSN, dan KCBA justru mencatat kenaikan suku bunga kredit baru masing-masing menjadi 9,54%, 10,94%, dan 8,35%.

Adapun kredit perbankan pada April 2026 tumbuh 9,98% secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Maret 2026 sebesar 9,49% yoy. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan tersebut ditopang kredit investasi yang tumbuh 19,48% yoy, kredit modal kerja 6,04% yoy, dan kredit konsumsi 6,13% yoy.

Meski demikian, ekonom menilai transmisi kenaikan BI Rate ke bunga kredit tidak akan berlangsung instan.

Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan, transmisi dari BI Rate ke bunga kredit perbankan umumnya memerlukan waktu sekitar tiga hingga enam bulan atau setara satu hingga dua kuartal.

“Transmisi dari BI Rate ke suku bunga kredit tidak terjadi seketika dan hampir tidak pernah tersalurkan secara penuh. Prosesnya bersifat gradual dan asimetris,” ujar Myrdal kepada Kontan.co.id, Minggu (24/5).

Menurut dia, kenaikan BI Rate sebesar 50 bps biasanya hanya akan diteruskan ke bunga kredit sekitar 25 bps hingga 35 bps dalam jangka panjang.

Myrdal menjelaskan, bank cenderung berhati-hati dalam merevisi suku bunga dasar kredit (SBDK) guna menghindari payment shock terhadap debitur existing yang berpotensi meningkatkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

“Suku bunga simpanan biasanya merespons lebih cepat dalam satu sampai tiga bulan, baru kemudian diikuti penyesuaian bunga kredit,” katanya.

Ia menambahkan, keputusan bank menaikkan bunga kredit sangat dipengaruhi biaya dana atau cost of fund, biaya operasional, margin keuntungan, hingga premi risiko debitur.

Dalam kondisi likuiditas mengetat, persaingan dana pihak ketiga (DPK) antarbank justru menjadi pendorong kenaikan bunga deposito yang akhirnya ikut mengerek bunga kredit.

Namun, menurut dia, bank-bank besar dengan basis dana murah atau current account saving account (CASA) yang kuat masih memiliki ruang untuk menahan kenaikan bunga kredit demi menjaga pangsa pasar.

“Bank besar kadang rela memangkas margin sementara waktu agar tetap kompetitif, terutama untuk debitur korporasi prime,” ujarnya.

Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual juga menilai transmisi BI Rate ke bunga kredit biasanya memerlukan waktu sekitar enam bulan dan dilakukan bertahap.

“Dalam periode sebelumnya, kenaikan bunga kredit juga tidak sama besar dengan kenaikan BI Rate karena faktor persaingan antarbank cukup ketat,” kata David.

Menurut David, lemahnya permintaan kredit saat ini lebih dipengaruhi kondisi permintaan domestik yang belum pulih dibanding sekadar faktor bunga tinggi.

Hal itu tercermin dari besarnya angka undisbursed loan atau kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik debitur yang masih mencapai sekitar Rp 2.500 triliun atau setara 23% dari total kredit perbankan.

“Artinya dunia usaha sebenarnya sudah memiliki plafon kredit, tetapi belum berani ekspansi karena permintaan pasar masih lemah,” ujarnya.

Senada, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan kenaikan BI Rate 50 bps tidak akan otomatis diteruskan penuh ke bunga kredit perbankan.

Menurut Josua, transmisi biasanya dimulai dari bunga dana lebih dulu dalam satu hingga tiga bulan, terutama deposito besar dan tenor pendek-menengah, baru kemudian masuk ke bunga kredit dalam tiga hingga enam bulan berikutnya.

“Untuk kredit lama yang berbunga tetap, dampaknya bisa lebih lambat karena menunggu masa penyesuaian kontrak. Sedangkan kredit baru dan kredit berbunga mengambang akan lebih cepat terdampak,” ujar Josua.

Ia menilai tren penurunan bunga kredit yang sebelumnya terjadi kemungkinan besar akan tertahan, terutama bila bunga deposito mulai naik dan biaya dana bank meningkat.

Meski begitu, Josua menilai persaingan likuiditas antarbank masih dapat menahan kenaikan bunga kredit, terutama pada bank-bank besar yang memiliki struktur dana murah kuat dan likuiditas memadai.

“Jika dana murah masih kuat, bank masih memiliki ruang untuk menyerap sebagian kenaikan biaya dana,” katanya.

Josua menambahkan, prospek pertumbuhan kredit ke depan masih positif, namun cenderung lebih lambat dan selektif. Menurut dia, pelemahan permintaan kredit saat ini lebih dipengaruhi kombinasi antara bunga yang lebih tinggi dan permintaan domestik yang belum sepenuhnya pulih.

Namun, faktor kehati-hatian dunia usaha dan lemahnya permintaan domestik dinilai lebih dominan.

“Bank dan debitur sebenarnya sudah sama-sama menahan diri bahkan sebelum BI Rate naik,” ujarnya.

Ia menilai segmen kredit yang paling rentan melambat adalah kredit konsumsi berbasis cicilan seperti KPR non-subsidi, kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna, kartu kredit, dan pinjaman tanpa agunan.

“KPR sangat sensitif karena tenor panjang membuat kenaikan bunga kecil saja terasa pada cicilan bulanan,” katanya.

Josua juga mengingatkan sektor UMKM, perdagangan, konstruksi, properti, dan industri padat modal berpotensi lebih rentan terdampak kenaikan bunga karena sangat bergantung pada pembiayaan jangka panjang dan kondisi daya beli masyarakat.

Kenaikan BI Rate Jadi Pedang Bermata Dua bagi Perbankan

Minggu, 24 Mei 2026 18:51 WIB

Reporter: Lydia Tesaloni, Editor: Yudho Winarto

<https://keuangan.kontan.co.id/news/kenaikan-bi-rate-jadi-pedang-bermata-dua-bagi-perbankan>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) mulai memunculkan tantangan baru bagi industri perbankan nasional.

Di satu sisi, kenaikan bunga membuka peluang peningkatan imbal hasil kredit, namun di sisi lain biaya dana atau cost of fund (CoF) juga ikut naik dan berpotensi menekan margin bunga bersih (net interest margin/NIM).

Seperti diketahui, BI memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% pada April 2026.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global.

NIM Diprediksi Melandai

Ekonom Universitas Airlangga Rahma Gafmi memperkirakan, kenaikan BI Rate akan membuat NIM perbankan mengalami tekanan moderat hingga koreksi tipis dibandingkan tahun lalu.

Menurutnya, bunga deposito biasanya menyesuaikan lebih cepat dibandingkan bunga kredit ketika suku bunga acuan naik.

“Kemungkinan koreksi NIM sekitar 10 bps hingga 30 bps dibandingkan posisi tahun lalu,” ujar Rahma kepada Kontan.co.id, Minggu (24/5/2026).

Rahma menilai bank-bank milik negara atau Himbara cenderung menjaga NIM di level konservatif lantaran masih memiliki portofolio kredit program pemerintah dengan bunga yang ditetapkan khusus.

Sementara itu, bank swasta besar dinilai relatif lebih tahan terhadap tekanan karena memiliki basis dana murah atau CASA yang kuat.

Risiko Likuiditas Mengintai

Selain tekanan terhadap margin, perbankan juga diperkirakan menghadapi pengetatan likuiditas pada kuartal III-2026.

Hal itu berkaitan dengan pengembalian dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah oleh bank-bank Himbara.

Kondisi tersebut diperkirakan memicu persaingan penghimpunan dana yang lebih ketat, sehingga bank harus menawarkan bunga deposito lebih tinggi untuk menjaga dana pihak ketiga tetap bertahan.

Di sisi lain, kemampuan bank menaikkan bunga kredit tidak sepenuhnya fleksibel. Khususnya pada pembiayaan infrastruktur dan kredit program pemerintah yang tidak mudah di-repricing.

Akibatnya, selisih antara bunga kredit dan biaya dana berpotensi semakin menyempit.

Strategi Menjaga Margin

Rahma menyebut perbankan masih memiliki sejumlah opsi untuk menjaga profitabilitas.

Salah satunya dengan mengalihkan penempatan likuiditas ke sektor kredit yang memiliki imbal hasil lebih tinggi seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit UMKM.

Selain itu, bank juga dapat melakukan penyesuaian bunga pada kredit korporasi non-penugasan melalui skema floating rate adjustment.

“Bank masih punya ruang untuk melakukan repricing pada debitur korporasi besar guna menjaga margin,” jelasnya.

BCA: Tetap Perhatikan Daya Beli Masyarakat

Dari sisi industri, Corporate Secretary PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA Hera F. Haryn mengatakan, pihaknya mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan suku bunga.

Selain BI Rate, BCA juga memperhatikan kondisi likuiditas pasar, risiko kredit, hingga faktor permintaan dan penawaran.

“Pada dasarnya kenaikan BI-rate merupakan langkah strategis BI dalam merespons dinamika ekonomi global serta pergerakan nilai tukar rupiah,” ujar Hera kepada Kontan.

Ia memastikan BCA akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat suku bunga dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.

CIMB Niaga Hitung Ulang Target NIM

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) atau CIMB Niaga Lani Darmawan mengakui risiko penurunan NIM sulit dihindari setelah kenaikan BI Rate.

Menurutnya, kenaikan biaya dana belum sejalan dengan pertumbuhan permintaan kredit yang masih relatif lemah.

“Sedang kami hitung ulang,” ujar Lani terkait target NIM perseroan.

Untuk menjaga profitabilitas, CIMB Niaga akan memperkuat penghimpunan dana murah dan meningkatkan kontribusi pendapatan berbasis komisi atau fee based income, terutama dari bisnis wealth management.

BTN Nilai Dampak Belum Langsung Terasa Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN Nixon Napitupulu menilai, dampak kenaikan BI Rate terhadap biaya pendanaan bank tidak terjadi secara instan.

“Akan sesuai jatuh temponya deposito,” kata Nixon.

Menurutnya, transmisi kenaikan suku bunga acuan ke industri perbankan umumnya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan.

Sementara transmisi ke bunga kredit cenderung lebih lambat, terutama karena portofolio BTN didominasi KPR dengan skema bunga tetap (fixed rate).

BTN sendiri sebelumnya telah memasukkan asumsi kenaikan bunga sebesar 25 bps dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Karena itu, meski BI Rate naik 50 bps, perseroan memperkirakan dampak efektif hingga akhir tahun masih sesuai dengan proyeksi internal perusahaan.

Kredit UMKM Tumbuh Tipis 0,2% di April 2026, Kredit Mikro Jadi Penopang

Minggu, 24 Mei 2026 10:11 WIB

Reporter: Lydia Tesaloni, Editor: Avanty Nurdiana

<https://keuangan.kontan.co.id/news/kredit-umkm-tumbuh-tipis-02-di-april-2026-kredit-mikro-jadi-penopang>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kredit di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhasil tumbuh pada awal kuartal II-2026. Hanya saja, pertumbuhannya sangat terbatas, sejumlah segmen bahkan masih mencatatkan koreksi.

Menurut data sementara Bank Indonesia (BI), kredit UMKM per April 2026 tumbuh tipis 0,2% secara tahunan menjadi Rp 1.501,7 triliun. Kendati begitu, capaian ini menunjukkan progres dari pertumbuhan 0,1% secara year on year (yoy) pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan skala usahanya, kredit di segmen usaha mikro relatif mampu bertahan dengan catatan pertumbuhan 0,7% yoy menjadi Rp 658,2 triliun, melanjutkan pertumbuhan 0,2% yoy pada bulan sebelumnya.

Bernasib lain, kredit di segmen usaha kecil dan menengah terpantau masih koreksi. Yang mana, kredit di segmen usaha kecil terkoreksi 0,2% yoy menjadi Rp 506,5 triliun, lanjut koreksi 0,5% yoy pada bulan sebelumnya.

Sementara koreksi pada kredit di segmen usaha menengah tercatat sebesar 0,4% yoy menjadi Rp 337 triliun. Padahal, pada bulan sebelumnya kredit di segmen usaha ini berhasil tumbuh 0,9% yoy.

Berdasarkan jenisnya, kredit investasi UMKM berhasil tetap tumbuh menjadi 10,1% yoy dengan total nilai Rp 496,5 triliun, dari bulan sebelumnya tumbuh 9,7% yoy.

Sementara kredit modal kerja UMKM masih terkoreksi hingga 4,1% yoy menjadi Rp 1.005,2 triliun, koreksi 4% yoy pada bulan sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mematok target pertumbuhan kredit UMKM di rentang 7%–9%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, pihaknya masih optimistis kredit UMKM bakal tumbuh positif hingga akhir tahun.

Saat ini, kata Dian, pertumbuhan kredit UMKM yang sangat terbatas dipengaruhi oleh sikap selektif perbankan sebagai salah satu langkah manajemen risiko di tengah dinamika ekonomi yang ada.

Ia menjelaskan, pola konsumsi masyarakat kini berubah karena ada tekanan daya beli, utamanya di kelas menengah ke bawah. Itu disebut berdampak langsung pada omzet dan perputaran kas pelaku UMKM, dan pada gilirannya memengaruhi kapasitas pembayaran di tengah proses pemulihan sektor UMKM pasca pandemi yang relatif lebih lambat.

“Beberapa bank mulai menggeser fokusnya dari sekadar mengejar volume penyaluran yang tinggi menjadi ke arah kredit produktif yang berbasis pada peningkatan kapasitas dan ketahanan usaha,” jelas Dian dalam jawaban tertulis belum lama ini.

Pelemahan Rupiah Mulai Tekan Industri Pengolahan, Waspada Berefek ke Ekonomi RI

Minggu, 24 Mei 2026 21:02 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Yudho Winarto

<https://nasional.kontan.co.id/news/pelemahan-rupiah-mulai-tekan-industri-pengolahan-waspada-berefek-ke-ekonomi-ri>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah mulai memberi tekanan terhadap sektor manufaktur nasional.

Pasalnya, industri pengolahan di Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku dan barang modal impor.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE Indonesia) Yusuf Rendy Manilet menyebut, pelemahan rupiah yang berlangsung cukup panjang menjadi perhatian serius karena sektor manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Berdasarkan data Bloomberg, indeks dolar AS (DXY) berada di level 99,23 pada Jumat (22/5/2026). Sementara itu, rupiah di pasar spot melemah ke posisi Rp 17.717 per dolar AS.

“Ketika industri pengolahan mulai tertekan, dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (24/5).

Yusuf mencatat, secara tahunan rupiah telah melemah sekitar 9%, sedangkan secara year to date (YtD) depresiasinya mendekati 6%.

Menurut dia, tekanan terhadap sektor manufaktur sebenarnya sudah mulai terlihat dari sejumlah indikator ekonomi.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat 5,61% secara tahunan (year on year/YoY), Yusuf menilai capaian tersebut perlu dicermati lebih dalam.

Ia menilai pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang oleh faktor basis pembandingan yang rendah pada tahun sebelumnya, momentum Ramadan, serta percepatan belanja pemerintah.

“Kalau dilihat secara kuartalan, ekonomi justru mengalami kontraksi sekitar 0,77%,” katanya.

Selain itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global juga turun ke level 49,1 pada April 2026 atau sudah berada di zona kontraksi.

Yusuf menilai kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap sektor riil sebenarnya sudah muncul bahkan sebelum rupiah melemah lebih dalam.

“Persoalannya bukan semata-mata kurs yang melemah, melainkan kurs memperberat tekanan yang memang sudah lebih dulu muncul di sektor riil,” jelasnya.

Yusuf memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih dapat berada di sekitar 5% YoY.

Namun, akan sulit bergerak lebih tinggi apabila tekanan kurs dan biaya energi belum mereda.

Ia menjelaskan, masalah utama manufaktur Indonesia terletak pada tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal.

Ketika rupiah melemah, biaya produksi otomatis meningkat dalam denominasi rupiah meskipun volume impor tidak berubah.

Menurut Yusuf, dampak paling cepat biasanya terlihat pada keputusan investasi. Pelaku usaha cenderung menunda ekspansi ketika pergerakan nilai tukar terlalu fluktuatif karena sebagian besar belanja modal, termasuk pembelian mesin dan pembangunan fasilitas baru, masih berbasis dolar AS.

“Yang perlu diperhatikan justru keputusan investasi baru beberapa bulan ke depan. Di situlah efek pelemahan biasanya mulai terlihat lebih nyata,” ujarnya.

Meski investasi manufaktur pada kuartal I-2026 masih tercatat besar, yakni sekitar Rp 418 triliun, Yusuf menilai angka tersebut lebih mencerminkan kelanjutan proyek lama yang sudah berjalan sebelum tekanan kurs meningkat.

Selain investasi, Yusuf juga mengingatkan dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi. Menurut dia, kenaikan biaya impor biasanya akan diteruskan ke harga jual dalam dua hingga tiga kuartal berikutnya.

Namun, di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, produsen menghadapi dilema antara menaikkan harga atau mempertahankan margin keuntungan.

“Jika harga dinaikkan, risiko kehilangan permintaan pasar akan membesar. Tetapi jika harga ditahan, margin keuntungan akan semakin tertekan,” katanya.

Di tengah tekanan tersebut, Bank Indonesia juga telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% guna menjaga stabilitas rupiah.

Menurut Yusuf, langkah tersebut memang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Namun di sisi lain, kebijakan itu membuat biaya kredit menjadi lebih mahal bagi dunia usaha.

“Jadi industri menghadapi tekanan ganda secara bersamaan. Di satu sisi biaya impor meningkat karena pelemahan kurs, sementara di sisi lain biaya pembiayaan juga menjadi lebih mahal akibat kenaikan suku bunga,” tandasnya.

Rupiah Tak Stabil Bikin Investor Asing Tahan Ekspansi ke Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 06:15 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/rupiah-tak-stabil-bikin-investor-asing-tahan-ekspansi-ke-indonesia>

KONTAN.CO.ID - MAKASSAR. Pelemahan rupiah yang disertai volatilitas tinggi berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia karena investor cenderung menahan ekspansi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan.

Menurut Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede, stabilitas nilai tukar menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan investasi, khususnya bagi investor asing yang sensitif terhadap risiko nilai tukar dan arus modal.

“Kalau kondisi rupiah tidak stabil, pertanyaannya apakah investasi akan berjalan? Semuanya akan wait and see, khususnya investasi asing,” ujar Josua dalam paparannya di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Ia menegaskan, upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah bukan berarti bertentangan dengan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, stabilitas nilai tukar justru diperlukan agar dunia usaha memiliki kepastian dalam melakukan ekspansi dan investasi jangka panjang.

Josua mengatakan, sikap wait and see pelaku usaha saat ini mulai terlihat dari masih tingginya posisi undisbursed loan atau kredit menganggur, yang telah disetujui bank tetapi belum dicairkan oleh debitur.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pelaku usaha masih menahan rencana ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

“Perbankan sudah menyetujui kredit, tetapi debiturnya belum menggunakan. Artinya pelaku usaha masih ragu untuk ekspansi, tambah pabrik, atau beli mesin,” katanya.

Bank Indonesia mencatat rasio undisbursed loan atau kredit yang belum ditarik terhadap plafon kredit masih relatif tinggi di sejumlah sektor. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang penyaluran kredit yang belum dimanfaatkan optimal oleh dunia usaha.

BI mencatat beberapa sektor dengan rasio undisbursed loan lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis periode 2021–2025, antara lain sektor pertanian, jasa dunia usaha, konstruksi, dan pengangkutan. Secara umum, rasio undisbursed loan juga masih berada di atas 20% dari total plafon kredit.

Josua menegaskan, tingginya undisbursed loan bukan disebabkan perbankan menahan likuiditas. Menurut dia, likuiditas perbankan saat ini masih relatif longgar, namun permintaan kredit belum sepenuhnya pulih akibat tingginya risiko dan ketidakpastian usaha.

Di sisi lain, Josua menilai kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia merupakan langkah pre-emptive untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus menjangkar ekspektasi inflasi.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk membatasi dampak imported inflation akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga global di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

“Ini langkah pre-emptive untuk membatasi dampak import inflation dan menjangkar ekspektasi inflasi,” ujarnya.

Josua memperkirakan tekanan terhadap rupiah akibat kebutuhan musiman dolar AS, seperti pembayaran dividen dan musim haji, berpotensi mulai mereda pada kuartal III-2026.

Meski demikian, ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah masih menjadi faktor risiko yang membayangi stabilitas pasar keuangan domestik dan arus investasi asing ke Indonesia.

Gubernur Jateng sebut budidaya udang memiliki prospek bagus bagi pertumbuhan ekonomi

Minggu, 24 Mei 2026 06:53 WIB

<https://jateng.antaraneWS.com/berita/632955/gubernur-jateng-sebut-budidaya-udang-memiliki-prospek-bagus-bagi-pertumbuhan-ekonomi?>

Kebumen (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan sektor budidaya udang di Kebumen memiliki prospek yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

"Budidaya udang memiliki prospek yang bagus," katanya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto panen raya udang di tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Petanahan, Kabupaten Kebumen, Sabtu.

Panen raya ini dilakukan di kawasan budidaya udang modern seluas 100 hektare yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sebagai model budidaya udang berbasis kawasan dan berkelanjutan.

Ia mengatakan sektor budidaya udang di Kebumen memiliki prospek yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

"Ini prospek bagus. Lahan 100 hektare ini akan menambah lapangan pekerjaan baru di wilayah Kebumen, di samping pendapatan daerah tentunya. Dan secara nasional ini prospek yang bagus sekali," katanya.

Menurut dia, keberadaan BUBK Kebumen menjadi bagian dari implementasi dan strategi ekonomi biru yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Pengembangan BUBK Kebumen juga sekaligus untuk mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Data Pemerintah Provinsi mencatat produksi udang vaname Jawa Tengah pada 2025 mencapai 26.313 ton. Dari jumlah itu, Kebumen menjadi salah satu sentra produksi utama sebesar 1.850 ton. Sementara ekspor udang Jawa Tengah pada triwulan I 2026 mencapai 1.300 ton senilai Rp178,8 miliar.

Presiden Prabowo mengapresiasi produktivitas tambak udang di Kebumen yang dinilai telah mencapai standar dunia.

"Tadi saya diberi laporan satu hektare bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa. Harganya juga sangat bagus, Rp70 ribu per kilogram," kata Presiden.

Presiden menyebut pemerintah akan terus memperluas pembangunan kawasan budidaya perikanan produktif di berbagai daerah, di antaranya Waingapu, Gorontalo, dan Pantai Utara Jawa Barat.

"Yang harus kita dukung adalah proyek-proyek yang produktif, yang menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah untuk rakyat," katanya.

Kawasan BUBK Kebumen saat ini disebut telah menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal dan menjadi salah satu proyek strategis nasional di sektor perikanan budidaya.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tawari Investor Tiongkok Proyek Energi Hijau dan Sampah

Minggu, 24 Mei 2026 12:45 WIB

Cun Cahya, Suara Merdeka

<https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0417165931/gubernur-jateng-ahmad-luthfi-tawari-investor-tiongkok-proyek-energi-hijau-dan-sampah>

JAKARTA, suaramerdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menawarkan peluang investasi besar di sektor energi baru terbarukan (EBT) hingga pengolahan sampah menjadi energi listrik di Jawa Tengah ke puluhan penguasa asal Tiongkok.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Pertukaran Tokoh Politik dan Bisnis Tiongkok-Indonesia dalam rangka Program DBA Entrepreneur Scholar Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) Angkatan 12 di Grand Hyatt, Jakarta, Jumat 22 Mei 2026.

Forum ini dihadiri sejumlah investor dan pimpinan perusahaan besar asal Tiongkok yang telah menanamkan modal di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menegaskan Jawa Tengah terus membuka diri terhadap investasi global. Menurutnya, posisi geografis, kesiapan kawasan industri, dan pertumbuhan ekonomi menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Tiongkok dan seluruh negara kami undang ke Provinsi Jawa Tengah karena dari segi geologi, strategi, dan tipologi menjadi hub ekonomi,” kata Luthfi.

Ia memaparkan, realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp 110,02 triliun. Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 50,86 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 37,64 triliun, serta UMKM Rp 21,52 triliun.

Sementara pada triwulan I 2026, investasi di Jawa Tengah telah menembus Rp 23,02 triliun dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,89 persen.

Menurut Luthfi, saat ini Jawa Tengah memiliki tujuh kawasan industri dan ekonomi khusus yang telah berjalan. Selain itu, sebanyak 12 daerah tengah menyiapkan kawasan industri dan ekonomi khusus baru untuk mendukung pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Tiongkok menjadi salah satu negara asal investasi tertinggi di Jawa Tengah, nilainya mencapai sekitar Rp 10,13 triliun,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi juga menawarkan sedikitnya tujuh proyek energi baru terbarukan yang siap dikerjasamakan dengan investor. Proyek itu meliputi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), mikrohidro, biogas, biomassa, gas rawa, waste to energy, hingga panas bumi atau geothermal.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius mengembangkan energi ramah lingkungan sekaligus menyelesaikan persoalan sampah melalui investasi teknologi pengolahan modern.

“Kami membuka peluang lebar-lebar bagi investasi pengolahan sampah di Jawa Tengah sehingga akan membantu kami dalam rangka energi terbarukan,” katanya.

Sementara itu, CEO PT WOOK Global Technology, Cu Longhua, mengatakan, forum tersebut mempertemukan banyak pengusaha lintas sektor dengan potensi kerja sama yang besar antara Indonesia dan Tiongkok.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang hadir memiliki keunggulan di bidang perlindungan lingkungan, pengolahan limbah padat, energi baru, teknologi digital, manufaktur berteknologi tinggi, hingga pertanian modern.

“Saat ini Presiden Prabowo sangat serius mendorong pengelolaan sampah menjadi pembangkit listrik. Kami adalah perusahaan terkemuka di industri ini di Tiongkok,” ujarnya.

Hal senada disampaikan CEO AAC Technologies Holdings, Benjamin Pan. Ia menilai Indonesia, khususnya Jawa Tengah, memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan industri dan manufaktur di Asia Tenggara.

Menurut Benjamin, pengusaha Tiongkok siap membawa teknologi, modal, dan sumber daya industri untuk dikolaborasikan dengan potensi pasar Indonesia.

“Kami melihat kemungkinan kolaborasi yang tak terbatas. Kami ingin bersama-sama mendukung pembangunan industri berkualitas tinggi di Indonesia,” katanya.

Resmi Dibuka, 23 Semarang Shopping Center Diyakini Dongkrak Prospek Ekonomi dan Gaya Hidup Kota Semarang

Minggu, 24 Mei 2026 16:19 WIB

Mokhammad Zaenal Arifin, Konten Jateng

<https://www.kontenjatang.com/ekonomi/6517166649/resmi-dibuka-23-semarang-shopping-center-diyakini-dongkrak-prospek-ekonomi-dan-gaya-hidup-kota-semarang>

KONTENJATENG.COM, SEMARANG - 23 Semarang Shopping Center resmi beroperasi dan dibuka untuk umum dengan ditandai soft opening yang digelar Sabtu (23/5/2026).

Kehadiran mall yang diprakarsai Paradise Indonesia itu diproyeksikan membuka prospek besar bagi perkembangan ekonomi, investasi, dan gaya hidup urban di Kota Semarang.

Pusat lifestyle dan retail terbaru yang berdiri di kawasan strategis Pearl of Java (POJ) tersebut digadang-gadang menjadi landmark baru sekaligus pusat gravitasi aktivitas masyarakat urban di Jawa Tengah.

Dengan konsep mixed-use lifestyle retail destination seluas lebih dari 65.000 meter persegi, 23 Semarang Shopping Center hadir bukan sekadar pusat belanja, melainkan kawasan modern yang mengintegrasikan retail, hiburan keluarga, ruang komunitas kreatif, kuliner, hingga area publik kolaboratif.

Kehadiran proyek ini dinilai sejalan dengan transformasi Kota Semarang yang terus tumbuh sebagai metropolitan dengan perkembangan ekonomi progresif di Indonesia.

Berdasarkan data BPS Kota Semarang, pertumbuhan ekonomi kota mencapai 6,49 persen pada 2025. Pertumbuhan tersebut ditopang sektor perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, serta investasi kawasan urban yang terus meningkat.

Director & CFO PARADISE INDONESIA, Surina mengatakan Semarang dipilih karena memiliki prospek ekonomi dan perkembangan urban yang sangat menjanjikan.

“Kami memilih Semarang sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi, transformasi urban, dan potensi market paling menjanjikan di Indonesia saat ini,” ujarnya.

Menurutnya, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap destinasi gaya hidup modern menjadi alasan utama perusahaan memperluas ekspansi portofolio melalui 23 Semarang Shopping Center.

Tak hanya menghadirkan pusat lifestyle baru, proyek ini juga diproyeksikan memberi multiplier effect bagi Kota Semarang dan Jawa Tengah.

Dampaknya antara lain pembukaan ribuan lapangan kerja baru, penguatan sektor perdagangan dan jasa, peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan Semarang Barat, hingga dukungan terhadap pertumbuhan UMKM lokal.

Selain itu, keberadaan 23 Semarang diharapkan memperkuat daya tarik investasi Kota Semarang sebagai pusat ekonomi dan destinasi lifestyle baru di Jawa Tengah.

Didorong AI, Ekonomi Singapura Tumbuh pada Q1-2026

Senin, 25 Mei 2026 08:20 WIB

Claire Jiao

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109930/didorong-ai-ekonomi-singapura-tumbuh-pada-q1-2026>

Bloomberg, Perekonomian Singapura tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal pertama tahun ini. Lonjakan industri kecerdasan buatan (AI) global berhasil mendongkrak sektor manufaktur dan jasa negara tersebut, sekaligus meredam dampak negatif dari kenaikan harga minyak mentah dunia.

Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) Singapura pada hari Senin (25/5) melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 1% secara kuartalan yang disesuaikan secara musiman pada periode Januari-Maret dibanding kuartal sebelumnya. Angka tersebut jauh di atas estimasi awal pemerintah yang memperkirakan kontraksi sebesar 0,3%, serta melampaui median proyeksi pertumbuhan 0,2% dari survei Bloomberg.

Keterlibatan Singapura dalam rantai pasok AI melalui ekspor produk elektronik terbukti mampu melindungi negara tersebut dari ancaman kenaikan tarif dagang AS tahun lalu, serta krisis energi yang saat ini dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Negara-negara di Asia yang menjadi bagian dari rantai pasok AI, khususnya Taiwan dan Korea Selatan, menjadi sedikit dari yang beruntung. Perekonomian mereka melonjak berkat permintaan yang tinggi terhadap produk ekspor dan layanan teknologi mereka.

Di tengah capaian data yang lebih kuat dari perkiraan ini, MTI tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan PDB tahun 2026 di kisaran 2% hingga 4%, sejalan dengan pandangan yang dirilis pada Februari lalu. Target tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 5%.

"Belanja modal global yang berkelanjutan di bidang AI diperkirakan akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan bagi kluster elektronik dan teknik presisi di dalam sektor manufaktur," tulis pihak kementerian dalam pernyataan resminya.

Meski demikian, MTI juga menandai sejumlah risiko potensial, seperti gangguan berkelanjutan pada pasokan energi global, eskalasi baru dari kenaikan tarif dagang AS, serta penurunan mendadak pada belanja modal terkait AI secara global.

"Risiko penurunan terhadap prospek ekonomi Singapura telah meningkat secara signifikan. MTI akan terus memantau perkembangan ini dengan cermat dan menyesuaikan proyeksi pertumbuhan PDB sepanjang tahun ini jika diperlukan," tambah kementerian tersebut.

Ketahanan ekonomi Singapura sejauh ini telah memicu kuatnya permintaan terhadap aset aman (safe haven). Kondisi ini turut memperkuat mata uang Dolar Singapura dan mendorong bursa saham setempat mencetak rekor tertinggi. Selain itu, angka penjualan rumah pada bulan lalu juga berhasil menyentuh level tertinggi dalam enam bulan terakhir.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year), pertumbuhan ekonomi kuartal pertama Singapura berada di angka 6%. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan survei Bloomberg sebesar 5,2% dan estimasi awal bulan lalu yang berada di level 4,6%.

Di sisi lain, indikator inflasi inti Singapura pada bulan Maret merangkak naik ke level 1,7%, namun masih di bawah level 2% yang selama ini dinilai aman oleh bank sentral untuk jangka menengah.

Sementara itu, data inflasi inti untuk bulan April yang dijadwalkan rilis pada pukul 13.00 waktu setempat dipatok di angka 1,8% berdasarkan survei Bloomberg. Otoritas Moneter Singapura (MAS) sendiri pada bulan lalu telah mengambil langkah memperketat kebijakan moneter mereka, menjadikannya sebagai bank sentral pertama di Asia yang mengambil tindakan tersebut.

Warsh Pimpin The Fed, Investor Bertaruh Suku Bunga akan Naik

Senin, 25 Mei 2026 07:20 WIB

Ye Xie

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109927/warsh-pimpin-the-fed-investor-bertaruh-suku-bunga-akan-naik/2>

Bloomberg, Seiring langkah Kevin Warsh yang resmi mengambil alih kepemimpinan di Federal Reserve (The Fed), para investor obligasi bertaruh bahwa ia akan lebih memprioritaskan kredibilitas bank sentral dalam memerangi inflasi, ketimbang mengikuti desakan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan suku bunga.

Di tengah situasi perang Iran yang memicu lonjakan inflasi terbesar sejak tahun 2023, para pelaku pasar kini memproyeksikan bahwa The Fed hampir dipastikan akan mulai menaikkan suku bunga pada bulan Desember mendatang. Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi tiga bulan lalu, ketika pasar masih bertaruh akan adanya pemangkasan suku bunga yang lebih dalam.

Pergeseran sentimen ini mencerminkan dampak nyata dari gejolak di Timur Tengah, ketahanan ekonomi AS, serta tren lonjakan investasi di sektor kecerdasan buatan (AI) yang terus mendorong bursa saham menguat. Seluruh faktor tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa inflasi dapat tertahan di atas target 2% yang ditetapkan The Fed untuk waktu yang cukup lama.

Dalam sepekan perdagangan yang bergejolak, imbal hasil (yield) obligasi AS (Treasury) tenor dua tahun—yang paling sensitif terhadap proyeksi kebijakan The Fed—melonjak hingga 4,14% pada hari Jumat. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam lebih dari setahun terakhir dan berada hampir 40 basis poin di atas batas atas kisaran suku bunga acuan The Fed saat ini. Sementara itu, yield tenor 30 tahun sempat menyentuh level 5,2% pada pekan lalu—posisi yang terakhir kali terlihat pada tahun 2007—sebelum akhirnya turun kembali ke level 5,06%.

Warsh memegang kendali kepemimpinan saat semakin banyak pejabat The Fed mulai meninggalkan sikap pelonggaran moneter mereka. Anggota Dewan Gubernur The Fed Christopher Waller—pejabat pilihan Trump yang awal tahun ini sempat mendukung penurunan suku bunga untuk melindungi pasar tenaga kerja—menyatakan pada hari Jumat bahwa langkah The Fed berikutnya kini memiliki peluang yang sama besar, baik untuk naik maupun turun. Sejumlah pembuat kebijakan lainnya, termasuk Wakil Gubernur Philip Jefferson dan Gubernur The Fed New York John Williams, juga dijadwalkan akan memberikan pernyataan pada pekan ini.

Saat Warsh dilantik pada hari Jumat, Trump, yang berulang kali menekan The Fed untuk menurunkan biaya pinjaman, justru menyatakan bahwa dirinya ingin Warsh memimpin bank sentral tersebut secara independen.

Merespons kenaikan imbal hasil dan kalkulasi potensi kenaikan suku bunga ini, beberapa investor mulai beralih memburu obligasi AS jangka pendek. Salah satunya adalah Chitrang Purani, manajer portofolio di Capital Group.

"Saya percaya bahwa standar tolok ukur untuk menaikkan suku bunga masih cukup tinggi. The Fed di bawah kepemimpinan Warsh mungkin ingin sedikit lebih sabar sebelum mengambil langkah

berikutnya, demi memahami sepenuhnya bagaimana inflasi bertransmisi ke pasar tenaga kerja dan kondisi keuangan," ujar Purani. "Secara pribadi, saya tidak melihat fungsi reaksi The Fed terhadap data ekonomi akan berbeda secara material di bawah kendali Warsh dibandingkan dengan masa lalu."

Selain mencermati arah pernyataan para pejabat The Fed, para pelaku pasar obligasi pada pekan ini juga akan fokus memantau jalannya lelang surat utang AS (Treasury) tenor dua, lima, dan tujuh tahun untuk melihat seberapa besar tingkat permintaan dari investor.

Ekonomi Singapura Tumbuh 6% di Kuartal I-2026, Lampau Perkiraan

Senin, 25 Mei 2026 08:11 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-singapura-tumbuh-6-di-kuartal-i-2026-lampau-perkiraan>

KONTAN.CO.ID - Ekonomi Singapura tumbuh lebih tinggi dari perkiraan pada kuartal I-2026, ditopang perbaikan aktivitas domestik dan sektor eksternal.

Namun, pemerintah tetap mewaspadaai meningkatnya risiko perlambatan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian global.

Mengutip Reuters, Senin (25/5/2026), produk domestik bruto (PDB) Singapura tumbuh 6,0% secara tahunan (year on year/YoY) pada periode Januari–Maret 2026. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi awal pemerintah yang sebesar 4,6%.

Secara kuartalan (quarter to quarter/QoQ) yang telah disesuaikan secara musiman, ekonomi Singapura tumbuh 1,0%. Angka ini berbalik dari estimasi awal yang sebelumnya menunjukkan kontraksi sebesar 0,3%.

Meski pertumbuhan ekonomi awal tahun cukup kuat, Kementerian Perdagangan Singapura tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 2,0% hingga 4,0%.

Pemerintah Singapura menilai konflik di Timur Tengah telah meningkatkan risiko perlambatan ekonomi global, terutama melalui gangguan rantai pasok dan lonjakan harga energi dunia.

Sebagai negara dengan ekonomi yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, Singapura dinilai rentan terhadap volatilitas harga energi dan disrupsi perdagangan global.

Konflik geopolitik yang melibatkan Iran juga disebut telah mengubah arah ekspektasi pertumbuhan global, inflasi, hingga kebijakan suku bunga dunia.

Dari sisi inflasi, data April 2026 dijadwalkan dirilis pada Senin sore waktu setempat.

Sebelumnya, inflasi inti Singapura pada Maret 2026 tercatat naik 1,7% secara tahunan dan ekonom memperkirakan inflasi April masih berada di level serupa.

Bank sentral Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS) pada April lalu memperketat kebijakan moneter guna mengantisipasi risiko inflasi akibat perang Iran dan lonjakan harga energi.

Padahal sebelumnya, MAS mempertahankan kebijakan moneternya tetap stabil dalam tiga pertemuan terakhir pada Januari, Oktober, dan Juli, setelah sempat melonggarkan kebijakan pada April tahun lalu.

MAS juga telah menaikkan proyeksi inflasi inti dan inflasi utama Singapura untuk 2026 menjadi 1,5%–2,5%, dari sebelumnya 1,0%–2,0%.

Hadapi Efek Krisis Timur Tengah, Jepang Siapkan Anggaran Tambahan 3 Triliun Yen

Senin, 25 Mei 2026 17:28 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/hadapi-efek-krisis-timur-tengah-jepang-siapkan-anggaran-tambahan-3-triliun-yen>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pemerintah Jepang akan menyiapkan anggaran tambahan sekitar ¥ 3 triliun, atau sekitar Rp 334,70 triliun. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran ekspansi fiskal tersebut dapat semakin memperberat keuangan negara, yang saat ini sudah makin tertekan.

Reuters melaporkan, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan rencana penambahan anggaran tersebut, Senin (25/5/2026). Takaichi mengatakan anggaran tambahan akan dibiayai oleh obligasi pembiayaan defisit baru. Tapi ia juga menyebut, langkah tersebut dapat diimplementasikan tanpa memengaruhi pasar obligasi.

Pemerintah Jepang juga memastikan jadwal rencana penerbitan obligasi pemerintah tidak berubah. Takaichi menuturkan, pendapatan pajak yang lebih kuat, pendapatan non-pajak, dan perkiraan pengeluaran yang lebih rendah kemungkinan akan menutup kebutuhan sekitar ¥ 3 triliun dari defisit penerbitan obligasi yang telah dijadwalkan untuk diterbitkan hingga Juni.

Rencana Jepang menambah anggaran tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya yang menolak perlunya anggaran tambahan. Selain itu, Jepang juga memperpanjang subsidi untuk menjaga harga bensin tetap stabil. Langkah tersebut dengan cepat menghabiskan cadangan daruratnya karena harga minyak tetap tinggi.

Sebelumnya, pemerintah Jepang juga memutuskan menggunakan sekitar setengah dari cadangan daruratnya, sebesar ¥ 1 triliun, untuk mendanai subsidi yang bertujuan untuk menekan tagihan utilitas, meningkatkan kebutuhan untuk mengisi kembali cadangan di tengah risiko krisis Timur Tengah yang berkepanjangan.

Kabar pemerintah Jepang kemungkinan akan menerbitkan utang baru sebagai bagian dari pendanaan untuk anggaran tambahan tersebut membantu mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Jepang 10 tahun acuan menjadi 2,8% pekan lalu. Ini level tertinggi sejak Oktober 1996.

Impor Batubara Asia Melonjak, Harga Sentuh Level Tertinggi dalam Beberapa Tahun

Senin, 25 Mei 2026 08:55 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/impor-batubara-asia-melonjak-harga-sentuh-level-tertinggi-dalam-beberapa-tahun>

KONTAN.CO.ID - Perang Iran turut mengguncang pasar energi global, termasuk pasar batubara termal Asia.

Meski dampaknya tidak sebesar pada minyak mentah dan gas alam cair (LNG), impor serta harga batubara termal di Asia tercatat naik signifikan hingga menyentuh level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Mengutip Reuters pada Senin (25/5/2026), kenaikan harga batubara tidak hanya dipicu konflik Iran, tetapi juga melemahnya produksi domestik China dan perubahan regulasi ekspor batubara di Indonesia.

Data perusahaan analis komoditas Kpler menunjukkan impor batubara termal Asia melalui jalur laut diperkirakan mencapai 76,26 juta ton pada Mei 2026.

Angka tersebut naik 23% dibanding April dan lebih tinggi dari realisasi Mei tahun lalu sebesar 72,83 juta ton.

Kenaikan impor terjadi hampir di seluruh negara pembeli utama di Asia.

China, sebagai importir batubara terbesar dunia, diperkirakan mencatat impor batubara termal sebesar 22,63 juta ton pada Mei 2026.

Jumlah itu meningkat dibandingkan April yang sebesar 16 juta ton dan menjadi yang tertinggi sejak Januari.

Permintaan impor China meningkat seiring melemahnya produksi domestik. Produksi batubara China pada April tercatat 385,63 juta ton, turun tajam dibanding rekor produksi Maret sebesar 440,62 juta ton dan lebih rendah 1% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Secara kumulatif, produksi batubara China selama empat bulan pertama 2026 turun 0,1% menjadi 1,58 miliar ton.

Di sisi lain, pembangkit listrik tenaga termal berbasis batubara di China justru meningkat 3,6% pada periode yang sama.

Kondisi ini membuat keseimbangan pasokan dan permintaan batubara domestik semakin ketat sehingga mendorong kenaikan impor.

Tekanan terhadap pasokan juga berpotensi bertambah setelah kecelakaan tambang batubara terburuk dalam 17 tahun terakhir terjadi di Provinsi Shanxi pekan lalu yang menewaskan 82 orang.

Pemerintah China diperkirakan akan memperketat inspeksi keselamatan tambang batubara termal maupun kokas.

Meningkatnya permintaan China turut mengangkat harga batubara Indonesia. Argus menilai harga batubara Indonesia dengan kandungan energi 4.200 kilokalori per kilogram mencapai US\$ 64,43 per ton pada pekan hingga 22 Mei 2026.

Harga tersebut menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir dan naik 42% sejak akhir tahun lalu.

Sementara itu, impor batubara termal India diperkirakan mencapai 13,78 juta ton pada Mei 2026, tertinggi sejak Juni tahun lalu dan naik 7,3% dibanding April sebesar 12,84 juta ton.

Gelombang panas di India yang mendorong permintaan listrik ke level rekor turut meningkatkan kebutuhan pembangkit listrik berbasis batubara.

Di sisi lain, pasar juga mencermati perubahan kebijakan ekspor batubara Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana mengambil alih pengelolaan perdagangan batubara melalui perusahaan negara yang akan mengendalikan kontrak dan harga ekspor.

Pemerintah menyatakan tetap menghormati kontrak jangka panjang yang telah berjalan, tetapi membuka kemungkinan evaluasi harga kontrak ke depan.

Kebijakan ini bertujuan menekan praktik under invoicing dan meningkatkan penerimaan negara.

Namun, ketidakpastian implementasi aturan baru tersebut dinilai berpotensi mengganggu arus perdagangan batubara global dalam jangka pendek.

Di Jepang, impor batubara termal diperkirakan mencapai 7,59 juta ton pada Mei, naik dari 6,63 juta ton pada April.

Sementara Korea Selatan diproyeksikan mengimpor 6,73 juta ton, tertinggi sejak Januari dan meningkat dibanding April sebesar 4,79 juta ton.

Kedua negara tersebut diperkirakan meningkatkan penggunaan pembangkit listrik berbasis batubara sebagai alternatif LNG yang harganya melonjak akibat perang Iran.

Kondisi ini turut mendorong harga batubara termal premium Australia. Harga batubara Newcastle tercatat naik menjadi US\$ 133,09 per ton pada pekan hingga 22 Mei 2026, mendekati level tertinggi 18 bulan terakhir sebesar US\$ 140,53 per ton pada awal April lalu.

Australia sebagai eksportir batubara terbesar kedua dunia dinilai berpotensi diuntungkan apabila perubahan regulasi di Indonesia mengganggu pasokan global, terutama karena batubara kalori rendah Australia dapat menjadi substitusi bagi batubara Indonesia.

Rupiah Melemah, Won Korea Jadi Mata Uang Terlemah di Asia Hari Ini

Senin, 25 Mei 2026 09:36 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/rupiah-melemah-won-korea-jadi-mata-uang-terlemah-di-asia-hari-ini>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia tercatat menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan, seiring meningkatnya selera risiko investor di tengah optimisme meredanya tensi geopolitik.

Namun demikian, won Korea Selatan justru menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan.

Berdasarkan data pasar pada Senin (25/5/2026), yen Jepang menguat 0,23% ke level 158,83 per dolar AS, sementara dolar Singapura naik 0,24% ke 1,276. Dolar Taiwan juga terapresiasi 0,45% ke 31,426.

Di kawasan Asia Tenggara, baht Thailand menguat 0,56% ke 32,420, peso Filipina naik 0,27% ke 61,427, dan rupiah Indonesia tercatat melemah tipis 0,23% ke 17.730 per dolar AS. Rupee India tercatat stagnan di level 95,690.

Sementara itu, yuan China menguat 0,23% ke 6,782 per dolar AS, dan ringgit Malaysia juga menguat 0,43% ke 3,948.

Di sisi lain, won Korea Selatan justru melemah 0,63% ke level 1.517,6 per dolar AS, menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia pada sesi perdagangan tersebut.

Secara year to date (YtD), sebagian besar mata uang Asia masih berada di bawah tekanan terhadap dolar AS.

Rupiah misalnya, tercatat melemah 5,98% dibanding akhir 2025, sementara won Korea turun 5,15% dan rupee India melemah 6,08%.

Sementara itu, yuan China dan ringgit Malaysia masih mencatatkan penguatan masing-masing 3,04% dan 2,74% sepanjang tahun berjalan.

Pergerakan mata uang Asia ini mencerminkan dinamika pasar yang masih dipengaruhi ketidakpastian global, termasuk arah suku bunga AS, perkembangan geopolitik, serta prospek pertumbuhan ekonomi kawasan.

Yield SUN Turun, Tapi Rupiah Malah Terlemah Sepanjang Sejarah

Senin, 25 Mei 2026 13:19 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109967/yield-sun-turun-tapi-rupiah-malah-terlemah-sepanjang-sejarah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Aksi beli mewarnai pasar Surat Utang Negara (SUN) pada perdagangan siang ini, di tengah pelemahan rupiah yang masih berlanjut.

Melansir data Bloomberg, imbal hasil SUN turun pada hampir semua tenor. Imbal hasil tenor acuan 10 tahun turun paling banyak 5,2 bps menjadi 6,68%.

Sementara, tenor 4 dan 5 tahun mengalami penurunan imbal hasil 5 bps ke 6,72% dan 6,66%. Begitu juga dengan tenor pendek 1 dan 2 tahun turun 1,7 bps dan 1,9 bps masing-masing ke 6,69% dan 6,66%.

Aksi beli di pasar obligasi hari ini tertopang oleh langkah intervensi pemerintah guna meredam volatilitas rupiah. Otoritas fiskal dan moneter melakukan intervensi dengan membeli surat utang di pasar sekunder, dengan target penyerapan Rp2 triliun per hari.

Sementara, surat utang pemerintah berdenominasi dolar AS (INDON) cenderung stagnan. Imbal hasil tenor 2 tahun tercatat di 4,27%, 3 tahun di 4,46%, tenor 5 tahun 4,84%, dan tenor 7 tahun 5,12%. Lalu, tenor 10 tahun 5,44%, dan tenor 30 tahun 5,79%.

Meski ada intervensi di pasar obligasi, pergerakan rupiah masih terdepresiasi dengan pelemahan 0,14% ke posisi Rp17.735/US\$ pada pukul 13:04 WIB, menjadi level terendah baru.

Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah sentimen domestik yang memburuk terkait kondisi fiskal. Data ekonomi yang dirilis pekan lalu juga masih membebani pergerakan rupiah siang ini.

Data defisit neraca pembayaran Indonesia tercatat kembali defisit sebesar US\$9,15 miliar pada kuartal pertama tahun ini, lebih dalam dari defisit kuartal sebelumnya US\$6,07 miliar.

Di sisi lain, pemerintah belum memiliki alternatif pendapatan yang bisa menopang anggaran belanja yang agresif. Kondisi tersebut semakin menambah kekhawatiran investor terhadap pasar keuangan Ibu Pertiwi.

Wamenkeu Ungkap 3 Strategi Utang 2026: Prioritas Pasar Domestik

Senin, 25 Mei 2026 12:21 WIB

Sultan Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109959/wamenkeu-ungkap-3-strategi-utang-2026-prioritas-pasar-domestik/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juida Agung mengungkapkan tiga strategi pembiayaan pada 2026, yakni pendalaman pasar domestik, diversifikasi sumber pendanaan, serta pengelolaan utang yang hati-hati. Ketiga strategi tersebut dilakukan dengan memperhatikan likuiditas, transparansi, serta tata kelola yang baik.

“Strategi pembiayaan 2026 kami memiliki tiga prinsip. Pertama, kami memprioritaskan utang domestik hingga 70% dalam rupiah,” ujar Juida Agung dalam Indonesia Credit Spotlight 2026 di Jakarta, dikutip Senin (25/5/2026).

Prinsip kedua, campuran mata uang yang cermat 25% hingga 30% dalam mata uang asing. Ketiga, pengelolaan liabilitas yang aktif.

Wamenkeu memaparkan minat investor terhadap surat berharga negara Indonesia tetap tinggi. Surat Utang Negara (SUN) tercatat mengalami oversubscription 2,4 kali, sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,8 kali. Pada April, pasar SBN domestik mencatat arus masuk bersih Rp13,4 triliun.

Di pasar internasional, Indonesia mencatat sejumlah capaian penting sepanjang 2026. Mulai dari penerbitan sukuk global US\$2 miliar yang mengalami kelebihan permintaan 1,97 kali lipat, hingga penerbitan Samurai Bond senilai ¥172 miliar.

Pemerintah juga tengah menyiapkan penerbitan obligasi Panda dan Kangaroo guna memperluas basis investor, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, serta mendukung stabilitas rupiah.

Wamenkeu menekankan, komitmen memperkuat strategi pembiayaan di tengah gejolak ekonomi global dilaksanakan melalui koordinasi lintas lembaga, pengelolaan fiskal yang disiplin, serta transparansi dalam kebijakan pembiayaan negara.

“Kami menerapkan active liability, pengelolaan kas yang cermat, dan pengungkapan tepat waktu. Kami menyambut baik pengawasan dari S&P dan lembaga lainnya,” tutur Juida.

Tak hanya itu, Juida menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan juga berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Rupiah Melemah Kala Mata Uang Asia Semringah

Senin, 25 Mei 2026 10:09 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109941/rupiah-melemah-kala-mata-uang-asia-semringah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini bergerak melemah, berbanding terbalik dengan mata uang kawasan yang tersengat euforia penyelesaian damai antara AS dan Iran.

Pagi ini, Senin (25/5/2026), rupiah melemah tipis 0,01% kala pembukaan perdagangan pasar spot ke Rp17.710/US\$. Tak lama berselang rupiah kembali tergelincir 0,14% ke posisi Rp17.733/US\$, pada 09:15 WIB.

Meski dolar AS sedikit tergelincir Tetapi sebenarnya masih bertahan di level tinggi tinggi dengan indeks terhadap enam mata uang utama di level 99. Sementara itu, harga minyak justru sudah lebih jinak dan berada di level US\$98 per barel.

Kabar adanya penyelesaian damai antara AS dan Iran membawa mata uang kawasan hari ini kompak berada di zona hijau, kecuali rupiah, won Korea Selatan, dan rupee India.

Tekanan terhadap rupiah datang dari internal, pasar masih mencermati arah kebijakan fiskal di tengah tekanan program prioritas yang menelan anggaran jumbo.

Rupiah saat ini tengah menghadapi tekanan struktural yang datang dari data defisit neraca pembayaran. Bank Indonesia (BI) pekan lalu mengumumkan neraca pembayaran kuartal I-2026 tercatat defisit US\$9,15 miliar. Jauh lebih dalam daripada defisit kuartal sebelumnya US\$6,07 miliar.

Defisit jasa juga tercatat meningkat menjadi US\$4,6 miliar dari sebelumnya US\$3,5 miliar. Sementara, defisit pendapatan primer tetap sangat besar di US\$9,2 miliar.

Di sisi lain, mesin penghasil devisa Indonesia mulai kehilangan tenaganya. Hal ini terlihat dari menyusutnya surplus perdagangan barang dari US\$10,2 miliar, berkurang menjadi hanya US\$8 miliar.

Di tengah kondisi dan sentimen yang ada, sepertinya ruang penguatan rupiah masih terhalang. Melihat arah pergerakan rupiah pada sesi pembukaan, kemungkinan rupiah berpotensi kembali terdepresiasi di rentang Rp17.750/US\$ hingga 17.850/US\$.

APBN April 2026 Dinilai Solid, Ekonom Proyeksi Defisit Akan Aman di 2,9%

Senin, 25 Mei 2026 16:47 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/apbn-april-2026-dinilai-solid-ekonom-proyeksi-defisit-akan-aman-di-29>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit sebesar Rp 164,4 triliun atau 0,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada April 2026.

Realisasi defisit ini lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi Maret 2026 yang sebesar 0,93% PDB.

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai kinerja APBN hingga April 2026 menunjukkan kondisi fiskal yang masih sangat baik, meskipun pemerintah menjalankan belanja negara secara lebih agresif dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut dia, perbaikan penerimaan negara terlihat dari sejumlah indikator utama, terutama pajak pertambahan nilai (PPN), PPN barang mewah (PPnBM), hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencatat pertumbuhan positif.

Ia mengatakan, capaian tersebut tetap positif meskipun terdapat faktor frontloading pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sempat memengaruhi penerimaan pada awal tahun.

Secara keseluruhan, lanjutnya, performa fiskal Indonesia pada April 2026 menunjukkan kondisi yang cukup kuat. Hal itu terlihat dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara peningkatan belanja negara dan penerimaan negara.

"Jadi secara umum memang posisi performa fiskal kita itu cukup baik ya atau sangat baik pada April 2026," kata Myrdal kepada Kontan, Senin (25/5/2026).

Myrdal menilai belanja negara tahun ini memang jauh lebih agresif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, kondisi tersebut masih dapat diimbangi oleh penerimaan negara yang tumbuh solid sehingga defisit tetap terkendali.

Ia menambahkan, langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah diperkirakan akan membantu menjaga posisi fiskal pada semester kedua tahun ini.

Efisiensi tersebut antara lain dilakukan melalui pengurangan perjalanan dinas kementerian/lembaga dan sejumlah penyesuaian belanja lainnya.

Selain itu, stabilitas harga energi domestik juga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional tetap bergerak positif sehingga mendukung penerimaan negara.

"Pendapatan negara kemungkinan akan terdongkrak oleh aktivitas ekonomi domestik yang masih dijaga stabil terutama dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak berubah atau harga energi yang tidak berubah," katanya.

Di sisi lain, tingginya harga komoditas global dan pelemahan nilai tukar rupiah juga diperkirakan memberikan tambahan penerimaan negara, khususnya dari sektor bea keluar dan PNBPN berbasis komoditas.

Dengan berbagai faktor tersebut, Myrdal memperkirakan posisi defisit fiskal hingga akhir tahun masih berada dalam batas aman.

"Kalau saya lihat untuk posisi defisit fiskal kita masih akan relatif aman dengan proyeksi akhir tahun di level sekitar 2,9%," pungkasnya.

Ekonom Sebut Defisit APBN per April 2026 Terburuk dalam 10 Tahun

Senin, 25 Mei 2026 14:53 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-sebut-defisit-apbn-per-april-2026-terburuk-dalam-10-tahun>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 sebesar Rp 164,4 triliun belum mencerminkan kinerja fiskal yang baik.

Menurutnya, narasi pemerintah yang menyebut kondisi APBN April lebih baik dibandingkan Maret cenderung berlebihan karena pola tersebut terjadi hampir setiap tahun.

Awalil menjelaskan, perbaikan posisi defisit dari Rp 240,1 triliun pada Maret menjadi Rp 164,4 triliun pada April dipengaruhi faktor musiman, terutama peningkatan penerimaan pajak badan yang umumnya terjadi setelah batas pelaporan pajak pada April.

Karena itu, ia menilai perbandingan April dengan Maret kurang tepat untuk menggambarkan kualitas pengelolaan APBN.

Ia menyoroti bahwa secara historis kondisi APBN pada April memang selalu lebih baik dibandingkan Maret. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama dalam 10 tahun terakhir, defisit APBN April 2026 justru menjadi yang paling lebar.

Awalil menyebut kondisi tersebut menunjukkan kinerja fiskal belum pulih sepenuhnya meskipun lebih baik dibandingkan 2025.

"Defisit Rp 164,4 triliun ini tidaklah menunjukkan kinerja pengelolaan APBN yang baik," kata Awalil dalam kanal Youtube pribadinya, dikutip Senin (25/5).

Dari sisi pendapatan negara, Awalil mengakui realisasi hingga April 2026 mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menilai capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi pada 2023 dan 2024.

Menurutnya, kenaikan penerimaan tahun ini juga dipengaruhi efek basis rendah atau low base effect akibat lemahnya penerimaan pada 2025.

Ia juga menilai kinerja penerimaan pajak belum dapat dikatakan pulih. Awalil menyebut realisasi pajak sebesar Rp 646,3 triliun memang tumbuh 16,09% dibandingkan tahun lalu, tetapi masih lebih rendah dibandingkan capaian 2023.

Selain itu, persentase capaian pajak terhadap target APBN dinilai belum menunjukkan performa yang kuat.

"Saya mau menekankan, dinarasikan seperti apa pun pemerintah masih harus berjuang untuk pajak ini masih berat lah karena kondisi ekonomi," imbuhnya.

Di sisi belanja negara, Awalil menyoroti lonjakan belanja pemerintah pusat yang tumbuh 51% dibandingkan periode sama tahun lalu. Ia menyebut peningkatan tajam tersebut dipicu oleh belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembayaran tunjangan ASN, serta kenaikan belanja modal institusi seperti Polri dan Kementerian Pertahanan.

Menurut Awalil, belanja negara hingga April 2026 menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir untuk periode empat bulan pertama pelaksanaan APBN.

Ia juga mencatat kenaikan subsidi dan kompensasi energi akibat pemerintah menahan harga BBM dan listrik turut memperbesar tekanan terhadap belanja negara.

Secara keseluruhan, Awalil menyimpulkan kondisi APBN hingga April 2026 memang lebih baik dibandingkan 2025, namun belum dapat disebut sehat atau pulih.

Ia menilai pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan belanja dan penerimaan yang belum sepenuhnya kuat.

BI dan Perbankan Siapkan Skema Pinjaman untuk Eksportir DHE SDA

Senin, 25 Mei 2026 12:14 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-dan-perbankan-siapkan-skema-pinjaman-untuk-eksportir-dhe-sda>

KONTAN.COID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Bank Indonesia (BI) bersama perbankan nasional tengah menyiapkan mekanisme pinjaman bagi eksportir terkait implementasi kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

Skema tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas rupiah para eksportir setelah pemerintah mewajibkan sebagian DHE SDA dikonversi dan ditempatkan di dalam negeri dalam jangka waktu lebih panjang.

Airlangga menjelaskan, kebijakan baru DHE SDA akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.

Untuk sektor minyak dan gas bumi (migas), aturan tetap mengacu pada kebijakan saat ini yakni penempatan 30% DHE selama tiga bulan.

Sementara untuk sektor nonmigas seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan pertambangan lainnya, pemerintah akan menerapkan retensi devisa selama 12 bulan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Yang dikonversi ke rupiah 50% dan itu untuk periode 12 bulan," ujar Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5).

Meski demikian, pemerintah memastikan eksportir tetap dapat menggunakan devisa dalam bentuk dolar AS untuk kebutuhan impor maupun transaksi lain yang memerlukan valuta asing. Namun apabila kebutuhan rupiah perusahaan melebihi porsi konversi 50% yang diwajibkan, Bank Indonesia dan perbankan disebut telah menyiapkan fasilitas pembiayaan tambahan.

"Kebutuhan rupiah apabila lebih dari 50%, BI mempersiapkan maupun dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman," katanya.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk meningkatkan minat eksportir menempatkan devisa di dalam negeri.

Salah satu insentif yang diberikan yakni pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga dari penempatan dolar hasil ekspor di perbankan domestik.

Selain itu, Airlangga menyebut negara-negara yang telah memiliki perjanjian tertentu dengan Indonesia dimungkinkan menempatkan DHE tidak hanya melalui Himbara.

Ketentuan mengenai bank yang diperbolehkan menerima penempatan DHE nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Jadi BUMN, Siap Kelola Ekspor SDA Strategis

Senin, 25 Mei 2026 18:58 WIB

Reporter: Lailatul Anisah, Editor: Handoyo

<https://nasional.kontan.co.id/news/danantara-sumberdaya-indonesia-resmi-jadi-bumn-siap-kelola-ekspor-sda-strategis>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan siap menjalankan pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas unggulan nasional melalui mekanisme satu pintu.

Kepastian status BUMN tersebut disampaikan langsung oleh Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2026).

"Hari ini sudah menjadi BUMN ya. Itu sudah selesai tadi pagi kita sudah tanda tangan," kata Dony.

Dony menjelaskan bahwa skema ekspor yang akan dijalankan PT DSI masih dalam tahap finalisasi. Menurutnya, pihak perusahaan akan segera menyampaikan rincian mekanisme operasional dan tata kelola ekspor dalam waktu dekat.

Transformasi status PT DSI menjadi BUMN juga dipastikan tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Saat ini, proses verifikasi pegawai masih berlangsung seiring penyesuaian status perusahaan.

"Pekerjanya aman, kan kita udah bilang engga ada yang di PHK," urainya.

Sebagai informasi, PT DSI sebelumnya didirikan pada 18 Mei 2026 dengan status awal sebagai perusahaan swasta nasional. Kini, perusahaan tersebut diproyeksikan menjadi BUMN khusus ekspor yang akan berfungsi sebagai eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas SDA strategis.

Pada tahap awal, komoditas yang akan dikelola PT DSI meliputi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, serta paduan besi atau ferrous alloy.

Pemerintah menargetkan penerapan sistem ekspor satu pintu ini dimulai secara bertahap pada 1 Juni 2026. Selanjutnya, implementasi penuh ditargetkan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Wamenkeu Mengungkap Tiga Sumber Krisis Ekonomi Tak Terlihat di Indonesia

Senin, 25 Mei 2026 13:05 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/wamenkeu-mengungkap-tiga-sumber-krisis-ekonomi-tak-terlihat-di-indonesia>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan menegaskan hingga saat ini belum terdapat tanda-tanda yang mengarah pada krisis ekonomi di Indonesia, meski berbagai spekulasi mengenai potensi pelemahan ekonomi terus bermunculan di ruang publik dan media sosial.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, secara historis terdapat tiga sumber utama yang kerap menjadi pemicu krisis ekonomi di berbagai negara, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan.

Namun, ketiga indikator tersebut dinilai belum terlihat dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

"Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis," ujar Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan krisis pertama yang sering terjadi adalah krisis fiskal, seperti yang dialami sejumlah negara di Amerika Latin pada dekade 1980-an.

Saat itu pemerintah mengalami lonjakan defisit anggaran dan kehilangan kepercayaan investor sehingga kesulitan memperoleh pembiayaan.

"Menerbitkan bonds enggak ada yang beli, jadi terjadilah krisis fiskal di Latin Amerika," katanya.

Namun, Juda memastikan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga. Pemerintah tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara pembiayaan utang negara masih mendapat kepercayaan kuat dari investor domestik maupun asing.

Ia mencontohkan hal tersebut tercermin dari imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN) yang masih relatif stabil di kisaran 6,5%-6,7%.

"Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita maka yield akan melonjak," imbuh Juda.

Sumber krisis kedua, lanjut Juda, adalah tekanan pada neraca pembayaran seperti yang terjadi saat krisis Asia 1997-1998.

Pada periode itu, banyak perusahaan swasta menarik pinjaman luar negeri dalam jumlah besar sehingga rentan ketika terjadi pelemahan nilai tukar dan penghentian aliran modal asing secara mendadak atau sudden stop.

Akibatnya, banyak perusahaan gagal membayar utang luar negeri dan sistem ekonomi mengalami tekanan berat.

"Dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balanced. Jadi krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu," katanya.

Sementara sumber ketiga krisis berasal dari sistem keuangan, seperti yang terjadi dalam krisis global 2008 di Amerika Serikat akibat pecahnya gelembung aset atau bubble di sektor keuangan dan properti.

Menurut Juda, kondisi serupa belum terlihat di Indonesia. Ia menilai belum ada indikasi bubble berlebihan yang dapat memicu gangguan sistemik di sektor keuangan nasional.

Selain itu, Juda juga memaparkan kondisi APBN hingga April 2026 masih cukup solid. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 918 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan, sedangkan penerimaan pajak meningkat 16,1%.

Di sisi lain, belanja negara tumbuh 34,3% dan masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. Meski demikian, defisit APBN tetap terkendali di level 0,64% terhadap PDB, turun dibandingkan posisi Maret yang sebesar 0,92%.

"Keseimbangan primer bahkan surplus di bulan April ini," kata Juda.

Pertumbuhan Ekonomi dan Swasembada Pangan Jateng Memuaskan, Tuai Berbagai Pujian

Senin, 25 Mei 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/pertumbuhan-ekonomi-dan-swasembada-pangan-jateng-memuaskan-tuai-berbagai-pujian/>

JAKARTA – Capaian pertumbuhan ekonomi dan kinerja program swasembada pangan di Jawa Tengah pada 2026, dinilai memuaskan. Tak ayal, capaian itu menuai pujian berbagai pihak.

Hal itu mengemuka dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor”, yang digelar di Balai Kartini Grand Ballroom Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi mengatakan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, memiliki program swasembada pangan, yang disusun berdasarkan pemetaan potensi daerah. Selanjutnya, menyusun program yang tepat untuk mendukung keberhasilannya.

“Pak Luthfi punya program padi dan jagung (swasembada pangan) yang mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Frederica, saat membuka acara.

Menurutnya, strategi yang dijalankan merupakan wujud komitmen kuat dalam memajukan wilayah, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Karenanya, OJK juga mendorong sektor jasa keuangan untuk ikut serta mendukung program yang telah dijalankan di daerah.

Sebagai informasi, capaian produksi padi di Jawa Tengah hingga April 2026 pun tergolong tinggi. Per Triwulan I 2026 telah mencapai 4.696.422 ton, atau sekitar 44,48 persen dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton. Sementara, berdasarkan data BPS, prognosa padi Jateng periode Januari – Juni 2026 sebesar 5.674.991 ton GKG. Angka tersebut menduduki peringkat 2 setelah Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan 2026, pihaknya melakukan berbagai upaya yang untuk menggejut produktivitas. Sebab, pada 2026 ini, musim kemarau diprediksi lebih panjang dibanding pada 2025. Untuk mengatasinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah diintruksikan untuk menjamin ketersediaan air.

Langkah berikutnya, imbuh Luthfi, menyiapkan petani milenial. Caranya, melatih petani-petani muda melalui Program Kecamatan Berdaya. Langkah itu dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian.

Selain itu, papar Luthfi, Pemprov Jateng juga mengangkat UMKM agar naik kelas melalui pelatihan, permodalan hingga pendampingan penjualan produk.

Keberhasilan program swasembada pangan, jelasnya, secara tidak langsung turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang berkontribusi pula pada pertumbuhan ekonomi di level nasional.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan I – 2026 sebesar 5,89%. Angka itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61%.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto pun memberikan pujian atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Sebab, pertumbuhan ekonomi Jateng di atas nasional.

“Kalau daerah (pertumbuhan ekonomi) di bawah nasional, akan jadi bandul (memperberat),” ujarnya.

Dalam acara itu, Gubernur Ahmad Luthfi ditunjuk OJK menjadi salah satu narasumber, dan memaparkan hasil kerjanya di bidang swasembada pangan. (Humas Jateng)

Jawa Tengah Bahas Obligasi Daerah, Solusi Baru Percepat Pembangunan atau Beban Baru APBD?

Senin, 25 Mei 2026 22:20 WIB

Edhie Prayitno Ige

<https://www.rmoljawatengah.id/jawa-tengah-bahas-obligasi-daerah-solusi-baru-percepat-pembangunan-atau-beban-baru-apbd>

Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut ada peluang pembiayaan pembangunan menggunakan skema obligasi daerah. Namun hal ini butuh perencanaan matang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno membuka peluang penggunaan obligasi daerah menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Hanya saja agar tak bermasalah di kemudian hari hal ini butuh perencanaan dan perhitungan lebih matang. Panduan & Petunjuk Perjalanan

Menurutnya pinjaman daerah itu sebenarnya menarik sumber pendanaan tahun-tahun yang akan datang untuk digunakan sekarang.

"Konsekuensinya, pendapatan di masa mendatang akan dipakai untuk membayar cicilan," kata Sumarno saat acara Idola Business Gathering bertema "Mendorong Pembiayaan Pembangunan Melalui Obligasi Daerah" di Hotel Grasia, Kota Semarang Senin, 25 Mei 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Foto: RMOL Jateng.

Ditambahkan obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski sesungguhnya obligasi daerah sebenarnya adalah skema utang. Jadi pemerintah daerah harus cermat menghitung manfaat proyek yang dibiayai melalui obligasi.

"Yang harus dihitung betul adalah seberapa besar manfaatnya," katanya.

Sementara itu Asisten Direktur Madya Direktorat Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Andry Wicaksono menyatakan, pemerintah daerah perlu benar-benar matang dalam menentukan proyek yang akan didanai melalui obligasi atau sukuk daerah. Jasa publikasi berita

"Kalau mau menerbitkan obligasi atau sukuk daerah, teman-teman di pemda harus serius menentukan proyek apa yang mau didanai," kata Andry.

Menurutnya proyek yang dibiayai obligasi daerah tidak selalu harus berorientasi keuntungan seperti korporasi. Pemerintah daerah dapat membiayai proyek layanan publik yang tetap memiliki dampak ekonomi dan sosial.

"Saya optimistis pasar memiliki kapasitas untuk menyerap obligasi daerah, seiring pertumbuhan jumlah investor pasar modal Indonesia yang kini mendekati 20 juta investor," katanya.

Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Jateng, Fanny Rifqi El Fuad menyatakan, pemerintah daerah perlu mulai mempertimbangkan instrumen pasar modal seperti obligasi daerah untuk mendukung percepatan pembangunan. Cuaca Jawa Tengah

“Obligasi daerah memiliki karakteristik dapat diperjualbelikan kembali di pasar, sehingga investor memiliki fleksibilitas ketika membutuhkan likuiditas,” kata Fanny.

Menurutnya BEI berperan sebagai fasilitator perdagangan instrumen tersebut agar transaksi berjalan transparan dan efisien.

Selain saham, pasar modal juga menyediakan instrumen efek bersifat utang seperti obligasi dan sukuk yang berpotensi dimanfaatkan pemerintah daerah.

Airlangga dan OJK Soroti Keberhasilan Jateng, Ahmad Luthfi Dongkrak Pangan dan Ekonomi

Senin, 25 Mei 2026 17:37 WIB

<https://kabarjateng.id/kabar-jawa-tengah/airlangga-dan-ojk-soroti-keberhasilan-jateng-ahmad-luthfi-dongkrak-pangan-dan-ekonomi/>

JAKARTA | Kabarjateng.id — Jawa Tengah kembali mencuri perhatian dalam forum nasional setelah berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional sekaligus memperkuat sektor pangan.

Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengakuan itu muncul dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dalam forum tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memaparkan strategi penguatan swasembada pangan serta pembangunan daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, menilai Jawa Tengah berhasil menjalankan program pangan secara terstruktur melalui pemetaan potensi wilayah dan penyusunan kebijakan tepat sasaran.

Menurutnya, program peningkatan produksi padi dan jagung yang dijalankan Pemprov Jawa Tengah memberi dampak besar terhadap ketahanan pangan nasional.

Hingga April 2026, produksi padi di Jawa Tengah mencapai 4,69 juta ton atau hampir setengah dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton.

“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah penting penyangga kebutuhan pangan nasional,” kata Frederica.

Pertumbuhan Ekonomi Lampau Nasional

Tak hanya sektor pangan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga menunjukkan tren positif.

Pada Triwulan I 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,89 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.

Frederica menilai capaian tersebut lahir dari komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor unggulan berbasis potensi wilayah.

OJK juga mendorong sektor jasa keuangan agar ikut memperkuat program pembangunan daerah.

Apresiasi serupa datang dari Airlangga Hartarto.

Ia menegaskan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki kontribusi besar terhadap penguatan ekonomi nasional.

“Daerah yang tumbuh di atas nasional akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Pemprov Jateng Siapkan Petani Milenial

Ahmad Luthfi mengatakan tantangan swasembada pangan tahun 2026 lebih berat dibanding tahun sebelumnya.

Prediksi musim kemarau panjang membuat pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, terutama menjaga pasokan air untuk lahan pertanian.

Selain memperkuat infrastruktur pertanian, Pemprov Jawa Tengah juga fokus menyiapkan regenerasi petani melalui program petani milenial.

Program tersebut berjalan lewat pelatihan dan pendampingan generasi muda melalui Program Kecamatan Berdaya bersama Kementerian Pertanian.

Pemprov Jateng juga terus mendorong pelaku UMKM agar mampu naik kelas melalui bantuan pelatihan, akses permodalan, dan perluasan pemasaran produk lokal.

Pemkab Kudus raih penghargaan bidang fiskal penyaluran DAK fisik dan pajak

Senin, 25 Mei 2026 20:52 WIB

<https://jateng.antaranews.com/berita/633169/pemkab-kudus-raih-penghargaan-bidang-fiskal-penyaluran-dak-fisik-dan-pajak>

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima dua penghargaan di bidang fiskal atas kinerja penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik dan ketepatan waktu rekonsiliasi penyetoran pajak pusat pada pelaksanaan anggaran tahun 2025.

"Pemkab Kudus untuk pelaksanaan anggaran tahun 2025 mendapatkan dua penghargaan sekaligus, yakni dalam hal penyaluran DAK fisik dan ketepatan waktu rekonsiliasi penyetoran pajak pusat," kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Kudus Eko Wahyu Budi Utomo di Kudus, Jateng, Senin.

Ia menjelaskan penghargaan dari Kemenkeu tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah, satuan kerja, maupun lembaga dalam memenuhi persyaratan dokumen penyaluran anggaran secara cepat dan tepat.

Menurut dia, daerah yang mampu memenuhi tahapan penyaluran anggaran serta pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal akan memperoleh penilaian terbaik.

"Sehingga, untuk bisa mendapatkan nilai sempurna juga harus didukung oleh faktor teknis di lapangan," ujarnya.

Ia menambahkan pelaksanaan kegiatan fisik yang sesuai jadwal akan mempercepat proses penyaluran anggaran tahap berikutnya sehingga realisasi kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Selain mengukur kinerja, penghargaan tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan tata kelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN.

"Kami juga rutin melakukan monitoring pelaksanaan anggaran. Salah satunya melalui monitoring IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) dengan memberikan penghargaan terhadap satuan kerja terbaik," ujarnya.

Ia mengungkapkan capaian penilaian kinerja pelaksanaan anggaran ada yang mencapai nilai sempurna 100 dan rata-rata di atas 95 persen, sebagai bukti kualitas pelaksanaan anggaran yang sesuai kebijakan pemerintah.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan evaluasi terhadap sisi outcome atau dampak pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Untuk mendukung peningkatan layanan, KPPN Kudus juga terus mendorong perbaikan sistem dan prosedur, termasuk penyempurnaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) serta pengembangan layanan "Treasury Connect".

Melalui layanan tersebut, satuan kerja dapat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dari mana saja dengan mekanisme pengajuan tiket ke KPPN setempat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Djati Solechah menyampaikan dua penghargaan tersebut merupakan bentuk kedisiplinan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program kegiatan yang didukung pihak ketiga sebagai pihak pelaksana kegiatan di lapangan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan dari pusat, kaitannya DAK fisik.

"Artinya, selain pelaporan tepat waktu juga pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan dan urutan pekerjaan," ujarnya.

Sementara untuk penghargaan ketepatan waktu rekonsiliasi penyetoran pajak, kata dia, juga demikian dilakukan sesuai ketentuan, sehingga meraih penilaian yang sempurna dari KPPN Kudus.

Inflasi Harga Ritel Inggris Meningkat Akibat Lonjakan Biaya Energi

Selasa, 26 Mei 2026 14:26 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Tri Sulistiowati

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-harga-ritel-inggris-meningkat-akibat-lonjakan-biaya-energi>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Inflasi harga toko di Inggris meningkat pada bulan Mei akibat gangguan dan biaya energi yang lebih tinggi yang disebabkan oleh perang Iran, menurut sebuah kelompok industri ritel yang mengatakan pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk menekan biaya.

Survei bulanan British Retail Consortium terhadap jaringan ritel besar yang diterbitkan pada hari Selasa (26/5) menunjukkan bahwa harga pada bulan Mei 1,2% lebih tinggi dari tahun sebelumnya, naik dari kenaikan 1,0% pada bulan April.

Inflasi harga makanan melambat menjadi 2,7%, terendah dalam setahun, dari 3,1%.

Harga furnitur dan produk kesehatan dan kecantikan mengalami kenaikan paling signifikan, mencerminkan kenaikan biaya bahan baku dan pengiriman.

Kepala Eksekutif BRC, Helen Dickinson, mengatakan pemerintah—yang telah menekan supermarket untuk memperlambat kenaikan harga dan sempat mempertimbangkan untuk memberlakukan batasan harga bulan ini—harus berperan dalam menurunkan biaya bagi pengecer.

"Mengurangi biaya, pajak, dan pungutan non-komoditas yang mencakup lebih dari dua pertiga tagihan energi, dan memangkas birokrasi akan membantu menekan inflasi," kata Dickinson.

Indeks inflasi harga kons

umen resmi Inggris secara keseluruhan turun menjadi 2,8% pada bulan April tetapi diperkirakan akan naik lagi menjadi sekitar 4% dalam beberapa bulan mendatang karena guncangan harga energi.

China-Pakistan Perkuat Koridor Ekonomi dan Kembangkan Pelabuhan Gwadar

Selasa, 26 Mei 2026 13:38 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Tri Sulistiowati

<https://internasional.kontan.co.id/news/china-pakistan-perkuat-koridor-ekonomi-dan-kembangkan-pelabuhan-gwadar>

KONTAN.CO.ID - KARACHI. China dan Pakistan telah mencapai konsensus luas baru tentang memperdalam hubungan strategis untuk meningkatkan pengembangan koridor ekonomi bersama dan menjadikan pelabuhan Gwadar sebagai pusat konektivitas regional, kata kedua negara tetangga itu pada hari Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama saat Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengakhiri kunjungannya ke Beijing pada saat Islamabad berupaya menarik investasi sambil menghadapi ketegangan dengan Afghanistan dan menjadi mediator dalam perang melawan Iran.

"Kedua belah pihak menyambut baik partisipasi pihak ketiga dalam pengembangan Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) berdasarkan model yang telah disepakati," demikian pernyataan yang dikeluarkan setelah Sharif bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang.

Mereka sepakat untuk mempromosikan pengembangan CPEC yang "berkualitas tinggi," sebuah proyek unggulan dari inisiatif Sabuk dan Jalan China, mengembangkan pelabuhan Gwadar di Pakistan, dan memperkuat hubungan jalan dan pelabuhan.

Rencana ini mencakup Khunjerab Pass dan peningkatan Jalan Raya Karakoram, jalur darat utama antara China dan Pakistan.

Pakistan juga menjanjikan langkah-langkah terarah untuk meningkatkan keamanan dan kerja sama guna memastikan keselamatan pekerja dan investasi China di Pakistan, sebuah perhatian utama bagi Beijing setelah serangan militan berulang kali terhadap warga negara dan proyek-proyeknya.

Diplomasi regional

China menyatakan apresiasinya terhadap upaya Pakistan dalam melonggarkan gencatan senjata sementara AS-Iran dan mengadakan pembicaraan di Islamabad.

Keduanya menegaskan kembali dukungan untuk adopsi awal inisiatif lima poin untuk memulihkan perdamaian Timur Tengah, dan menawarkan kontribusi positif untuk itu.

Pakistan menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip satu China, menyebut pulau Taiwan yang diperintah secara demokratis, yang diklaim oleh China, sebagai bagian tak terpisahkan dari China dan menyatakan menentang segala bentuk kemerdekaan Taiwan.

Taiwan menolak klaim China, dengan mengatakan hanya rakyat pulau itu yang dapat menentukan masa depannya.

Pakistan menyambut baik upaya China untuk meningkatkan dialognya dengan Afghanistan.

Keduanya menentang penggunaan wilayah oleh kelompok-kelompok seperti Tehreek-e-Taliban Pakistan dan Gerakan Islam Turkistan Timur untuk membahayakan keamanan regional atau melancarkan serangan.

Pasar Emerging Asia Melemah Selasa (26/5), Harapan Damai Iran Kembali Pudar

Selasa, 26 Mei 2026 15:48 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/pasar-emerging-asia-melemah-selasa-265-harapan-damai-iran-kembali-pudar>

KONTAN.CO.ID - Reli pasar negara berkembang (emerging markets) Asia mulai kehilangan tenaga pada perdagangan Selasa (26/5/2026) setelah serangan terbaru Amerika Serikat (AS) ke Iran kembali meredupkan harapan tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat.

Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga minyak dan memicu kekhawatiran baru terhadap inflasi global.

Melansir Reuters, saham-saham di kawasan emerging Asia bergerak melemah setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi dalam sepekan.

Pelemahan dipicu aksi ambil untung investor di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Tekanan muncul setelah Washington melancarkan serangan baru ke Iran, meskipun negosiator utama dan Menteri Luar Negeri Iran tengah berada di Doha untuk melakukan pembicaraan diplomatik.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengatakan bahwa proses negosiasi dengan Iran masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi.

Pernyataan tersebut semakin meredam optimisme pasar terhadap kemungkinan tercapainya perdamaian dalam waktu dekat.

Indeks MSCI saham negara ASEAN turun 0,4%. Bursa Singapura yang memiliki bobot terbesar dalam indeks tersebut melemah hingga 0,6%.

Sementara itu, saham di Filipina, Malaysia, dan Indonesia terkoreksi antara 0,5% hingga 1%.

Chief Economist Trimegah Securities Fakhru Fulvian mengatakan pergerakan pasar yang cenderung campuran mencerminkan sikap investor yang mulai lebih berhati-hati.

“Investor mulai membedakan antara sentimen positif sementara akibat harapan perdamaian dengan kerentanan fundamental ekonomi kawasan,” ujarnya.

Chief Investment Officer Asia ex-Japan BNP Paribas Asset Management Ecaterina Bigos menambahkan, gangguan berkepanjangan terhadap pasokan minyak berpotensi menghambat penurunan inflasi.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memaksa bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, bahkan membuka peluang kenaikan suku bunga tambahan.

Negara-negara Asia yang bergantung pada impor energi menjadi pihak yang paling terdampak akibat lonjakan harga minyak dalam dua bulan terakhir.

Kondisi ini menekan neraca transaksi berjalan, memicu arus keluar modal, serta melemahkan mata uang kawasan.

Indonesia, Filipina, dan India bahkan telah meningkatkan langkah stabilisasi nilai tukar mata uang masing-masing.

Pelaku pasar kini juga menyoroiti keputusan suku bunga Bank Sentral Korea Selatan yang dijadwalkan pada 28 Mei mendatang.

Berdasarkan survei Reuters, mayoritas analis memperkirakan Bank of Korea akan menaikkan suku bunga setidaknya satu kali hingga akhir 2026 akibat tekanan inflasi dari konflik Iran.

Di sisi lain, indeks KOSPI Korea Selatan justru sempat menyentuh rekor tertinggi setelah pasar kembali dibuka usai libur panjang.

Kenaikan dipimpin saham sektor chip, di mana Samsung Electronics melonjak 3,3% dan SK Hynix melesat 7,5% ke level tertinggi sepanjang masa.

Kondisi tersebut sempat mendorong indeks MSCI emerging Asia naik 1,4% ke rekor tertinggi baru sebelum akhirnya memangkas sebagian penguatan dan diperdagangkan naik sekitar 0,7% pada sesi sore.

Di Sri Lanka, bank sentral secara mengejutkan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin. Kebijakan tersebut mendorong penguatan rupee hingga 0,7%, dengan mata uang tersebut telah menguat sekitar 6% dalam tiga sesi terakhir.

Sementara itu di Asia Tenggara, rupiah Indonesia menyentuh rekor terendah baru di level Rp 17.790 per dolar AS akibat kekhawatiran arus keluar modal, tata kelola, serta kebijakan pengendalian ekspor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHGS) juga turun lebih dari 1%.

Baht Thailand melemah 0,4% ke kisaran 32,6 per dolar AS, meskipun bursa saham negara tersebut naik 0,4% didorong data ekspor yang kuat dan prospek permintaan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Di Taiwan, booming AI terus mendorong penguatan pasar saham. Bursa Taiwan kini menjadi pasar saham terbesar keenam di dunia dan telah menarik arus dana asing sekitar US\$ 25 miliar sepanjang tahun ini.

Dolar AS Stabil Selasa (26/5), Saat Harapan Damai Iran Mulai Memudar

Selasa, 26 Mei 2026 13:32 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-stabil-selasa-265-saat-harapan-damai-iran-mulai-memudar>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bergerak stabil pada perdagangan Selasa (26/5/2026) setelah optimisme pasar terhadap kesepakatan damai Iran mulai memudar akibat serangan terbaru AS ke Iran dan belum adanya kepastian pembukaan kembali Selat Hormuz.

Mengutip Reuters, pasar sebelumnya berharap konflik Iran dapat segera mereda dan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz kembali dibuka.

Harapan tersebut sempat menekan harga minyak di bawah US\$ 100 per barel, mengurangi tekanan terhadap mata uang negara berkembang, dan memperbaiki sentimen aset berisiko.

Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan proses negosiasi dengan Iran masih dapat memakan waktu beberapa hari.

Pernyataan itu muncul sehari setelah AS melancarkan serangan yang disebut Washington sebagai serangan defensif di wilayah selatan Iran.

Euro tercatat melemah tipis ke level US\$ 1,163 setelah sebelumnya naik 0,3% pada Senin. Sementara yen Jepang berada di posisi 158,99 per dolar AS.

Indeks dolar AS terhadap sekerajang mata uang global berada di level 99,031.

Chief Investment Strategist Saxo di Singapura Charu Chanana menilai, pasar memang memiliki alasan untuk tetap optimistis karena potensi pembukaan Selat Hormuz dapat menurunkan risiko ekstrem terhadap harga minyak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi global.

Namun, menurut dia, pasar belum bisa menganggap situasi benar-benar mereda hanya karena adanya kemajuan negosiasi.

“Ujian sesungguhnya bukan hanya kesepakatan di atas kertas, tetapi apakah kapal tanker bisa kembali bergerak bebas, premi asuransi turun, dan arus energi kembali normal,” ujarnya.

Chanana memperkirakan sentimen pasar masih akan bergerak fluktuatif atau stop-start risk-on trade hingga kepastian normalisasi pasokan energi benar-benar terjadi.

Dolar Australia yang kerap dianggap sebagai mata uang berisiko turun 0,23% ke level US\$ 0,7158 setelah sehari sebelumnya menguat 0,65%.

Sementara dolar Selandia Baru melemah 0,42% ke level US\$ 0,5848 menjelang keputusan kebijakan bank sentral negara tersebut pada Rabu (27/5).

Di pasar obligasi, imbal hasil Treasury AS turun tajam setelah pasar AS kembali dibuka usai libur panjang, mengikuti pelemahan imbal hasil obligasi global yang dipicu harapan tercapainya kesepakatan damai.

Harga minyak juga kembali menguat setelah sebelumnya anjlok. Kontrak Brent naik 1,5% menjadi US\$ 97,76 per barel setelah sempat merosot 7% pada perdagangan Senin.

Meski demikian, sejumlah analis menilai harga energi tidak akan cepat kembali ke level sebelum perang meski konflik mereda dalam waktu dekat.

Normalisasi rantai pasok energi diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama sehingga tekanan inflasi dan kekhawatiran suku bunga tinggi masih tetap bertahan.

Strategis OCBC menilai belum ada alasan kuat bagi pasar untuk bersikap bearish terhadap dolar AS, didukung ketahanan ekonomi AS serta tekanan inflasi berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mendorong Federal Reserve tetap bersikap hawkish.

Rupiah Jatuh Nyaris 30% dalam 10 Tahun, Apa Kabar Mata Uang Lain?

Selasa, 26 Mei 2026 13:17 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/110133/penyebab-ihsg-ditutup-melemah-1-lebih>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Di tengah dominasi dolar Amerika Serikat (AS), hampir semua mata uang Asia seperti rupee India, ringgit Malaysia, dolar Vietnam, dan peso Filipina, memang bergerak melemah. Hanya dolar Singapura yang tampaknya lebih stabil.

Namun jika melihat data, maka terlihat pelemahan rupiah cenderung lebih dalam, dan rentan terhadap guncangan eksternal. Rupiah merupakan mata uang paling sensitif di kawasan.

Melansir data dari Bloomberg pada Selasa (26/5/2026), dalam 10 tahun terakhir, rupiah bergerak dari Rp13.788/US\$ pada akhir 2015, ke posisi Rp17.783/US\$ pada sesi perdagangan hari ini, pukul 10:30 WIB. Sehingga, selama satu dekade, mata uang Nusantara terdepresiasi 28,98%, hampir 30%.

Sementara, meski rupee India memang bergerak searah dengan rupiah, dan terlihat lebih terkendali, tetapi pelemahannya tercatat paling besar yakni 44,13%. Dari INR 66.153/US\$ pada akhir 2015 menjadi INR 95.347/US\$ pada hari ini.

Pergerakan mata uang ASEAN sepanjang masa. (Bloomberg)

Lebih lanjut, peso Filipina tercatat berada di level PHP 47.170/US\$ pada akhir Desember 2015, lalu bergerak menjadi PHP 61.565/US\$ pada hari ini. Dengan begitu, pelemahan peso adalah 30,52%.

Sedangkan, pelemahan dong Vietnam cenderung lebih kecil yaitu 16,76%. Pada akhir Desember 2015, dong Vietnam berada di VND 22.485/US\$, dan posisi hari ini VND 26.353/US\$.

Dengan begitu, dalam satu dekade mata uang Asia yang melemah tajam adalah rupee (-44,13%), disusul peso Filipina (-30,52%), dan rupiah (-28,98%), lalu dolar Vietnam (-16,76%).

Sebaliknya, hanya ada dua mata uang yang relatif stabil dalam satu dekade terakhir di kawasan, yaitu ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Masing-masing justru tercatat menguat 7,59% dan 9,97%.

Meski melemah, pergerakan dong Vietnam lebih tertib daripada rupiah yang dari grafik terlihat seperti selalu berada di bawah ancaman. Volatilitas dong Vietnam lebih terjaga lantaran depresiasinya cenderung perlahan dan terkendali.

Vietnam setidaknya memiliki struktur ekonomi lebih stabil daripada Indonesia. Sehingga, pelemahan mata uang di Vietnam umumnya dibarengi dengan keyakinan pasar bahwa negara tersebut memiliki surplus perdagangan yang kuat dan arus investasi asing yang terus masuk.

Di sisi lain, India juga mengalami pelemahan paling dalam. Namun, sepertinya kepanikan pasar relatif terjaga di India karena ekonominya yang tumbuh agresif dan konsumsi domestiknya besar. Selain itu, investor global sepertinya masih melihat India sebagai mesin pertumbuhan jangka panjang.

Bloomberg Survey memproyeksikan ekonomi India tumbuh 7,1% pada kuartal I-2026, dan pada kuartal II-2026 pertumbuhannya diperkirakan 6,4% akibat kenaikan harga minyak dunia.

Sementara itu, pergerakan ringgit lebih mapan. Hal ini terjadi karena Malaysia memiliki bantalan eksternal yang lebih kuat. Malaysia tercatat memiliki surplus perdagangan yang relatif stabil dengan ekspor komoditas seperti: minyak dan gas, LNG, minyak sawit, semikonduktor, komponen elektronik, dan produk manufaktur teknologi menengah.

Tak seperti Indonesia yang bergantung pada komoditas alam seperti batu bara dan minyak sawit, struktur ekspor Malaysia cenderung lebih terdiversifikasi. Sehingga ketika harga energi naik, Malaysia justru mendapat tambahan devisa karena menjadi eksportir energi.

Sementara, pergerakan dolar Singapura yang relatif stabil juga dipengaruhi oleh kredibilitas institusi dan kekuatan finansialnya sebagai hub yang menghubungkan antara ekonomi kawasan dengan ekonomi global.

Sehingga, dominasi dolar AS terhadap mata uang Asia sebenarnya tak bisa ditelan mentah-mentah. Sebab, struktur ekonomi masing-masing negara berperan dalam menghadapi guncangan eksternal yang terjadi.

Lantas, mengapa rupiah menjadi yang paling sensitif?

Meski menempati posisi terlemah ketiga selama satu dekade terakhir, tetapi pergerakan rupiah cenderung sensitif lantaran Indonesia lebih rentan secara struktur ekonomi yang bergantung pada dolar AS, impor energi, dan modal asing jangka pendek.

Indonesia memang tampak kuat, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di ASEAN, dengan cadangan devisa di atas US\$148,2 miliar posisi pada akhir kuartal I-2026.

Namun, struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas primer seperti batu bara, nikel, CPO, yang harganya mengikuti siklus harga komoditas global.

Berbeda dengan Vietnam yang membangun basis ekspor manufaktur elektronik dan industri padat karya, Indonesia belum memiliki mesin ekspor bernilai tambah tinggi yang cukup besar untuk menghasilkan arus devisa stabil dalam jangka panjang.

Rupiah Menutup Hari di 'Bibir Jurang', Hampir Rp17.800/US\$

Selasa, 26 Mei 2026 15:35 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/110123/rupiah-menutup-hari-di-bibir-jurang-hampir-rp17-800-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Nilai tukar rupiah menutup perdagangan hari ini, Selasa (26/5/2026), dengan pelemahan 0,26% ke level terlemah sepanjang masa di Rp17.789/US\$, menandai pelemahan hari keempat beruntun meski Bank Indonesia (BI) telah mengerek suku bunga acuan secara agresif.

Pergerakan rupiah hari ini kian volatil dengan menyentuh level terendah lebih dari dua kali. Dari posisi Rp17.749/US\$ pada pembukaan, rupiah terus tergerus ke posisi Rp17.786/US\$ pada pukul 10:02 WIB, lalu melangkah ke Rp17.794/US\$ pada 14:04 WIB.

Pergerakan rupiah ini dipicu oleh harga minyak mentah dunia jenis Brent kembali terkerek 3,22% ke posisi US\$99,33 per barel, setelah sempat merosot 7% kemarin.

Serangan militer AS di Iran terjadi, dan kembali mengaburkan prospek tercapainya kesepakatan sementara antara kedua negara itu untuk membuka Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz untuk waktu yang panjang, membuat persediaan minyak global menyusut.

Hal ini membuat sebagian besar mata uang Asia bergerak di zona merah. Baht Thailand melemah paling dalam, disusul ringgit Malaysia, lalu rupiah. Sebaliknya, won Korea Selatan justru tercatat menguat 0,81%.

Tekanan terhadap rupiah hari ini tidak hanya dipicu gejolak harga minyak akibat ketidakpastian global, tetapi mencerminkan memburuknya persepsi investor terhadap fondasi domestik Indonesia. Sebab, rupiah terus melemah setelah data-data ekonomi rilis pada pekan lalu.

Kala pasar global dibayangi lonjakan harga minyak dan penguatan dolar AS, investor juga melihat risiko di dalam negeri semakin meningkat, mulai dari pelebaran defisit transaksi berjalan, tekanan fiskal, hingga ketidakpastian arah pembiayaan pemerintah ke depan.

Kondisi ini membuat pasar obligasi Indonesia ikut kehilangan daya tariknya, dan membuat investor ingin diganjar lebih mahal dalam memegang aset berdenominasi rupiah.

Data yang dihimpun Bloomberg menunjukkan, hingga 22 Mei investor telah mencatat aksi jual sebesar US\$101,3 juta secara bulanan, dan US\$47,6 juta secara mingguan.

Arus keluar modal ini memperlihatkan bahwa investor sepertinya tak lagi sekadar melakukan penyesuaian portofolio jangka pendek, malahan mulai mengurangi eksposur terhadap aset domestik yang dianggap makin rentan terhadap tekanan eksternal dan adanya risiko ketidakpastian kebijakan.

Hal ini membuat pemerintah mengambil langkah intervensi untuk meredam gejolak pasar dengan membeli obligasi senilai Rp2 triliun per hari di pasar sekunder.

Langkah ini sepertinya dilakukan untuk menahan kepanikan pasar dalam jangka pendek, sekaligus menunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi rupiah sepertinya sudah masuk fase yang lebih struktural.

Pemerintah Gelontorkan Rp7,8 T untuk Insentif Semester II-2026

Selasa, 26 Mei 2026 14:31 WIB

Sultan Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/110107/pemerintah-gelontorkan-rp7-8-t-untuk-insentif-semester-ii-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah akan kembali menggelontorkan insentif untuk stimulus ekonomi periode semester II 2026, termasuk periode libur sekolah. Total anggaran mencapai sekitar Rp7,85 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga memaparkan insentif akan diberikan berupa lanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik, insentif diskon transportasi darat dan laut, program magang nasional, hingga insentif pajak bagi penulis.

Rinciannya, diskon tiket pesawat domestik akibat adanya gratis PPN dengan nilai anggaran Rp472,2 miliar. Targetnya 2,3 juta penumpang.

"Untuk periode Natal dan Tahun Baru, pemberian insentif PPN DTP tercatat mencapai Rp772 miliar," ujar Airlangga kepada wartawan di kantornya, Selasa (26/5/2026).

Selanjutnya, insentif diskon tarif tiket transportasi darat dan udara selama periode libur sekolah, termasuk periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027.

Untuk periode libur sekolah, anggaran senilai Rp190 miliar khusus untuk transportasi darat dan penyeberangan dengan target 3,07 juta penerima. Sementara itu, saat Nataru, anggaran insentif senilai Rp161,4 miliar dengan target penerima manfaat sekitar 2,87 juta orang.

"Kemudian, tentu yang terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kami sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis diberikan PPh final sebesar 1,5%," ungkap Airlangga.

Kemudian, kata Airlangga, pemerintah juga kembali membuka program magang nasional batch keempat untuk target sebanyak 150.000 orang. Anggaran yang disiapkan yakni mencapai sekitar Rp4,14 triliun dan program vokasi seniai Rp2,12 triliun.

"Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang ter-PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun. Jadi itu yang tadi dibahas dan ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus semester kedua," tutur dia.

Dengan demikian, total anggaran yang digelontorkan untuk pemberian paket stimulus selama semester 2026 dan Nataru tersebut mencapai sekitar Rp7,85 triliun.

DPR: RI Selalu Punya Jalan Keluar Baru Hadapi Krisis Ekonomi

Selasa, 26 Mei 2026 09:50 WIB

Sultan Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/110054/dpr-ri-selalu-punya-jalan-keluar-baru-hadapi-krisis-ekonomi/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengklaim stabilitas ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga, meski belakangan sempat didera isu pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Misbakhun mengatakan, stabilitas tersebut terjadi lantaran respons Indonesia saat menghadapi krisis selalu memberikan jalan keluar berupa penciptaan solusi baru.

"Salah satu yang membuat kita mempunyai stabilitas seperti saat ini karena apa? Karena respons Indonesia pada saat menghadapi krisis itu kita selalu memberikan jalan keluar baru," ujarnya dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Misbakhun lantas mencontohkan, ketika Indonesia diterpa krisis moneter pada 1998 silam akibat krisis kepercayaan terhadap bank saat itu, pemerintah merespons solusi baru dengan melahirkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Lalu, ekonomi global, yang turut berdampak ke Indonesia pada Global Financial Crisis (GFC) 2008 juga turut melahirkan struktural aturan baru yakni pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.

"Di mana pengawasan perbankan dan regulasi perbankan dipisahkan. Makroprudensial dan mikroprudensial dipisahkan," kata dia. "Ini membuat sistem keuangan makin lama makin solid dan kemudian diregulasi dengan makin transparan, partisipasi melibatkan banyak pihak."

Airlangga Pastikan Tekanan Rupiah Terkendali, Beda 2004-2014

Selasa, 26 Mei 2026 08:40 WIB

Sultan Ibnu Affan

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/110045/airlangga-pastikan-tekanan-rupiah-terkendali-beda-2004-2014/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tekanan nilai tukar rupiah yang tengah melanda Indonesia belakangan ini dinilai masih cukup terkendali ketimbang yang terjadi pada kurun waktu 2004 hingga 2014.

Dalam kurun waktu 10 tahun di periode tersebut, kata Airlangga, rupiah mengalami penurunan hingga mencapai sekitar 40%. Di saat yang sama, inflasi kumulatif juga tercatat mencapai sebesar 17,6%.

"Rupiah itu di tahun 2004-2014 terdepresiasi 40% dalam 10 tahun. Dan itu dengan inflasi yang di tahun 2005 di 17%, karena harga minyak naik ke US\$140/barel," ujarnya dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, dikutip Selasa (26/5/2026).

Sementara itu, kata Airlangga, sepanjang periode 10 tahun setelahnya atau dalam kurun waktu 2014 hingga 2024, rupiah hanya terdepresiasi sebesar 30,6% dengan pengendalian inflasi cukup terjaga hanya sekitar 3%.

Dia lagi-lagi turut membandingkan dengan kondisi rupiah saat ini, yang juga beberapa kali telah menyentuh pelemahan sepanjang sejarah. Dia tetap kukuh rupiah saat ini masih terkendali.

"Jadi beda nih kualitas dalam dua dekade terakhir dan per hari ini inflasi kita jaga di 2,4 dan depresiasi Rupiah 5%," tutur dia.

Dia mengatakan, hal itu juga didorong oleh sektor keuangan dalam negeri, khususnya perbankan dan korporasi yang disebutnya masih sangat solid.

"Jadi seperti yang saya selalu sampaikan ekonomi kita masih kuat. Namun kita punya momentum yang tadi disampaikan bagaimana menuju 8%. Nah 8% ini daerah harus terus mendorong karena pusat itu agregat daerah."

Per Senin kemarin, rupiah sendiri kembali ditutup melemah 0,19% di posisi terendahnya sepanjang sejarah yaitu Rp17.743/US\$. Sejak awal tahun, rupiah juga telah terdepresiasi mencapai sekitar 6,26%. Secara tahunan, sudah melemah hampir 9%.

Rupiah menjadi satu-satunya mata uang kawasan yang melemah hari ini lantaran berbagai sentimen domestik. Padahal, Bank Indonesia beberapa waktu lalu mengambil langkah cukup agresif dengan menaikkan suku bunga acuan hingga 50 basis poin (bps).

Namun sentimen yang memburuk terkait kondisi fiskal serta adanya ketidakpastian kebijakan masih jadi beban utama rupiah. Hingga, berbagai upaya stabilisasi dan intervensi belum mampu mengangkat rupiah lebih kuat.

OJK Perkuat Pembiayaan Daerah, Program PED Sudah Jangkau 40 Kabupaten/Kota

Selasa, 26 Mei 2026

Budi Aris

<https://radioidola.com/2026/ojk-perkuat-pembiayaan-daerah-program-ped-sudah-jangkau-40-kabupaten-kota/>

Semarang, Idola 92,6 FM-OJK menegaskan komitmennya, memperkuat sektor jasa keuangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif dan tepat sasaran, terutama pada sektor unggulan berbasis potensi lokal.

Ketua Dewan Komisiner Friderica Widyasari Dewi mengatakan penguatan ekonomi daerah menjadi kunci menjaga optimisme Indonesia, di tengah tekanan dan dinamika ekonomi global. Pernyataan itu disampaikan dalam pembukaan Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” di Balai Kartini, Jakarta, kemarin.

Menurut Friderica, kekuatan ekonomi nasional ditentukan kemampuan daerah mengembangkan sektor unggulannya masing-masing.

“Berbagai tantangan dinamika global saat ini tidak boleh menurunkan optimisme Indonesia. Justru inilah saat untuk membuktikan bahwa salah satu kekuatan Indonesia berasal dari kekuatan ekonomi di daerah,” kata Friderica.

Friderica menjelaskan, percepatan pengembangan ekonomi daerah membutuhkan sinergi kuat lintas lembaga, mulai dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, hingga kementerian teknis di sektor riil.

Sejak 2024, OJK telah menjalankan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang difokuskan pada optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui pembangunan ekosistem pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor.

“Hingga Mei 2026, program tersebut telah diterapkan di 40 kabupaten dan kota dengan fokus utama pada sektor agrikultur dan ekonomi kreatif,” jelasnya.

Friderica menyebut, implementasi program PED antara lain dilakukan di wilayah Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Hernawan Bakti Sasongko menambahkan, OJK akan terus memperluas jangkauan PED agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus mendorong PED semakin luas agar mampu memberikan kontribusi nyata melalui kolaborasi yang membangun ekosistem program prioritas di daerah,” ujarnya. (Bud)

Pembiayaan Melalui Obligasi Daerah Perlu Perencanaan Matang

Selasa, 26 Mei 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/pembiayaan-melalui-obligasi-daerah-perlu-perencanaan-matang/>

SEMARANG – Obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, namun perlu perencanaan dan perhitungan lebih matang.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat acara Idola Business Gathering bertema “Mendorong Pembiayaan Pembangunan Melalui Obligasi Daerah”, di Hotel Grasia, Kota Semarang, Senin (25/5/2026). Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan, terutama menghitung pendapatan yang akan digunakan untuk membayar cicilan.

“Sebab, pinjaman daerah itu sebenarnya menarik sumber pendanaan tahun-tahun yang akan datang, untuk digunakan sekarang. Konsekuensinya, pendapatan di masa mendatang akan dipakai untuk membayar cicilan,” kata Sumarno.

Memang, lanjut dia, obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Walakin, Sumarno mengingatkan, sesungguhnya obligasi daerah pada dasarnya merupakan skema utang, sehingga pemerintah daerah harus cermat menghitung manfaat proyek yang dibiayai melalui obligasi.

“Yang harus dihitung betul adalah seberapa besar manfaatnya,” imbuhnya.

Asisten Direktur Madya Direktorat Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Andry Wicaksono menyatakan, pemerintah daerah perlu benar-benar matang dalam menentukan proyek yang akan didanai, melalui obligasi atau sukuk daerah.

“Kalau mau menerbitkan obligasi atau sukuk daerah, teman-teman di pemda harus serius menentukan proyek apa yang mau didanai,” ujarnya.

Menurut Andry, proyek yang dibiayai obligasi daerah tidak selalu harus berorientasi keuntungan seperti korporasi. Pemerintah daerah dapat membiayai proyek layanan publik, yang tetap memiliki dampak ekonomi dan sosial.

“Saya optimistis pasar memiliki kapasitas untuk menyerap obligasi daerah, seiring pertumbuhan jumlah investor pasar modal Indonesia yang kini mendekati 20 juta investor,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Jateng, Fanny Rifqi El Fuad menyatakan, pemerintah daerah perlu mulai mempertimbangkan instrumen pasar modal, seperti obligasi daerah untuk mendukung percepatan pembangunan.

“Obligasi daerah memiliki karakteristik dapat diperjualbelikan kembali di pasar, sehingga investor memiliki fleksibilitas ketika membutuhkan likuiditas,” ujar Fanny.

Dia menjelaskan, BEI berperan sebagai fasilitator perdagangan instrumen tersebut, agar transaksi berjalan transparan dan efisien. Selain saham, pasar modal juga menyediakan instrumen efek bersifat utang, seperti obligasi dan sukuk, yang berpotensi dimanfaatkan pemerintah daerah. (Humas Jateng)*ul

Tingkatkan Ekonomi Keluarga, TP PKK Jateng Perkuat Pendampingan UMKM Lewat Kapulaga

Selasa, 26 Mei 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/tingkatkan-ekonomi-keluarga-tp-pkk-jateng-perkuat-pendampingan-umkm-lewat-kapulaga/>

SEMARANG – Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui program Kapulaga (Kelompok Usaha Berbasis Keluarga). Program itu menjadi salah satu strategi pemberdayaan UMKM berbasis rumah tangga, agar lebih berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.

Gagasan pembentukan Kapulaga disampaikan Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kapulaga yang digelar secara daring, Senin (25/5/2026).

Nawal mengatakan, sektor UMKM memiliki potensi besar, karena jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Hingga 2025, jumlah UMKM di Jateng mencapai sekitar 4,45 juta unit, dan mayoritas dijalankan oleh keluarga. Dari jumlah tersebut, baru 198.780 unit atau 4,47 persen yang telah mendapat pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Menurutnya, kondisi itu menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menghadirkan inovasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui pendekatan berbasis keluarga.

Nawal menuturkan, PKK memiliki kekuatan jaringan hingga tingkat dusun, RW, RT, dan desa wisata. Sehingga, kekuatan itu dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi keluarga secara lebih masif dan berkelanjutan.

Selama ini, pihaknya telah memiliki program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Untuk memperkuat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, program Kapulaga dihadirkan sebagai model pemberdayaan baru yang lebih terintegrasi.

“Agar implementasinya berkelanjutan dan memastikan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, maka TP PKK Jateng mengembangkan sebuah terobosan yaitu program Kapulaga,” ungkap istri Wakil Gubernur Jateng.

Melalui program tersebut, pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan secara menyeluruh. Mulai dari asesmen kebutuhan, pelatihan, penguatan kualitas produk, legalitas usaha, pengemasan, pemasaran, hingga akses pembiayaan.

“Usaha peningkatan pendapatan keluarga harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak, mulai asesmen kebutuhan, pembentukan kelompok, pelatihan, pendampingan standarisasi produk, pendampingan pengemasan, pemasaran, fasilitasi akses kredit, serta monitoring,” tutur Nawal.

Ia menjelaskan, Kapulaga merupakan kelompok usaha ekonomi produktif berbasis keluarga, yang dibangun dengan semangat kolaborasi dan saling memberdayakan. Tujuannya, meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan keluarga.

Program tersebut memiliki empat layanan utama, yakni pembentukan kelompok Kapulaga, pemberdayaan kelompok, pendampingan kelompok, dan pemantauan perkembangan usaha. Sasarannya, keluarga kurang mampu yang memiliki usaha produktif berbasis keluarga, baik sektor makanan dan minuman, fesyen, maupun kriya.

“Kelompok usahanya dapat dibentuk berdasarkan kumpulan individu atau wilayah tempat usaha, misalnya di tempat wisata, pasar, lingkungan pabrik, pusat perbelanjaan, atau area car free day, dan sebagainya,” jelas Nawal.

Ditambahkan, pelaksanaan Kapulaga akan melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, Baznas, CSR perusahaan, perbankan, hingga perguruan tinggi, agar akses pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin luas dan merata.

“Dengan demikian Kapulaga tidak hanya akan meningkatkan pendapatan, tetapi juga solidaritas serta keadilan dan pemerataan ekonomi, khususnya pada keluarga kurang mampu, baik di perkotaan maupun di pedesaan,” ujarnya.

Nawal mengatakan, Kapulaga mulai dikembangkan di Jawa Tengah tahun ini melalui sejumlah tahapan. Mulai dari penyusunan pedoman, sosialisasi, pembentukan kelompok usaha berdasarkan klaster, pelatihan dan inkubasi usaha, hingga pendampingan legalitas dan pemasaran produk.

Sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, program Kapulaga diharapkan dapat menjadi gerakan bersama dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di Jawa Tengah.

“Saya berharap kolaborasi berbagai pihak ini dapat mewujudkan inovasi atau terobosan dalam pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dengan baik, sehingga meningkatkan pendapatan keluarga dan menyejahterakan kehidupan masyarakat,” pungkas Nawal. (At/UI, Diskomdigi Jateng)

Pariwisata dan Ekonomi Syariah, Andalan Pertumbuhan Ekonomi Jateng 2027

Selasa, 26 Mei 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/pariwisata-dan-ekonomi-syariah-andalan-pertumbuhan-ekonomi-jateng-2027/>

KUDUS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dua sektor baru sebagai penggerak ekonomi 2027, yakni pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.

Optimalisasi dua sektor itu guna mengerek target pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sebesar 6 persen-7,4 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita sudah 5,89 persen di triwulan I 2026. Kalau bisa kita tingkatkan lagi,” tegas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, di sela acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026, di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (26/5/2026).

Acara tersebut dihadiri Sekda Jateng Sumarno, perwakilan Forkopimda Jateng, bupati atau wakil bupati, beserta Forkopimda eks karesidenan Pati, meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora (Jekuti-Banglor).

Upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi itu, tentu tidak meninggalkan penguatan sektor ketahanan pangan yang sudah dimulai pada 2026, serta upaya meningkatkan realisasi investasi.

Luthfi meyakini, sektor pariwisata mampu menjadi penopang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2025 sebesar 5,37 persen. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi tersebut dari sektor pariwisata, melalui penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,60 persen.

Bahkan, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jateng 2022-2025 menunjukkan tren meningkat. Dari 3,29 persen pada 2022 menjadi 3,40 persen pada 2023, lalu naik signifikan pada 2024 sebesar 3,56 persen, dan pada 2025 mencapai 3,74 persen. Tren peningkatan ini menegaskan peran pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Kunjungan wisatawan pada 2022 sampai dengan 2025 juga mengalami peningkatan. Tahun 2022 sebanyak 46,6 Juta orang, menjadi 74,4 Juta orang pada tahun 2025 (naik 59,73 persen). Peningkatan kunjungan wisatawan menunjukkan Jateng merupakan destinasi favorit bagi wisatawan.

Dalam acara Rembug Pembangunan tersebut, telah ditetapkan target pembangunan pariwisata untuk daerah Kudus, Jepara, Rembang, Pati, dan Blora.

Kabupaten Kudus jadi daerah dengan target tertinggi, yakni sekitar 3,7 juta kunjungan wisatawan. Selanjutnya, Kabupaten Rembang menargetkan hampir 3 juta kunjungan wisatawan, disusul Jepara sekitar 2,4 juta wisatawan. Adapun Kabupaten Blora menargetkan 1,2 juta wisatawan, dan Pati 1,1 juta wisatawan.

Pengembangan desa wisata juga turut menjadi prioritas. Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, dan Blora masing-masing menargetkan pembentukan 30 desa wisata, sedangkan Jepara menargetkan tiga desa wisata baru. Target ini menunjukkan adanya upaya pemerataan pengembangan pariwisata, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. (Humas Jateng)*ul

Dorong UMKM Naik Kelas, Pemkab Jepara Gelar Sosialisasi Perpajakan dan Akses Permodalan

Selasa, 26 Mei 2026

Yandip Jateng, Penulis: Diskominfo Jepara/MB, Editor: Di/UI, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dorong-umkm-naik-kelas-pemkab-jepara-gelar-sosialisasi-perpajakan-dan-akses-permodalan/>

JEPARA – Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendukung program UMKM Naik Kelas yang dicanangkan Bupati Jepara, pemerintah kabupaten setempat menggelar Sosialisasi Perpajakan, Ketenagakerjaan, Literasi Keuangan, dan Akses Permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, di Pendapa Kartini, Selasa (26/5/2026).

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Subiyanto, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan IKM, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

“Kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi UMKM Jepara. Walaupun kondisi sekarang tidak baik-baik saja, semoga kegiatan seperti ini bisa membantu pelaku usaha IKM dan UMKM mendapatkan dukungan dan bantuan yang baik,” ujarnya.

Bupati Jepara melalui Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Samiadji menyampaikan, pelaku usaha perlu dibekali pemahaman mengenai regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat literasi keuangan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Selain meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, agar mampu berkembang dan semakin kompetitif,” katanya.

Dia menambahkan, dalam lima tahun kepemimpinan Bupati Jepara, pemerintah daerah berkomitmen mendorong UMKM agar terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, kontribusi pajak dari pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Samiadji menegaskan, pentingnya pendataan UMKM yang sudah berkembang, agar pemerintah dapat mengetahui kondisi riil pelaku usaha di Jepara.

“Kita harus mengidentifikasi pelaku UMKM yang sudah naik kelas dan yang belum. Pelaku usaha bisa memberikan informasi agar pemerintah mengetahui perkembangan UMKM di Jepara, sehingga nantinya dukungan permodalan dapat diberikan secara tepat,” jelas Samiadji.

Dalam kesempatan itu, dia juga mendorong adanya fasilitasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di sela kegiatan pelatihan UMKM. Menurutnya, pembuatan NIB dilakukan secara gratis dan perlu dipermudah, agar seluruh pelaku usaha memiliki legalitas usaha.

“Harapannya, Diskop UKM Nakertrans Jepara dapat memedomani kebijakan ini, sehingga para pelaku usaha mendapatkan izin usaha secara gratis dan lebih mudah,” tambahnya.

Pemkab Pati Dorong Percepatan Investasi dan Pelayanan Publik

Selasa, 26 Mei 2026

Yandip Jateng, Penulis: Kontributor Kab Pati, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-pati-dorong-percepatan-investasi-dan-pelayanan-publik/>

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati terus mendorong peningkatan realisasi investasi daerah, melalui berbagai sektor strategis. Salah satunya, mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah investor yang tertarik berinvestasi di Kabupaten Pati, yakni pada sektor pelabuhan perikanan.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Rapat Koordinasi Evaluasi Gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Rapat Koordinasi Tim Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Pati, di Ruang Kembang Joyo Setda kabupaten setempat, Senin (25/5/2026). Menurutnya, mereka adalah gabungan investor dari Tiongkok, yang berencana membangun pelabuhan kapal ikan di Pelabuhan Ujung, Kecamatan Juwana.

“Ini sesuatu yang menggembirakan bagi perikanan Kabupaten Pati, karena mereka tidak hanya membangun infrastruktur terkait pelabuhan kapal, tetapi juga menerima hasil dari perikanan Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Tingginya minat investor untuk masuk ke Kabupaten Pati, lanjutnya, harus diimbangi dengan kesiapan pelayanan publik, khususnya melalui Mal Pelayanan Publik dan Satgas Percepatan Investasi.

“Jadi banyak yang ingin berinvestasi di Kabupaten Pati, makanya kesiapan dari mal pelayanan publik itu sangat penting, dan harapan kami, satgas ini bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Disampaikan, pihaknya juga berkomitmen mempermudah pelayanan perizinan investasi, mulai dari persetujuan penggunaan gedung (PPG), analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), hingga dokumen pendukung lainnya, agar para investor merasa nyaman dan terlayani saat berinvestasi di Kabupaten Pati.

“Saya kira jika mereka terlayani dengan baik, mereka akan menularkan dan menginformasikan ke teman-teman perusahaan yang lain, untuk berinvestasi di Kabupaten Pati,” ungkap Chandra.

Melalui berbagai peluang investasi tersebut, pihaknya optimistis, target investasi daerah pada 2026 dapat tercapai dengan baik.

AS Segera Cairkan Uang Refund Tarif Rp367 T ke Para Importir

Rabu, 27 Mei 2026 11:30 WIB

Laura Curtis and Zoe Tillman

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/110195/as-segera-cairkan-uang-refund-tarif-rp367-t-ke-para-importir/2>

Bloomberg, Sekitar US\$20,6 miliar (sekitar Rp366,87 triliun) sedang dalam proses pencairan menuju importir yang berhasil mengajukan klaim menggunakan portal web baru yang dikembangkan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (AS), kata lembaga tersebut pada Selasa (26/5/2026) dalam pengajuan pengadilan.

Namun, deklarasi terbaru pemerintah kepada Pengadilan Perdagangan Internasional AS juga mencakup pengakuan kesalahan signifikan dalam laporan terakhirnya kepada hakim federal yang mengawasi

proses pengembalian tarif, yang menunjukkan bahwa nilai pengembalian dana yang diproses pada pekan-pekan awal program jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Dua pekan lalu, seorang pejabat perdagangan AS mengatakan bahwa lebih dari US\$35,5 miliar klaim pengembalian dana sedang diproses.

Namun, angka itu "dilebih-lebihkan sekitar US\$10 miliar," menurut Brandon Lord, direktur eksekutif program perdagangan untuk Kantor Perdagangan CBP. Jumlah sebenarnya mendekati US\$25 miliar.

"Ini bukan cerminan dari kesalahan apa pun dalam pemrosesan atau pengembalian dana CAPE, melainkan hasil dari kesalahan yang tidak disengaja dalam kueri data yang digunakan untuk menghitung angka tersebut," kata Lord, merujuk pada Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE), yang dikembangkan setelah keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan sebagian besar tarif Presiden Donald Trump.

Sekitar US\$85 miliar dalam pengembalian dana potensial dan bersertifikat telah diterima untuk diproses di CAPE hingga 22 Mei, tulisnya. Angka US\$20,6 miliar mencerminkan uang yang telah mencapai tahap akhir pencairan kepada importir.

Lord mengatakan bahwa angka tersebut mencakup bunga serta jumlah dasar dalam tarif, tetapi tidak menyertakan rincian dari kedua jumlah tersebut.

CBP sedang dalam proses menerbitkan pengembalian dana kepada importir yang membayar hingga US\$166 miliar di lebih dari 53 juta entri impor.

Upaya ini diawasi oleh Pengadilan Perdagangan Internasional, yang telah meminta pembaruan berkala dari lembaga tersebut.

Menurut pembaruan Selasa, hampir 16 juta entri dengan bea masuk yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Darurat Ekonomi Internasional, atau IEEPA, telah diterima dalam fase pertama upaya pengembalian dana, dan 8,5 juta di antaranya telah diproses ulang tanpa bea masuk dan disertifikasi untuk pembayaran kembali kepada importir.

Lord juga mencatat dalam pengajuan hari Selasa bahwa lebih dari 4.000 pembayaran pengembalian dana gabungan belum dikirim ke Departemen Keuangan karena importir belum menyiapkan kemampuan pembayaran digital.

Selandia Baru Masih Tahan Bunga di 2,25%, Tapi Potensi Kenaikan Bunga Tak Terelakkan

Rabu, 27 Mei 2026 11:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

https://internasional.kontan.co.id/news/selandia-baru-masih-tahan-bunga-di-225-tapi-potensi-kenaikan-bunga-tak-terelakkan#goog_rewarded

KONTAN.CO.ID - WELLINGTON. Sinyal kenaikan suku bunga Selandia Baru ke depan semakin menguat, usai bank sentral negara ini mempertahankan suku bunga. Ini terlihat dari hasil rapat petinggi Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Rabu (27/5/2026).

Reuters melaporkan, RBNZ mempertahankan suku bunga acuan tetap di 2,25%. Tapi hasil pemungutan suara terpecah. Ini menunjukkan petinggi bank sentral juga menilai suku bunga perlu dinaikkan lebih cepat dan lebih besar untuk mengatasi guncangan energi yang melanda ekonomi global

Menurut pernyataan RBNZ, tiga anggota memilih menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Sementara tiga lainnya memilih mempertahankan suku bunga tetap.

Gubernur RBNZ Anna Breman yang memberikan suara penentu terakhir memilih mempertahankan suku bunga. Ini dilaporkan sebagai suara penentu pertama sejak komite kebijakan moneter dibentuk pada 2019 silam.

"Secara keseluruhan, suku bunga acuan kemungkinan besar perlu dinaikkan lebih cepat dan lebih besar dari yang diperkirakan dalam Pernyataan Kebijakan Moneter Februari," kata pejabat RBNZ dalam pernyataan resmi, seperti dikutip Reuters, Rabu (27/5/2026).

RBNZ menaikkan suku bunga terminalnya menjadi 3,28% selama periode perkiraan tiga tahun, dari proyeksi 3,0% yang dibuat sebelumnya, menunjukkan kenaikan sebesar 100 basis poin. Konsensus pelaku pasar kini memprediksi RBNZ berpeluang menaikkan suku bunga setidaknya dua kali lagi hingga akhir tahun.

Kepala Ekonom ASB Bank Nick Tuffley menilai, kebijakan tersebut adalah tindakan penyeimbangan bagi RBNZ. Ia menganalisa, mempertahankan suku bunga terlalu rendah terlalu lama berisiko memicu inflasi dan memaksa kenaikan yang lebih tajam di kemudian hari.

Meskipun saat ini pendapat para petinggi RBNZ masih terpecah, Tuffley memperkirakan suara akan condong ke arah kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan berikutnya di Juli.

Capital Economics juga memperkirakan RBNZ akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan. Abhijit Surya, Ekonom Senior Asia Capital Economics, mengatakan, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga lebih cepat.

RBNZ telah memangkas suku bunga sebesar 325 basis poin sejak Agustus 2024, setelah memperketat kebijakan moneter di masa pandemi dan pasca pandemi. Perhitungan itu sekarang bergeser, dengan inflasi berjalan di angka 3,1% selama dua kuartal berturut-turut, berada di atas kisaran target bank sentral sebesar 1% hingga 3%.

Ada tanda-tanda bahwa ekspektasi inflasi jangka pendek akan makin tinggi karena gangguan pasokan minyak global yang disebabkan oleh perang terus berlanjut. RBNZ sekarang memperkirakan inflasi akan naik menjadi 4,3% pada kuartal yang berakhir di September.

RBNZ juga memperkirakan angka pengangguran, yang berada di dekat level tertinggi dalam satu dekade di 5,3%, akan mencapai puncaknya di 5,4% dan bertahan di level ini hingga Juni 2027. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap lemah tanpa pertumbuhan pada kuartal kedua dan hanya ekspansi kecil sebesar 0,2% secara kuartalan pada kuartal ketiga.

Wall Street Bergerak Mixed di Tengah Ketegangan Timur Tengah dan Kebijakan The Fed

Rabu, 27 Mei 2026 21:45 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://investasi.kontan.co.id/news/wall-street-bergerak-mixed-di-tengah-ketegangan-timur-tengah-dan-kebijakan-the-fed>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa saham Amerika Serikat (AS) bergerak terbatas pada perdagangan Rabu (27/5/2026), di tengah sikap hati-hati investor yang menantikan perkembangan negosiasi geopolitik di Timur Tengah serta arah kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).

Sentimen pasar juga dipengaruhi oleh laporan bahwa Iran melalui televisi pemerintahnya menyatakan telah memperoleh rancangan kerangka kesepakatan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut disebut dapat membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dalam waktu satu bulan, dengan imbalan penarikan militer AS serta pencabutan blokade laut.

Pasar Bergerak Choppy, Investor Tunggu Arah Geopolitik dan The Fed

Pada pukul 09:57 waktu New York, indeks utama Wall Street menunjukkan pergerakan yang beragam. Dow Jones Industrial Average naik 174,37 poin atau 0,35% menjadi 50.642,33. S&P 500 hanya menguat tipis 2,37 poin atau 0,03% ke level 7.521,49. Sementara itu, Nasdaq Composite justru turun 3,30 poin atau 0,01% ke 26.651,99.

Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berada di zona hijau, dengan sektor consumer discretionary memimpin penguatan sebesar 1,4%. Namun, sektor energi S&P 500 melemah 1,5% seiring penurunan harga minyak, sementara sektor teknologi turun 0,2% setelah sebelumnya mencetak rekor tertinggi pada sesi perdagangan sebelumnya.

Kekhawatiran Pasar Setelah Musim Laporan Keuangan

CEO sekaligus CIO Laffer Tengler Investments, Nancy Tengler, menyoroti potensi meningkatnya volatilitas pasar setelah musim laporan keuangan berakhir.

“Kami sedikit khawatir bahwa pasar akan menguji kekuatannya setelah musim laporan keuangan benar-benar selesai. Kemudian akan terjadi kekurangan aliran berita, sehingga pasar akan mengalihkan perhatian ke The Fed dan Timur Tengah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran investor terhadap minimnya katalis baru di pasar, yang berpotensi meningkatkan sensitivitas terhadap data ekonomi dan risiko geopolitik.

Saham Teknologi dan Semikonduktor Masih Jadi Motor Utama Meskipun indeks bergerak terbatas, sektor teknologi tetap menjadi pendorong utama reli pasar dalam beberapa waktu terakhir. Indeks S&P 500 dan Nasdaq sebelumnya ditutup di level rekor, didorong oleh momentum saham berbasis kecerdasan buatan (AI). Saham Micron Technology bahkan menembus kapitalisasi pasar USD 1 triliun.

Saham perusahaan tersebut naik 3,8%, sementara pesaingnya seperti Western Digital dan Seagate Technology masing-masing menguat 2,5% dan 3,2%.

Namun, indeks Philadelphia Semiconductor tercatat turun 0,7%, dengan saham Nvidia melemah 1,7%.

Proyeksi The Fed dan Data Inflasi Jadi Fokus

Pelaku pasar kini menantikan rilis data Personal Consumption Expenditures (PCE) pada hari Kamis, yang merupakan indikator inflasi utama The Fed. Data ini akan menjadi petunjuk penting bagi arah kebijakan moneter di bawah kepemimpinan baru.

Saat ini, pasar uang memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga hingga akhir tahun, meski sebagian kecil pelaku pasar mulai mempertimbangkan kemungkinan kenaikan 25 basis poin pada Desember.

Pergerakan Saham Individu: Zscaler Anjlok, Bath & Body Works Melonjak

Sejumlah saham mencatat pergerakan tajam:

- Zscaler turun 30% setelah proyeksi pendapatan kuartal keempat berada di bawah ekspektasi.
- GlobalFoundries melemah 9% akibat laporan rencana penjualan saham oleh pemegang mayoritas Mubadala Investment Company senilai USD 1,91 miliar.

- Bath & Body Works melonjak 16,5% setelah mencatat penjualan dan laba kuartal pertama di atas perkiraan.

Secara keseluruhan, jumlah saham yang menguat masih lebih banyak dibanding yang melemah dengan rasio 1,31 banding 1 di NYSE dan 1,15 banding 1 di Nasdaq.

Indeks S&P 500 mencatat 29 saham menyentuh level tertinggi dalam 52 minggu, sementara Nasdaq Composite mencatat 106 saham di level tertinggi dan 44 di level terendah.

Safe Haven Diburu Investor, Dolar AS hingga Yen Jepang Menguat

Rabu, 27 Mei 2026 18:02 WIB

Reporter: Vatrisha Putri Nur, Editor: Handoyo

<https://investasi.kontan.co.id/news/safe-haven-diburu-investor-dolar-as-hingga-yen-jepang-menguat>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi bersamaan dengan menguatnya mata uang safe haven seperti yen Jepang (JPY) dan franc Swiss (CHF) mencerminkan tingginya kehati-hatian investor terhadap ketidakpastian global.

Melansir Trading Economics pada Rabu (27/5/2026) pukul 16.35 WIB, indeks dolar AS atau DXY berada di level 99,076. Sejalan dengan itu, mata uang yen Jepang berada di kisaran 159,35 per dolar AS atau menguat 0,17% dalam sebulan. Begitu pula mata uang franc Swiss yang juga menguat sekitar 0,44% dalam sebulan terakhir menjadi 0,785 per dolar AS.

Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, berpandangan prospek masing-masing mata uang masih dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga AS, kondisi ekonomi global, hingga perkembangan harga minyak dunia.

“Yen memang masih cenderung lemah dan akan terus tertekan oleh prospek suku bunga. DXY sendiri rebound hari ini walaupun belum signifikan,” ujar Lukman kepada Kontan, Rabu (27/5/2026).

Menurut dia, yen Jepang masih menghadapi tekanan akibat perbedaan suku bunga yang cukup lebar antara Jepang dan AS. Kondisi tersebut membuat aset berdenominasi dolar AS tetap menarik di mata investor. Apalagi, sepanjang tahun berjalan yen Jepang tercatat telah melemah sekitar 10% secara tahunan atau year on year (YoY).

Meski demikian, Lukman menilai yen masih memiliki peluang untuk menguat ketika pasar memasuki fase risk-off. Situasi ini biasanya terjadi saat ketidakpastian ekonomi maupun geopolitik meningkat sehingga investor mencari aset yang dianggap aman.

Sementara itu, franc Swiss yang selama ini dikenal sebagai salah satu mata uang safe haven pilihan investor, juga menghadapi tantangan dari sisi kebijakan domestik. Lukman menilai bank sentral Swiss atau Swiss National Bank (SNB) cenderung tidak menginginkan penguatan CHF yang terlalu besar.

“CHF walaupun memang merupakan safe haven pilihan investor, namun kebijakan bank sentral Swiss (SNB) sendiri tidak begitu mendukung. Pejabat SNB telah berulang kali mengisyaratkan kemungkinan melemahkan CHF jika nilainya terlalu kuat,” jelasnya.

Walaupun demikian, Lukman melihat franc Swiss masih relatif stabil dan defensif berkat fundamental ekonomi Swiss yang kuat. Faktor tersebut membuat CHF tetap menarik sebagai instrumen lindung nilai di tengah volatilitas pasar global.

Di sisi lain, dolar AS diperkirakan masih memiliki peluang mempertahankan penguatan apabila suku bunga AS tetap berada di level tinggi atau kembali meningkat. Kondisi tersebut dinilai akan menjaga daya tarik dolar AS sebagai salah satu aset utama pilihan investor global sepanjang tahun ini.

Secara umum, prospek USD, JPY, dan CHF hingga akhir tahun masih sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter AS, tensi geopolitik global, serta dinamika harga energi dunia.

Lukman menambahkan, apabila gangguan di kawasan Timur Tengah terus berlanjut, termasuk asumsi penutupan Selat Hormuz, maka tekanan terhadap pasar keuangan global berpotensi meningkat dan kembali mendorong permintaan terhadap aset safe haven.

Dengan asumsi tersebut, ia memproyeksikan indeks dolar AS (DXY) berada di kisaran 98–100 hingga semester I 2026. Sementara itu, pasangan USD/JPY diperkirakan bergerak pada level 155–160 dan USD/CHF berada di rentang 0,7800–0,7900.

Rupiah Melemah Jadi Rp 17.801 per Dolar AS, Pasar Soroti Kebijakan Ekspor Lewat DSI

Rabu, 27 Mei 2026 17:09 WIB

Reporter: Vandy Yhulia Susanto, Editor: Handoyo

<https://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-melemah-jadi-rp-17801-per-dolar-as-pasar-soroti-kebijakan-ekspor-lewat-dsi>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada perdagangan Rabu (27/5/2026). Tekanan terhadap mata uang Garuda dipengaruhi sentimen eksternal dan kekhawatiran pasar terhadap kebijakan sentralisasi ekspor komoditas utama yang tengah menjadi sorotan lembaga pemeringkat internasional.

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot melemah 0,03% secara harian ke level Rp 17.801 per dolar AS. Pelemahan ini melanjutkan tren negatif sehari sebelumnya.

Sebelumnya pada Selasa (26/5/2026), rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,30% secara harian di level Rp 17.796 per dolar AS.

Analisis Mata Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, kebijakan satu pintu untuk ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu kekhawatiran pelaku pasar dan lembaga pemeringkat global. Menurutnya, langkah pemerintah dalam melakukan sentralisasi ekspor komoditas utama dinilai berpotensi menimbulkan gangguan terhadap mekanisme perdagangan.

Ia menjelaskan, lembaga pemeringkat internasional seperti S&P menyoroti implementasi kebijakan tersebut yang dianggap tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, risiko gangguan rantai perdagangan juga meningkat apabila pelaksanaannya tidak berjalan optimal.

Sementara itu, Moody's turut memberikan perhatian terhadap potensi perubahan pola perdagangan akibat kebijakan tersebut. Perubahan mekanisme pasar dinilai dapat memicu ketidakseimbangan baru di sektor perdagangan dan arus modal.

“Ini membuat masalah tersendiri sehingga wajar arus modal asing keluar dari Indonesia. Ini yang membuat rupiah melemah dalam perdagangan hari ini,” ujar Ibrahim kepada Kontan, Rabu (27/5/2026).

Selain faktor domestik, pasar juga masih mencermati perkembangan geopolitik global, khususnya eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang turut meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven seperti dolar AS.

Menurut Ibrahim, kombinasi sentimen kebijakan ekspor dan tensi geopolitik global diperkirakan masih akan membayangi pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

Ibrahim memperkirakan rupiah pada perdagangan Kamis (28/5/2026) akan bergerak di kisaran Rp 17.790 hingga Rp 17.850 per dolar AS.

Pelemahan Rupiah Berlanjut, Dolar AS Jadi Favorit untuk Simpan Valas

Rabu, 27 Mei 2026 19:55 WIB

Reporter: Vatrisha Putri Nur, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://investasi.kontan.co.id/news/pelemahan-rupiah-berlanjut-dolar-as-jadi-favorit-untuk-simpan-valas>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelemahan rupiah yang terus berlanjut membuat investor domestik mulai mempertimbangkan mencari alternatif aset valuta asing (valas) untuk menjaga nilai kekayaan (hedging).

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot melemah 0,03% secara harian ke level Rp 17.801 per dolar AS pada Rabu (27/5/2026). Sepanjang tahun berjalan, rupiah sudah melemah cukup dalam, kisaran 6,8% YTD.

Sejalan dengan itu, rupiah juga melemah tajam terhadap terhadap dolar Selandia Baru (NZD) sebesar 8,89%, franc Swiss (CHF) sebesar 7,78%, dan dolar Singapura (SGD) sekitar 7,50%. Sementara terhadap dolar Amerika Serikat (USD), rupiah tercatat melemah 6,71% sepanjang tahun berjalan. Tekanan terhadap rupiah juga terlihat terhadap poundsterling Inggris (GBP) sebesar 6,72%, dolar Kanada (CAD) 6,06%, serta euro sekitar 5,59%.

Di kawasan Asia, pelemahan rupiah paling besar terjadi terhadap yuan China (CNY) sebesar 10,07% YTD. Rupiah juga tertekan terhadap ringgit Malaysia (MYR) sebesar 9,25%, dolar Singapura (SGD) 7,52%. Adapun terhadap yen Jepang (JPY), rupiah melemah sekitar 5,02% secara YTD, sedangkan terhadap peso Filipina (PHP) pelemahannya mencapai 2,14%.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, berpandangan dolar AS masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam berinvestasi valas. Menurutnya, kecenderungan tersebut tercermin dari besarnya porsi dana masyarakat yang mulai dialihkan ke tabungan valas.

Diketahui Bank Indonesia (BI) mencatat simpanan valas perbankan tumbuh 8,6% secara tahunan menjadi Rp 2.338,6 triliun per Maret 2026. Tabungan menjadi yang paling masif tumbuh, mencapai 24,4% secara year on year (yoy) menjadi Rp 242,9 triliun.

“Sebenarnya masyarakat Indonesia, kalau dilihat dari tabungan, dari data Bank Indonesia itu sekitar 24% sudah dipindahkan ke valas. Kebanyakan ditempatkan pada dolar AS karena masyarakat menilai dolar paling kuat,” ujar Ibrahim kepada Kontan, Rabu (27/5/2026).

Ia mengatakan, dominasi dolar AS juga dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk di masyarakat bahwa pelemahan rupiah hampir selalu dikaitkan dengan penguatan dolar. Kondisi ini mendorong investor lebih memilih membuka tabungan dolar dibanding mata uang lain.

Menurut Ibrahim, pasangan USD/IDR masih berpotensi melanjutkan penguatan seiring tekanan terhadap rupiah yang belum mereda. Bahkan, apabila kurs dolar AS menembus level Rp 18.000,

peluang menuju Rp 20.000 masih terbuka. Tapi semua akan tergantung kondisi geopolitik di Timur Tengah.

Ia menjelaskan, ketegangan geopolitik masih menjadi faktor utama yang memengaruhi arah pasar. Meski terdapat upaya negosiasi antara AS dan Iran, persoalan terkait program uranium dinilai masih menyisakan ketidakpastian.

Selain dolar AS, Ibrahim melihat dolar Singapura terhadap rupiah (SGD/IDR) juga cukup menarik sebagai alternatif investasi valas. Menurutnya, fundamental ekonomi Singapura yang kuat serta tingginya mobilitas masyarakat Indonesia ke negara tersebut menjadi faktor pendukung.

Sementara itu, yen Jepang terhadap rupiah (JPY/IDR) dinilai mulai banyak dilirik karena dianggap lebih murah. Pasangan JPY/IDR disebut mulai dijadikan salah satu opsi diversifikasi investasi oleh masyarakat.

Ibrahim juga menyoroti yuan China terhadap rupiah (CNY/IDR). Ia menilai pelemahan yuan berpotensi berlanjut, salah satunya dipengaruhi ketidakpastian perdagangan global dan risiko gangguan distribusi energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Meski saat ini valas di atas cenderung sudah mahal jika investor domestik memegang dana berupa rupiah, tetapi peluang keuntungan dari investasi valas masih terbuka. Namun, Ibrahim mengingatkan investor ritel untuk berhati-hati melakukan akumulasi pada level saat ini. Menurut dia, kurs yang sudah tinggi meningkatkan risiko koreksi harga dalam jangka pendek.

“Kalau saat ini USD/IDR berada di Rp 17.700-Rp 17.800, investor perlu berhati-hati. Jangan sampai masuk di harga tinggi lalu terkena koreksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, momentum masuk yang lebih ideal dapat dipertimbangkan apabila USD/IDR kembali turun ke kisaran Rp 17.500 per dolar AS. Karena itu, investasi valas sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berorientasi jangka panjang.

Saat ini, pairing valas USD/IDR berada di level 17.801. Kemudian pairing CNY/IDR di kisaran 2.621, lalu JPY/IDR berada di level 111,72. Sementara SGD/IDR saat ini di level 13.928.

Untuk semester I 2026, Ibrahim memproyeksikan pasangan USD/IDR bergerak menuju level 18.300. Sementara SGD/IDR diperkirakan mencapai 14.500, JPY/IDR berada di kisaran 150,50, dan CNY/IDR berpotensi menuju 2.850.

Ekonom Beber Faktor Pemberat Rupiah Meski BI Rate Naik

Rabu, 27 Mei 2026 12:30 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/110196/ekonom-beber-faktor-pemberat-rupiah-meski-bi-rate-naik/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Nilai tukar rupiah terus mencatatkan perlemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Pada sesi perdagangan siang ini, Selasa (26/5/2026) pukul 12:56 WIB, mata uang Ibu Pertiwi terdepresiasi 0,27% ke Rp17.791/US\$.

Anjloknya rupiah ini terjadi di tengah berbagai usaha bank sentral yang sudah melakukan berbagai intervensi termasuk menaikkan suku bunga BI hingga 50 basis poin menjadi 5,25%.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede mengatakan bahwa inti permasalahan rupiah saat ini tidak hanya ditentukan oleh suku bunga. Toh, suku bunga hanya jadi salah satu instrumen penahan jatuhnya mata uang Garuda.

“Tekanan rupiah lebih kuat karena sumber tekanannya datang bersamaan dari harga minyak tinggi, dolar AS yang masih kuat, imbal hasil obligasi AS yang tinggi, kebutuhan dolar domestik, arus modal yang mudah keluar, serta kekhawatiran pasar terhadap fiskal dan arah kebijakan,” kata Josua kepada Bloomberg Technoz, Rabu, 27 Mei 2026.

Menurut Josua, faktor pertama yang paling mendasar adalah tekanan global, khususnya konflik Timur Tengah dan harga energi. Penutupan Selat Hormuz masih membuat distribusi energi global belum sepenuhnya normal, sehingga harga minyak tetap tinggi dan volatil.

“Kondisi ini menekan rupiah karena Indonesia adalah pengimpor bersih minyak dan LPG, sehingga kenaikan harga energi langsung memperbesar kebutuhan dolar untuk impor,” kata Josua.

Sementara itu, Josua menyebut bahwa di sisi pasar global, kenaikan harga minyak juga membuat inflasi global lebih tinggi, mendorong ekspektasi suku bunga global tetap tinggi, dan memperkuat dolar AS.

Konflik Timur Tengah menekan Asia melalui harga energi, gangguan rantai pasok, kondisi keuangan yang lebih ketat, dan pelemahan arus pendapatan luar negeri.

Sementara itu, faktor kedua yang menjadi pemberat rupiah adalah kebutuhan dolar domestik yang meningkat, terutama pada kuartal II.

“Tekanan April sampai Juli biasanya lebih besar karena pembayaran dividen, pembayaran utang luar negeri, kebutuhan impor energi, serta kebutuhan valas untuk kegiatan haji,” lanjutnya.

Karenanya, menurut Josua meskipun BI Rate dinaikkan, permintaan dolar riil tetap ada. Dalam kondisi normal, kenaikan suku bunga bisa membantu menarik dana asing dan menahan rupiah.

Namun, ketika tekanan berasal dari kebutuhan dolar nyata, bukan sekadar spekulasi, maka kenaikan suku bunga tidak cukup untuk langsung membalikkan rupiah.

“Data cadangan devisa April 2026 yang turun dari 148,2 miliar dolar AS menjadi 146,2 miliar dolar AS juga menunjukkan bahwa BI sudah menggunakan sebagian bantalan untuk stabilisasi rupiah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, meskipun posisinya masih tinggi setara 5,8 bulan impor,” katanya.

Faktor ketiga adalah tekanan neraca eksternal. Neraca Pembayaran Indonesia triwulan I 2026 menunjukkan transaksi berjalan masih rentan karena surplus barang menyempit dan kebutuhan impor tetap tinggi.

“Ini penting karena pasar tidak hanya melihat cadangan devisa hari ini, tetapi juga menilai apakah pasokan devisa ke depan cukup kuat untuk mengimbangi kebutuhan impor, pembayaran utang, dan arus keluar portofolio,” kata Josua.

Menurutnya, jika ekspor belum cukup kuat sementara impor energi dan bahan baku meningkat, tekanan terhadap rupiah akan tetap ada. Dalam kondisi seperti ini, rupiah bisa tetap melemah meskipun suku bunga sudah dinaikkan, karena pasar menilai tekanan valuta asing berasal dari struktur neraca eksternal, bukan hanya dari tingkat bunga.

Faktor keempat yang menjadi pemberat rupiah adalah sentimen pasar terhadap kebijakan dan aset Indonesia. Pelemahan rupiah beberapa waktu terakhir terjadi bersamaan dengan tekanan di pasar saham dan obligasi, termasuk akibat sentimen MSCI, kekhawatiran terhadap defisit fiskal, dan kenaikan imbal hasil SBN.

“Bloomberg mencatat rupiah sempat jatuh ke rekor terendah ketika pasar dibuka kembali, sementara IHSG melemah dan imbal hasil SBN 10 tahun naik. Ini menunjukkan tekanan rupiah bukan hanya soal kurs, tetapi soal kepercayaan investor terhadap aset rupiah secara keseluruhan,” katanya

Menurutnya, jika investor asing mengurangi saham dan obligasi, hasil penjualan aset rupiah dapat dikonversi ke dolar, sehingga menambah tekanan valuta asing.

Menurutnya upaya memperkuat rupiah harus dilakukan melalui kombinasi kebijakan, bukan hanya menaikkan BI Rate.

“Dari sisi BI, intervensi di pasar valas tetap diperlukan, tetapi harus terukur agar cadangan devisa tidak cepat terkuras. BI juga perlu menjaga daya tarik aset rupiah melalui SRBI, SVBI, SUVBI, DNDF, operasi pasar valas, dan stabilisasi SBN di pasar sekunder,” katanya.

Sementara dari sisi fiskal, penguatan rupiah harus dilakukan melalui peningkatan pasokan devisa dan penguatan kepercayaan fiskal.

IDEAS Prediksi Perputaran Ekonomi Kurban Sentuh Rp 26,89 Triliun

Rabu, 27 Mei 2026 20:04 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://industri.kontan.co.id/news/ideas-prediksi-perputaran-ekonomi-kurban-sentuh-rp-2689-triliun>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) memperkirakan nilai ekonomi kurban pada Lebaran Haji tahun ini mencapai Rp 26,89 triliun. Meski masih besar, nilainya diproyeksikan menurun dibanding tahun sebelumnya seiring perubahan pola konsumsi masyarakat dalam berkurban.

Peneliti IDEAS, Tira Mutiara mengatakan potensi ekonomi kurban tersebut berasal dari sekitar 1,90 juta rumah tangga pekurban dengan estimasi total hewan kurban sebanyak 1,59 juta ekor.

Menurut Tira, jumlah hewan kurban tahun ini diperkirakan terdiri dari sekitar 493 ribu ekor sapi dan 1,09 juta ekor kambing maupun domba.

“Simulasi juga mempertimbangkan preferensi jenis dan bobot hewan kurban, mulai dari sapi utuh hingga skema patungan satu per tujuh sapi serta kambing dan domba dengan berbagai kategori bobot,” ujar Tira dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

IDEAS mencatat, nilai ekonomi kurban tahun ini sedikit melemah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 27,10 triliun. Penurunan diperkirakan terjadi akibat berkurangnya jumlah rumah tangga pekurban serta menurunnya preferensi terhadap hewan berbobot besar.

Tira mengatakan masyarakat kini cenderung memilih hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau di tengah tekanan ekonomi domestik.

“Masyarakat tetap berupaya mempertahankan ibadah kurban, tetapi cenderung memilih hewan dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat mulai tertekan akibat kenaikan harga pangan, biaya hidup, dan harga ternak dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Tira, pertumbuhan ekonomi nasional yang masih tumbuh di atas 5% belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas kurban karena pertumbuhan tersebut tidak langsung meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk berkorban.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata,” ujarnya.

Di sisi lain, IDEAS menilai ibadah kurban tetap memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar karena memperluas akses konsumsi protein hewani bagi masyarakat miskin dan rentan.

Namun, persoalan utama dalam pelaksanaan kurban masih berkaitan dengan ketimpangan distribusi daging antarwilayah. IDEAS mencatat masih banyak daerah yang mengalami defisit distribusi daging kurban, sementara surplus terbesar terkonsentrasi di wilayah perkotaan Jawa.

Menurut Tira, masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan ekonomi nasional. Daerah dengan pendapatan tinggi dan konsentrasi kelas menengah atas Muslim cenderung menjadi pusat surplus kurban, sedangkan wilayah miskin dan terpencil mengalami kekurangan distribusi daging.

Karena itu, IDEAS mendorong pemerintah memperkuat tata kelola distribusi kurban melalui pembangunan rumah potong hewan halal dan higienis, cold storage, gudang beku, kendaraan logistik berpendingin, hingga integrasi data nasional surplus dan defisit kurban.

“Perlu ada pemetaan daerah surplus dan defisit, pembangunan hub pemotongan terstandar, serta penguatan koordinasi antar lembaga agar distribusi daging kurban lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Tira.

IDEAS juga menilai konsep green kurban perlu diperkuat melalui pengurangan sampah plastik, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta optimalisasi pemotongan di rumah potong hewan modern agar distribusi lebih efisien dan higienis.

Kadin: Investor China Masih Minati RI, Tunggu Kepastian Deregulasi

Rabu, 27 Mei 2026 16:35 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://industri.kontan.co.id/news/kadin-investor-china-masih-minati-ri-tunggu-kepastian-deregulasi>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut investor asal China masih melihat Indonesia sebagai tujuan investasi strategis meski sebelumnya sempat menyampaikan keberatan atas sejumlah kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin, Erwin Aksa mengatakan, dialog antara pemerintah dan pelaku usaha, termasuk investor China, menjadi langkah positif untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan iklim usaha tetap kompetitif.

“Kadin memandang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha, termasuk investor asal China, merupakan langkah yang sangat positif untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan iklim usaha Indonesia tetap kompetitif di tengah dinamika global,” ujar Erwin kepada Kontan, Rabu (27/5/2026).

Menurut dia, dari komunikasi yang berlangsung, pemerintah pada prinsipnya menunjukkan keterbukaan untuk mendengar berbagai masukan dunia usaha. Masukan tersebut terutama terkait kepastian regulasi, perizinan, implementasi kebijakan teknis di lapangan hingga harmonisasi aturan antar kementerian dan pemerintah daerah.

Erwin bilang, dunia usaha berharap proses deregulasi dapat berjalan lebih cepat dan konsisten agar memberikan kepastian jangka panjang bagi investor.

Di sisi lain, investor China masih menilai Indonesia sebagai pasar dan basis produksi yang strategis karena memiliki pasar domestik besar, potensi hilirisasi sumber daya alam, serta posisi penting dalam rantai pasok kawasan ASEAN.

“Minat investasi masih cukup kuat, meskipun investor saat ini cenderung lebih selektif dan sangat memperhatikan aspek kepastian hukum, efisiensi birokrasi, energi, dan kesiapan infrastruktur,” katanya.

Adapun sejumlah sektor yang masih diminati investor China antara lain hilirisasi mineral, kendaraan listrik dan baterai, manufaktur, energi baru terbarukan, petrokimia, infrastruktur digital, pusat data, hingga industri pendukung logistik dan pelabuhan.

Erwin menilai, potensi investasi dari China masih sangat besar mengingat negara tersebut tetap menjadi salah satu sumber foreign direct investment (FDI) terbesar bagi Indonesia. Namun, persaingan menarik investasi antar negara di kawasan kini semakin ketat.

“Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan market size semata,” ujarnya.

Karena itu, Kadin mendorong pemerintah mempercepat paket deregulasi yang berfokus pada simplifikasi perizinan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, kepastian implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan aturan industri, efisiensi logistik, hingga percepatan layanan investasi.

Selain itu, kepastian timeline implementasi kebijakan juga dinilai penting agar investor dapat menyusun perencanaan bisnis dengan lebih jelas.

“Yang terpenting saat ini adalah menjaga momentum kepercayaan investor. Dunia usaha melihat pemerintah memiliki komitmen untuk mempertahankan daya tarik investasi Indonesia, namun implementasi di lapangan akan menjadi faktor yang paling menentukan,” tutupnya.

Ekspor Produk Sawit RI Turun 34,25% pada Maret 2026, Biaya Logistik Jadi Tekanan

Rabu, 27 Mei 2026 17:30 WIB

Reporter: Diki Mardiansyah, Editor: Handoyo

https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-produk-sawit-ri-turun-3425-pada-maret-2026-biaya-logistik-jadi-tekanan#goog_rewarded

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja ekspor industri kelapa sawit nasional mengalami tekanan pada Maret 2026. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat total ekspor produk sawit turun 34,25% secara bulanan menjadi 2,168 juta ton dibanding Februari 2026 sebesar 3,297 juta ton.

Penurunan ekspor terutama terjadi pada crude palm oil (CPO), olahan minyak sawit, dan olahan minyak inti sawit. Ekspor CPO anjlok 75,61% menjadi 96.000 ton dari sebelumnya 395.000 ton. Sementara ekspor olahan minyak sawit turun 33,57% menjadi 1,506 juta ton dan olahan minyak inti sawit turun 44,67% menjadi 94.000 ton.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, penurunan ekspor bukan semata dipicu melemahnya permintaan global, melainkan dampak kenaikan biaya logistik akibat situasi geopolitik global.

“Akibat perang biaya angkutan dan asuransi naik sampai 50%, ini menyebabkan ekspor turun,” ujar Eddy kepada Kontan, Rabu (27/5/2026).

Menurut dia, lonjakan ongkos pengiriman dan premi asuransi membuat biaya ekspor membengkak sehingga menekan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

Data GAPKI menunjukkan, penurunan ekspor pada Maret terjadi ke sejumlah negara tujuan utama seperti China turun 314.000 ton, India turun 291.000 ton, Pakistan turun 113.000 ton, Bangladesh turun 90.000 ton, serta kawasan Afrika turun 81.000 ton.

Penurunan juga terjadi ke kawasan Timur Tengah sebesar 77.000 ton, Malaysia 71.000 ton, United States 41.000 ton dan European Union 25.000 ton.

Meski demikian, secara kumulatif Januari–Maret 2026, ekspor produk sawit Indonesia masih tumbuh 11,91% secara tahunan menjadi 8,546 juta ton dibanding periode sama tahun lalu sebesar 7,637 juta ton.

Nilai ekspor sawit nasional juga meningkat 10,40% menjadi US\$ 9,66 miliar. Kenaikan tersebut ditopang oleh harga rata-rata CPO global yang mencapai US\$ 1.356 per ton CIF Rotterdam pada Januari–Maret 2026, lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu sebesar US\$ 1.230 per ton.

Dari sisi produksi, GAPKI mencatat produksi CPO pada Maret 2026 turun 12,22% menjadi 4,403 juta ton dari bulan sebelumnya sebesar 5,015 juta ton. Produksi palm kernel oil (PKO) juga turun menjadi 418.000 ton dari 485.000 ton.

Dengan demikian, total produksi CPO dan PKO pada Maret 2026 mencapai 4,821 juta ton atau turun 12,35% dibanding Februari 2026.

Sementara konsumsi domestik juga melemah 8,25% menjadi 2,115 juta ton. Penurunan terjadi pada konsumsi pangan, biodiesel, dan oleokimia.

Meski ekspor dan konsumsi turun, stok akhir sawit nasional justru meningkat menjadi 2,568 juta ton pada akhir Maret 2026, lebih tinggi dibanding stok akhir Februari sebesar 2,026 juta ton.

Terkait rencana keterlibatan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam ekspor sawit, Eddy bilang hingga kini belum ada sosialisasi rinci mengenai mekanisme pelaksanaannya.

“Seharusnya sampai Desember yang melaksanakan ekspor tetap perusahaan atau eksportir, jadi masih tidak ada masalah. Untuk Januari full oleh DSI, ini belum ada sosialisasi detailnya,” katanya.

Ia menambahkan, pelaku industri masih menunggu kejelasan tahapan implementasi kebijakan tersebut, termasuk skema transisi mulai Juni hingga Desember 2026 sebelum ekspor CPO sepenuhnya dikelola DSI pada 2027.

KEK Industropolis Batang Raih Komitmen Investasi Industri Hijau dari Hongaria

Rabu, 27 Mei 2026 08:54 WIB

Reporter: Dina Mirayanti Hutaaruk, Editor: Dina Hutaaruk

<https://industri.kontan.co.id/news/kek-inudstropolis-batang-raih-komitmen-investasi-industri-hijau-dari-hongaria>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. KEK Industropolis Batang semakin menunjukkan posisinya sebagai pusat industri berkelanjutan dan tujuan investasi internasional yang strategis di Asia Tenggara. Perusahaan ini berhasil menarik investasi strategis dari Hongaria dalam forum Indonesia-Hungary Investment and Business Forum 2026 di Budapest.

Investasi tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur energi surya skala besar dan sistem pengelolaan air modern untuk mendukung industri berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan ini didukung oleh kolaborasi antara KBRI Budapest, Sekretariat Dewan Nasional KEK, Kantor Staf Presiden (KSP), dan IIPC London. Selain itu, KEK Industropolis Batang dipromosikan sebagai pusat investasi potensial di sektor infrastruktur, farmasi, dan ekosistem kendaraan listrik.

Dari forum itu, KEK Industropolis Batang berhasil melakukan bekerja sama dengan investor asal Hongaria, yaitu Merlion Teck Ltd, untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100–200 megawatt (MW) di lahan seluas 200 hektare (ha).

Listrik dari PLTS ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan di kawasan industri melalui skema kerja sama Power Purchase Agreement (PPA) jangka panjang. Selain menyediakan energi bersih, proyek ini juga penting untuk menarik investor global yang kini semakin memperhatikan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG).

Selain itu, KEK Batang juga menggandeng Iconic Energy Kft dan Hungarian Water Partnership untuk menghadirkan teknologi pengolahan air bersih, pemantauan kualitas air, serta sistem pengelolaan limbah modern yang mengusung konsep ekonomi sirkular dan zero-waste. Artinya, limbah akan diolah kembali agar bisa dimanfaatkan dan mengurangi sampah yang terbang.

Melalui potensi pilot project pengelolaan air yang terintegrasi, KEK Industropolis Batang bersiap memberikan kepastian layanan utilitas kelas dunia yang selaras dengan kelestarian ekosistem lokal.

Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, menyatakan bahwa keberhasilan tersebut menjadi bukti pengakuan internasional atas kesiapan Batang dalam mengembangkan industri yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan. “Komitmen pembangunan PLTS skala besar dan teknologi utilitas air modern akan memperkuat ekosistem ramah lingkungan bagi para investor,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Capaian ini juga mendapat apresiasi dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menilai keberhasilan KEK Industropolis Batang di Hongaria menjadi standar baru daya saing kawasan ekonomi khusus di Indonesia.

Rizal menyebut keberhasilan mengubah forum bisnis menjadi komitmen investasi nyata sebagai bukti kuatnya dukungan regulasi dan fasilitas KEK dari pemerintah. “Pencapaian di Budapest memperkuat posisi Indonesia sebagai calon pemimpin ekonomi hijau dunia,” ujarnya.

Jaring Pengaman bagi 12,49 Juta Pekerja, DPRD Jateng Inisiasi Raperda Perlindungan Sektor Informal

Rabu, 27 Mei 2026 20:19 WIB

Penulis: iwan Arifianto, Editor: raka f pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1254696/jaring-pengaman-bagi-1249-juta-pekerja-dprd-jateng-inisiasi-raperda-perlindungan-sektor-informal>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Informal.

Raperda ini digagas sebagai respon atas tingginya pekerja informal Jateng yang mencapai 12,49 juta orang atau 58,50 persen dari total seluruh angkatan kerja.

Merespon usulan Raperda tersebut, sejumlah pekerja informal berharap jaminan sosial seperti BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan bisa ditanggung oleh negara.

"Seperti saya kerja ojek online, risiko di jalan besar sehingga negara perlu hadir memberikan jaminan sosial tersebut," ujar Ojek Online Perempuan di Semarang, Dewi Yulianti (49) kepada Tribunjateng.com, Rabu (27/5/2026).

Dewi sejauh ini memiliki kesadaran untuk melakukan iuran pribadi demi memiliki BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Ia sadar pekerjaannya di jalan sangat berisiko seperti ancaman kecelakaan dan kesehatan.

"Saya perbulan iuran mandiri habis Rp36.800 untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Rp35 ribu untuk kesehatan, itu yang paling murah," katanya.

Namun, kesadaran dirinya tidak semua dilakukan oleh ojol.

Ketua Komunitas Ladies Grab Semarang mengungkapkan, banyak ojol tidak menjadi peserta jaminan sosial karena secara penghasilan juga masih serba terbatas.

"Harusnya mereka mendapatkan jaminan itu dari pemerintah agar ketika terjadi sesuatu di jalan bisa tercover pembiayaannya," bebarnya.

Pekerja informal lainnya, Ivan Budi Ardiyansah mengaku, pesimistis dengan Raperda yang menyasar kelompok informal.

Ia yang bekerja sebagai ojek online ini menyebut, pemerintah dan maupun wakil rakyat sudah terlalu banyak aturan tapi realisasinya masih kurang.

"Terlalu banyak rencana, realisasinya tidak ada," ujarnya kepada Tribun.

Merujuk data BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jateng-DIY, per 21 Mei 2026, jumlah angkatan kerja di Jateng mencapai sekitar 19 juta pekerja.

Akan tetapi, hanya sekitar 5,58 juta tenaga kerja yang telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perkuat Perlindungan Pekerja Informal Jateng

Ketua Komisi E, Messy Widiastuti mengungkapkan, lebih dari 60 persen angkatan kerja di Jateng masih bekerja di sektor informal, meliputi pertanian, perdagangan kecil, jasa, transportasi hingga industri rumah tangga.

Para pekerja golongan tersebut, bekerja tanpa perlindungan resmi, tidak memiliki kontrak kerja tertulis, belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, hingga tidak memperoleh hak-hak dasar seperti cuti maupun tunjangan hari raya.

Mereka juga rawan mendapatkan perlakuan gaji tidak dibayar, upah lembur diabaikan hingga rawan mendapatkan pemutusan hubungan kerja.

"Maka, kami menginisiasi penyusunan Raperda yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi tenaga kerja informal" ungkapnya saat dihubungi Tribunjateng.com.

Ia mengungkapkan, penyusunan Raperda ini masih dalam tahapan penyusunan dan pengkajian.

"Kami juga akan melakukan kajian ke daerah yang sudah menerapkan perda serupa agar bisa dimasukkan ke perda di Jateng tersebut," paparnya.

Pekerja Informal Jateng Didominasi Lulusan SD

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz mengungkap, angka pekerja informal di Jateng yang mencapai 58,5 persen merupakan para pekerja dengan lulusan SD.

Struktur pendidikan tenaga kerja Jateng sendiri mayoritas merupakan lulusan SD sebesar 8,74 juta orang (40,9 persen), SMP 4,1 juta (19,2 persen), SMA 2,99 juta (14 persen), SMK 3,35 juta (15,7 persen), Diploma 0,42 juta (1,95 persen), Sarjana 8,25 juta (8,3 persen).

"Nah, konteksnya kalau tidak lulus SD atau lulus SD itu, itu kan banyak bekerja di sektor informal karena banyak sektor industri itu yang syarat minimal aja mayoritas harus berijazah SMA," terangnya.

Mengenai usulan perda itu, Aziz menyebut, tentu bakal mendukungnya.

Meskipun di sejumlah Pemerintah kabupaten/kota di Jateng telah memiliki aturan serupa yang melindungi para pekerja informal seperti ojol, nelayan, guru honorer, hingga takmir masjid.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah merilis Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah November 2025 pada Februari 2026.

Dalam dokumen itu, penduduk Jateng bekerja pada kegiatan informal sebanyak 12,49 juta orang (58,50 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 8,86 juta orang (41,50 persen) dari total angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada November 2025 terdiri dari 21,36 juta orang penduduk bekerja dan 0,97 juta orang pengangguran.

Berdasarkan hasil Sakernas November 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 26,07 persen; Industri Pengolahan sebesar 21,03 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,01 persen. (Iwn)

2.000 Pegawai Pabrik Plastik di Sragen Kehilangan Pekerjaan, Akibat Order Anjlok

Rabu, 27 Mei 2026 17:08 WIB

Penulis: iwan Arifianto, Editor: raka f pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1254676/2000-pegawai-pabrik-plastik-di-sragen-kehilangan-pekerjaan-akibat-order-anjlok>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah belum lama ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Combine Will Industrial Indonesia (CWII) di Sragen karena tidak memperpanjang hampir 2.000 karyawan kontrak.

Pabrik produk berbahan plastik itu beralih tidak memperpanjang kontrak ribuan buruh karena kenaikan harga bijih plastik dan terjadinya penurunan order.

"Ya kami sudah datang ke pabrik itu 18 Mei lalu, PT. CWII itu dengan karyawan berjumlah 10 ribu tidak memperpanjang kontrak itu hampir 2 ribu tenaga kerja yang habis kontrak pada bulan April dan Mei

ini," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah , Ahmad Aziz kepada Tribunjateng.com, Rabu (27/5/2026).

Melihat kondisi itu, Aziz meminta keterangan kepada pihak perusahaan lalu berusaha mencari solusi kepada para buruh yang tidak diperpanjang kontraknya.

Ia sendiri membantah bahwa perusahaan telah melakukan PHK massal.

Sebagai solusi, perusahaan menawarkan kontrak baru kepada para buruh yang diputus kontrak.

Namun, kontrak baru itu baru bisa diajukan pada bulan September 2026 mendatang.

"September itu order perusahaan naik, jadi membuka lagi lowongan, pekerja yang belum dapat pekerjaan itu akan dipanggil lagi" ujarnya.

Solusi lainnya, lanjut Aziz, pihaknya melakukan identifikasi lowongan pekerjaan di wilayah sekitaran Sragen yang hasilnya ada sebanyak 5.906 lowongan pekerjaan dari 18 perusahaan.

"Per tanggal 21 Mei lalu sudah ada hampir 800 eks karyawan PT. CWII yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai lowongan tersebut" terangnya.

Ia sendiri sudah mendapatkan instruksi dari Gubernur Jateng agar memfasilitasi para buruh yang diputus kontrak itu agar mendapatkan hak-haknya seperti uang kompensasi sesuai dengan hitungan yang telah ditentukan dan pencarian uang Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS ketenagakerjaan.

"Kami juga mendorong mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan kembali" bebernya.

Aziz mengakui, PT CWII tidak memperpanjang kontraknya karena kondisi ekonomi global yang berdampak pada kenaikan harga bijih plastik ditambah order perusahaan anjlok.

Namun, ia membantah kondisi global berdampak ke perusahaan lainnya di Jateng.

Sebaliknya, ia mengklaim, banyak perusahaan di Jateng justru terus membuka lowongan pekerjaan baru.

"Contohnya PT SCI (PT Selalu Cinta Indonesia, pabrik sepatu) Salatiga, itu baru buka lowongan kerja (menerima 1.000 pekerja) yang awalnya 18 ribu karyawan sekarang menjadi 19 ribu," ujarnya.

Ia menambahkan pula, hingga Mei 2026 ini sudah ada delapan kabupaten Kota di Jateng yang menyelenggarakan job fair dengan setiap pelaksanaan membuka kuota 3 ribu sampai 5 ribu lowongan kerja.

"Artinya, di Jateng banyak sektor yang membutuhkan tenaga kerja, belum lagi kesempatan di Kawasan Industri KITB Batang dan KIK Kendal," tambahnya. (Iwn)

Pejabat The Fed Waspada Risiko Inflasi dari Lonjakan Biaya Energi

Kamis, 28 Mei 2026 09:00 WIB

Enda Curran

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/110238/pejabat-the-fed-waspada-risiko-inflasi-dari-lonjakan-biaya-energi/2>

Bloomberg, Wakil Gubernur Federal Reserve (The Fed) Philip Jefferson memproyeksikan tingkat inflasi Amerika Serikat (AS) akan mulai mendingin pada akhir tahun ini. Hal itu diperkirakan terjadi

seiring mulai memudarnya dampak penerapan tarif serta lonjakan biaya energi. Kendati demikian, ia memperingatkan bahwa risiko inflasi secara umum masih cenderung bergerak naik.

Dalam naskah pidato yang dijadwalkan bakal disampaikan pada Kamis (28/5) dalam konferensi yang digelar Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BOJ) di Tokyo, Jefferson menyatakan bahwa dirinya tengah mengamati dengan cermat indikasi apakah tingginya biaya energi—yang dipicu oleh perang Iran—mulai menggerogoti daya beli masyarakat. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dirinya masih melihat tanda-tanda pelemahan pada sektor pasar tenaga kerja AS.

Jefferson kembali menegaskan pandangannya bahwa posisi kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral AS saat ini sudah sangat tepat untuk merespons segala bentuk perkembangan ekonomi yang terjadi.

Pada pertemuan bulan lalu, para pejabat The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan mereka tidak berubah di kisaran 3,5% hingga 3,75%.

"Saya yakin sikap kebijakan ini menempatkan kami pada posisi yang kuat untuk merespons setiap perkembangan ekonomi berdasarkan data terbaru yang masuk, prospek yang terus berkembang, serta keseimbangan risiko," ujar Jefferson. "Saya belum mengambil keputusan mendahului untuk pertemuan berikutnya dan sangat menantikan diskusi dengan rekan-rekan sejawat mengenai kebijakan apa yang paling diperlukan demi mencapai mandat ganda kami secara optimal."

Pertemuan The Fed yang dijadwalkan berlangsung pada 16–17 Juni akan menjadi rapat perdana yang dipimpin langsung oleh Gubernur Baru The Fed, Kevin Warsh.

Bank Sentral Korea Pertahankan Suku Bunga 2,50%, Waspadai Dampak Perang Iran

Kamis, 28 Mei 2026 08:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-korea-pertahankan-suku-bunga-250-waspadai-dampak-perang-iran>

KONTAN.CO.ID - Bank Sentral Korea Selatan atau Bank of Korea (BOK) memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya pada level 2,50% dalam rapat kebijakan moneter, Kamis (28/5/2026).

Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya risiko inflasi akibat perang Iran serta pelemahan mata uang won, meskipun pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menunjukkan penguatan.

Keputusan mempertahankan suku bunga itu sejalan dengan ekspektasi mayoritas ekonom. Dari 32 ekonom yang disurvei Reuters, sebanyak 30 memperkirakan BOK akan menahan suku bunga, sementara dua lainnya memprediksi kenaikan suku bunga.

BOK juga merevisi naik proyeksi inflasi tahun ini menjadi 2,7% dari sebelumnya 2,2%, dengan mempertimbangkan dampak kenaikan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah.

Selain itu, bank sentral turut menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun 2026 menjadi 2,6% dari sebelumnya 2,0%.

Revisi ini didorong ekspansi ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 1,7%, menjadi laju pertumbuhan tercepat dalam hampir enam tahun terakhir.

Keputusan menahan suku bunga mencerminkan pendekatan hati-hati Gubernur baru BOK, Shin Hyun Song, yang tengah mengukur dampak konflik Iran terhadap ekonomi domestik.

Ekonom Meritz Securities Stephen Lee memperkirakan, BOK masih berpotensi menaikkan suku bunga pada paruh kedua tahun ini.

“Kami memperkirakan BOK akan menaikkan suku bunga menjadi 2,75% pada pertemuan Juli, lalu kembali menaikkan suku bunga pada Oktober hingga mencapai 3,00% pada akhir tahun,” ujarnya.

Menurut Lee, kenaikan inflasi, ekspektasi inflasi yang meningkat, serta lonjakan harga properti menjadi faktor utama yang dapat mendorong pengetatan kebijakan moneter.

Inflasi Korea Selatan saat ini telah melampaui target bank sentral sebesar 2%. Pada April 2026, inflasi tercatat mencapai 2,6%, menjadi kenaikan tercepat dalam hampir dua tahun terakhir.

Tekanan inflasi juga diperparah oleh pelemahan won yang telah turun sekitar 4,5% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini.

Kondisi tersebut meningkatkan biaya impor, terutama untuk energi, mengingat Korea Selatan sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah.

Di sisi lain, permintaan global terhadap semikonduktor terus menopang kinerja ekspor Korea Selatan.

Lonjakan sektor chip bahkan membantu indeks saham KOSPI hampir dua kali lipat sepanjang tahun ini serta memberikan dampak positif bagi sektor manufaktur domestik.

Pelaku pasar kini mulai memperkirakan peluang kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Sekitar dua pertiga ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan BOK akan menaikkan suku bunga setidaknya satu kali sebelum akhir September 2026.

Pasar Tenaga Kerja AS Sangat Tangguh, The Fed Fokus Kendalikan Inflasi

Kamis, 28 Mei 2026 11:10 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/pasar-tenaga-kerja-as-sangat-tangguh-the-fed-fokus-kendalikan-inflasi>

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Wakil Ketua Federal Reserve Philip Jefferson mengatakan bahwa fokus untuk mengembalikan inflasi ke target 2% bank sentral adalah hal yang tepat mengingat pasar tenaga kerja AS sudah sangat tangguh terhadap guncangan energi saat ini.

“Ketika saya memikirkan keputusan kebijakan saya dari pertemuan ke pertemuan, saya benar-benar fokus pada stabilitas harga, tetapi berdasarkan mandat saya juga perlu mengingat apa yang terjadi di pasar tenaga kerja,” kata Jefferson selama sesi tanya jawab setelah pidato di konferensi yang diselenggarakan oleh BOJ dan lembaga think tanknya di Tokyo seperti dilansir Reuters, Kamis (28/5/2026).

“Pasar tenaga kerja AS sangat tangguh terhadap guncangan saat ini. Mengingat ketahanan tersebut, tampaknya tepat jika fokusnya adalah mengembalikan inflasi ke 2%,” katanya.

Komentar Jefferson adalah yang pertama sejak pelantikan Kevin Warsh sebagai ketua Fed yang baru pada Jumat lalu.

Jefferson mengatakan sulit untuk mengatakan kebijakan suku bunga Fed secara pasti dari waktu ke waktu mengingat ketidakpastian mengenai besarnya dan lamanya guncangan energi akibat perang.

"Yang diperhatikan oleh semua segmen masyarakat adalah kenaikan harga energi dan khususnya bensin. Kami peka terhadap bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari," katanya.

Namun tantangan bagi perekonomian AS adalah, selain dampak dari guncangan energi, perluasan investasi AI mendorong pertumbuhan, katanya.

"Guncangan energi merupakan hambatan bagi pertumbuhan, tetapi kita masih mengalami pertumbuhan selama episode ini," kata Jefferson.

"Dalam hal komunikasi kebijakan moneter, penekanannya adalah pada pemantauan efek putaran kedua yang terkait dengan guncangan pasokan dan lonjakan permintaan investasi."

Dalam pidato yang telah disiapkan untuk konferensi tersebut, ia mengatakan bahwa kebijakan moneter saat ini berada pada tempat yang tepat di tengah risiko kenaikan inflasi yang berkelanjutan.

"Saya belum menilai terlebih dahulu pertemuan berikutnya dan berharap dapat berdiskusi dengan kolega saya tentang kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mandat ganda kita dengan sebaik-baiknya," katanya tentang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal berikutnya pada tanggal 16-17 Juni.

Won Korea dan Peso Filipina Pimpin Pelemahan Mata Uang Asia Kamis (28/5)

Kamis, 28 Mei 2026 09:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/won-korea-dan-peso-filipina-pimpin-pelemahan-mata-uang-asia-kamis-285>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (28/5/2026), dipimpin oleh won Korea Selatan dan peso Filipina.

Penguatan dolar AS terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat memanasnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta ekspektasi suku bunga tinggi AS yang bertahan lebih lama.

Melansir Reuters, Won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terbesar di kawasan Asia setelah turun 0,54% ke level 1.507,50 per dolar AS.

Peso Filipina menyusul dengan pelemahan 0,48% ke posisi 61,658 per dolar AS.

Selain itu, baht Thailand turun 0,24%, dolar Singapura melemah 0,18%, dan ringgit Malaysia terkoreksi 0,30%.

Yuan China juga turun tipis 0,05% ke level 6,783 per dolar AS, sementara yen Jepang melemah 0,04% ke posisi 159,58 per dolar AS.

Di sisi lain, dolar Taiwan justru menguat 0,06% terhadap dolar AS ke level 31,400.

Sementara itu, rupiah Indonesia tercatat stagnan di level Rp 17.775 per dolar AS.

Secara year to date (ytd) sepanjang 2026, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia dengan pelemahan terdalam setelah turun sekitar 6,22% dibanding posisi akhir 2025.

Rupee India juga melemah sekitar 6,08% sepanjang tahun ini, sedangkan won Korea Selatan turun 4,51% dan peso Filipina terkoreksi 4,64%.

Sebaliknya, yuan China menguat sekitar 3,03% secara ytd, sementara ringgit Malaysia naik 2,11% dan dolar Singapura menguat 0,48%.

Pelaku pasar kini menanti arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed), terutama setelah harga minyak melonjak akibat konflik geopolitik yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global.

Pound Sterling Melemah Tiga Hari Beruntun di Tengah Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 28 Mei 2026 16:59 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/pound-sterling-melemah-tiga-hari-beruntun-di-tengah-ketegangan-timur-tengah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mata uang pound sterling kembali melemah terhadap euro dan dolar Amerika Serikat (AS) untuk hari ketiga berturut-turut. Pelemahan ini dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta kekhawatiran investor terhadap situasi politik domestik Inggris.

Pasar global tengah mencermati eskalasi konflik antara Iran dan AS setelah Garda Revolusi Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer AS pada Kamis (26/6). Serangan tersebut terjadi beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump membantah laporan yang menyebut Washington hampir mencapai kesepakatan dengan Teheran.

Di sisi lain, dolar AS menguat didukung permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz. Investor juga mulai mengalihkan perhatian pada potensi kenaikan suku bunga AS.

Pound sterling tercatat turun 0,20% ke level US\$ 1,34 setelah sempat menyentuh US\$ 1,3368, yang merupakan level terendah sejak 18 Mei.

“Secara keseluruhan, risiko kenaikan euro terhadap sterling masih terbuka karena sebagian risiko politik berpotensi kembali diperhitungkan oleh pasar,” ujar Francesco Pesole, analis strategi valuta asing di ING.

Menurut Pesole, pasar sebelumnya cenderung mengabaikan risiko politik tersebut, namun kini mulai kembali mencermatinya.

Spekulasi mengenai potensi pergantian kepemimpinan di Partai Buruh Inggris juga turut membebani sterling. Sejumlah tokoh yang berpotensi menjadi rival Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, seperti Wali Kota Greater Manchester Andy Burnham, mulai mengambil posisi menjelang kemungkinan tantangan kepemimpinan internal.

Namun demikian, Pesole menilai penguatan euro terhadap sterling kemungkinan masih terbatas dalam jangka pendek.

“Namun, tanpa sikap European Central Bank (ECB) yang sangat hawkish atau Bank of England yang dovish, pasangan euro/sterling kemungkinan akan kesulitan bertahan di atas level 0,87 dalam waktu dekat,” tambahnya.

Pelaku pasar kini memperkirakan dua kali kenaikan suku bunga oleh European Central Bank hingga akhir tahun setelah sejumlah pejabat ECB menyampaikan pernyataan bernada hawkish.

Kepala ekonom ECB, Philip Lane, pada Kamis mengatakan bahwa guncangan energi akibat perang antara AS dan Israel melawan Iran kemungkinan akan memberikan dampak berkepanjangan terhadap inflasi.

Sementara itu, pembuat kebijakan Bank of England Alan Taylor pekan lalu menyebut risiko inflasi putaran kedua akibat perang Iran lebih kecil dibanding dampak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Gubernur Bank of England Andrew Bailey juga mengatakan bank sentral masih memiliki waktu untuk mengevaluasi dampak perang Iran terhadap perekonomian Inggris.

Di pasar valuta asing, euro naik 0,10% menjadi 86,69 pence, level tertinggi sejak 19 Mei.

“Meski demikian, dengan Inggris masih berada dalam bayang-bayang ketidakpastian akibat prospek pemilihan kepemimpinan di Partai Buruh, kami memperkirakan euro/sterling akan terus menguat jika muncul kabar positif dari kawasan Teluk Persia,” ujar Thierry Wizman, analis strategi global valuta asing dan suku bunga di Macquarie Group.

Ekonomi AS Melambat, Konflik Iran Diprediksi Tekan Pertumbuhan 2026

Kamis, 28 Mei 2026 20:47 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-as-melambat-konflik-iran-diprediksi-tekan-pertumbuhan-2026>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal pertama 2026 tercatat lebih lemah dibandingkan perkiraan awal. Perlambatan ekonomi diperkirakan berlanjut pada kuartal berikutnya di tengah meningkatnya tekanan inflasi akibat konflik dengan Iran yang membebani keuangan rumah tangga.

Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan pada Kamis (28/5/2026) melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh dengan laju tahunan sebesar 1,6% pada kuartal pertama 2026.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,0%. Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan angka pertumbuhan tidak akan direvisi dan tetap berada di level 2,0%.

Sebagai perbandingan, ekonomi AS tumbuh sebesar 0,5% pada kuartal keempat 2025.

Revisi turun pada estimasi PDB kuartal pertama terutama dipengaruhi penyesuaian lebih rendah pada investasi persediaan dan belanja konsumen.

Saat ini, aktivitas ekonomi AS secara umum masih banyak ditopang oleh belanja terkait pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Pertumbuhan belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS, direvisi turun menjadi 1,4% dari estimasi sebelumnya sebesar 1,6%.

Meski demikian, pengembalian pajak dalam jumlah besar memberikan bantalan sementara bagi rumah tangga di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM).

Di sisi lain, belanja bisnis untuk peralatan tetap tumbuh kuat sebesar 17,2% dan tidak mengalami revisi dari laporan sebelumnya.

Sementara itu, penjualan akhir kepada pembeli domestik swasta, yang tidak memasukkan komponen pemerintah, perdagangan, dan persediaan, tercatat tumbuh 2,4%. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya sebesar 2,5%.

Laba dari produksi saat ini naik sebesar US\$ 40,4 miliar pada kuartal pertama. Namun, kenaikan tersebut melambat tajam dibandingkan pertumbuhan sebesar US\$ 246,9 miliar pada kuartal keempat 2025.

Jika diukur dari sisi pendapatan, ekonomi AS tumbuh 0,9% pada periode Januari-Maret 2026, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 1,6% pada kuartal sebelumnya.

Rata-rata antara PDB dan gross domestic income (GDI), yang juga dikenal sebagai gross domestic output dan dianggap sebagai ukuran aktivitas ekonomi yang lebih akurat, tumbuh sebesar 1,3%.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,1% pada kuartal Oktober-Desember 2025.

Para ekonom memperkirakan konflik di Timur Tengah akan semakin menekan pertumbuhan ekonomi AS mulai kuartal kedua 2026. Kenaikan harga energi akibat perang dengan Iran diperkirakan memperburuk inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat.

Rupiah Offshore Hampir Rp17.900/US\$, Mengapa Paling Liar di Asia?

Kamis, 28 Mei 2026 07:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/110231/rupiah-offshore-hampir-rp17-900-us-mengapa-paling-liar-di-asia/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pergerakan rupiah di luar negeri semakin liar, hampir menyentuh Rp17.900/US\$ dalam sesi perdagangan tadi malam waktu Indonesia, kala pasar domestik libur memperingati Idul Adha.

Melansir data Bloomberg, rupiah sempat menyentuh Rp17.892/US\$ pada sesi perdagangan di luar negeri, pada 23.59 WIB. Namun, berhasil ditutup di level Rp17.886/US\$, melemah 0,25%.

Hari ini (28/5/2026), rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) dibuka stagnan, lalu bergerak sedikit menguat 0,22% ke posisi Rp17.846/US\$ pada 06.02 WIB.

Pergerakan nilai kontrak rupiah di luar negeri, hampir menembus Rp17.900/US\$ tadi malam. (Bloomberg)

Mata uang kawasan Asia di pasar yang sudah buka cenderung beragam, meski pergerakannya belum terlalu terlihat. Yuan offshore menguat terbatas 0,03%, disusul yen Jepang 0,01%. Sebaliknya, dolar Singapura melemah tipis 0,01% pada 06.06 WIB.

Tak lama berselang, pergerakan mata uang Asia berubah dan berbalik arah pada 06.50 WIB. Yen Jepang sedikit melemah 0,02%, dan dolar Singapura menyusut 0,02%.

Mata uang Asia hari ini berbalik arah karena kenaikan harga minyak mentah kembali terjadi, setelah sempat turun kemarin (27/5) lebih dari 5%, ketika Amerika Serikat (AS) dan Iran masih belum mencapai kesepakatan terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, sementara laporan menunjukkan adanya serangan militer baru di Iran.

Pagi ini, West Texas Intermediate (WTI) naik mendekati US\$90 per barel, sedangkan Brent berada di kisaran US\$94 per barel. Namun, harga minyak masih berada dalam tren penurunan karena pasar tetap optimis AS dan Iran setidaknya akan mencapai kesepakatan sementara, meski prosesnya penuh tantangan.

Rupiah dan Mata Uang Asia

Di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik yang terjadi, tiap mata uang di kawasan Asia memiliki tingkat ketahanan dan volatilitas pergerakan yang berbeda. Jika membandingkan mata uang kawasan selama satu dekade ke belakang, rupiah merupakan satu-satunya mata uang yang paling volatil dan liar.

Dalam 10 tahun terakhir, rupiah di pasar spot bergerak dari Rp13.788/US\$ pada akhir 2015, ke posisi Rp17.783/US\$ pada sesi perdagangan Selasa (26/5/2026), pukul 10:30 WIB. Sehingga, selama satu dekade, mata uang Garuda terdepresiasi 28,98%, hampir 30%.

Terlihat pada grafik, pergerakan rupiah lebih liar daripada mata uang lainnya. Rupee India, misalnya, memang ikut melemah hampir setara dengan rupiah. Selama satu dekade, rupee tercatat melemah paling dalam sebesar 44,13%. Dari INR 66.153/US\$ pada akhir 2015 menjadi INR 95.347/US\$ pada Selasa (26/5).

Akan tetapi, pergerakan rupee terlihat lebih terkendali daripada rupiah. Pergerakan rupee yang tidak setajam rupiah karena memiliki penyangga. Bloomberg Survey memproyeksikan ekonomi India tumbuh 7,1% pada kuartal I-2026, dan pada kuartal II-2026 pertumbuhannya diperkirakan 6,4% akibat kenaikan harga minyak dunia.

Di sisi lain, India memiliki motor penggerak ekonomi dalam bentuk konsumsi domestik. Serta memiliki cadangan devisa yang besar, setidaknya mencapai US\$728,5 atau setara 11,3 bulan impor. Cadangan sebesar itu memberi ruang intervensi yang jauh lebih besar dibanding Indonesia.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut India juga mengambil langkah administratif untuk menahan permintaan dolar AS, seperti menaikkan bea masuk untuk emas dan perak, karena impor emas di India menjadi salah satu sumber permintaan dolar AS yang besar.

Selain itu, menurut Josua struktur ekonomi tiap negara memang sangat menentukan perilaku mata uangnya. Hal ini terlihat pada ringgit Malaysia dan dolar Singapura, yang cenderung lebih stabil.

Josua menyebut, stabilitas ringgit Malaysia dimungkinkan terjadi lantaran negara tetangga ini terbantu ketika harga minyak dan komoditas naik karena memiliki ekspor minyak, gas, dan CPO yang besar, sehingga ringgit dapat memperoleh dukungan dari neraca perdagangan.

Sementara, Singapura memiliki kerangka kebijakan nilai tukar yang sangat kredibel, pasar keuangan dalam, dan posisi sebagai pusat keuangan, sehingga dolar Singapura cenderung lebih stabil. Di sisi lain, Thailand lebih sensitif pada energi, tetapi pariwisata memberikan pasokan devisa yang cukup besar.

Lebih lanjut, Filipina, seperti Indonesia, juga rentan karena impor energi dan kebutuhan valuta asing, tetapi ditopang remitansi tenaga kerja luar negeri. Sementara, Vietnam memiliki penopang dalam bentuk ekspor manufaktur dan investasi asing langsung, dengan pengelolaan nilai tukar yang lebih terkendali.

Sedangkan Indonesia berada di tengah: punya pasar domestik besar dan komoditas, tetapi juga punya impor energi tinggi, kebutuhan dolar musiman besar, dan pasar keuangan yang sangat sensitif terhadap arus portofolio.

Nasib Rupiah

Dalam konteks Indonesia, masalah utama bukan semata fundamental ekonomi domestik lemah. Ekonomi memang masih tercatat tumbuh, dengan inflasi yang relatif masih terkendali, dan posisi cadangan devisa masih memadai.

Namun, menurut Josua, pasar sedang menilai bahwa ruang aman Indonesia menyempit. Sebab, posisi cadangan devisa, meski masih tinggi sebesar US\$146,2 miliar, setara 5,8 bulan impor, atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri, tetapi lebih rendah dari Maret.

Tergerusnya posisi cadangan devisa ini terjadi karena ada pembayaran utang luar negeri dan upaya stabilisasi rupiah.

"Ini memberi sinyal bahwa BI masih punya amunisi, tetapi pasar juga melihat bahwa tekanan rupiah membutuhkan biaya. Karena itu, rupiah bisa tetap volatil meskipun fundamental tidak runtuh, sebab pasar sedang menguji konsistensi kebijakan moneter, fiskal, dan eksternal secara bersamaan," kata Josua.

Josua menambahkan, agar rupiah dapat lebih terjaga dan tidak terlalu volatil, beberapa upaya bisa ditempuh.

Pertama, Bank Indonesia (BI) tak cukup hanya mengandalkan kenaikan suku bunga atau intervensi valas. Intervensi memang tetap perlu dilakukan untuk meredam gejolak, namun bukan mempertahankan angka tertentu secara kaku.

Kedua, pemerintah perlu memperbaiki sumber pasokan devisa melalui penguatan devisa hasil ekspor, percepatan ekspor bernilai tambah, pengelolaan impor energi, dan perluasan transaksi mata uang lokal dengan mitra dagang ASEAN.

Ketiga, memperbesar volume penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara ASEAN. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang keras dan membantu menekan dampak volatilitas mata uang asing terhadap harga barang impor. "Ini relevan karena sebagian tekanan rupiah berasal dari kebutuhan dolar yang berulang, bukan hanya dari sentimen pasar," kata Josua.

Keempat, mengurangi alasan pasar untuk memberi premi risiko yang lebih tinggi kepada Indonesia. Dengan cara, menjaga kredibilitas kebijakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), subsidi energi harus lebih tepat sasaran, komunikasi kebijakan harus konsisten, dan kebijakan yang menyangkut ekspor komoditas atau devisa tidak boleh menimbulkan kesan mendadak atau terlalu intervensionis.

Utang Luar Negeri Jangka Pendek BI Meningkat, Waspadai Risiko Outflow Asing

Kamis, 28 Mei 2026 06:00 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-luar-negeri-jangka-pendek-bi-meningkat-waspadai-risiko-outflow-asing>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) jangka pendek Bank Indonesia (BI) meningkat di tengah gencarnya penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran modal asing ke pasar keuangan domestik.

Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), posisi utang luar negeri jangka pendek BI naik dari US\$ 15,85 miliar pada akhir 2025 menjadi US\$ 18,53 miliar per akhir Maret 2026, meski masih lebih rendah dibanding posisi akhir 2024 sebesar US\$ 19,20 miliar.

Kenaikan tersebut terjadi seiring meningkatnya kepemilikan asing pada instrumen SRBI yang digunakan BI untuk menopang stabilitas rupiah melalui penarikan inflow asing.

Di tengah derasnya aliran dana ke SRBI, nilai tukar rupiah masih tertekan dan bergerak mendekati level psikologis Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip data Bloomberg, pada perdagangan Selasa (26/5/2026), rupiah ditutup melemah ke Rp 17.796 per dolar AS.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengungkapkan, kenaikan kepemilikan asing di SRBI perlu dicermati karena meningkatkan risiko pembalikan arus modal atau capital outflow yang dapat menekan rupiah dan cadangan devisa.

“Sebagian kenaikan ini terkait meningkatnya kepemilikan investor asing pada instrumen rupiah BI, terutama SRBI, sehingga dicatat sebagai kewajiban eksternal jangka pendek karena pemegangnya nonresiden. Ini berbeda dengan BI berutang dolar secara langsung,” ujar Josua kepada Kontan, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, risiko utama bukan berasal dari gagal bayar valas, melainkan potensi pembalikan arus dana ketika investor asing keluar secara bersamaan.

“Ketika investor keluar secara serentak, mereka akan melepas rupiah dan membeli dolar, sehingga tekanan pindah ke pasar valas dan cadangan devisa,” katanya. Meski begitu, Josua menilai posisi utang luar negeri jangka pendek BI masih relatif aman dibandingkan cadangan devisa April 2026 yang mencapai US\$ 146,2 miliar. Namun, kondisi ini menunjukkan strategi stabilisasi rupiah makin bergantung pada dana portofolio jangka pendek.

Ia menjelaskan, SRBI memang efektif menarik dana asing karena menawarkan imbal hasil menarik. BI juga telah menaikkan suku bunga SRBI tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan menjadi masing-masing 6,53%, 6,67%, dan 6,76%.

Per 21 Mei 2026, posisi SRBI mencapai Rp 921,88 triliun dengan kepemilikan nonresiden sebesar Rp 220,06 triliun atau 23,87% dari total outstanding.

“Angka ini membantu rupiah karena menciptakan permintaan terhadap aset rupiah, tetapi juga membuat stabilitas rupiah lebih sensitif terhadap perubahan sentimen global,” ujarnya.

Menurut Josua, SRBI hanya menjadi bantalan sementara dan bukan fondasi permanen bagi stabilitas rupiah. Fondasi utama tetap harus berasal dari surplus devisa ekspor, neraca transaksi berjalan yang terkendali, investasi langsung, dan kredibilitas fiskal.

Di sisi lain, Josua menilai langkah BI menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin dan memperkuat instrumen moneter seperti SRBI memang membantu menarik inflow asing, tetapi belum cukup membuat rupiah menguat signifikan.

Ia melihat tekanan terhadap rupiah masih berasal dari faktor global dan domestik secara bersamaan. Dari eksternal, dolar AS masih kuat akibat tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, harga minyak yang tinggi, dan konflik Timur Tengah yang mendorong investor masuk ke aset aman.

Sementara dari dalam negeri, tekanan berasal dari kebutuhan dolar musiman pada kuartal II untuk pembayaran dividen, utang luar negeri, dan kebutuhan haji.

Selain itu, data eksternal Indonesia juga belum sepenuhnya kuat. Surplus neraca perdagangan barang turun dari US\$ 7,6 miliar pada kuartal IV 2025 menjadi US\$ 5,5 miliar pada kuartal I 2026. Sementara aliran modal pada kuartal I 2026 masih mencatat keluar bersih US\$ 0,8 miliar.

“Walaupun sampai 18 Mei mulai mencatat masuk bersih US\$ 5,5 miliar, terutama ke SRBI dan SBN, pasar masih melihat arus tersebut sebagai dana yang mudah bergerak, bukan arus jangka panjang,” katanya.

Tekanan terhadap rupiah juga diperberat oleh struktur perdagangan Indonesia. Sepanjang Januari-Maret 2026, ekspor Indonesia hanya naik 0,34% secara tahunan menjadi US\$ 66,85 miliar, sementara impor naik 10,05% menjadi US\$ 61,30 miliar.

“Jika impor energi dan bahan baku tetap tinggi, sementara ekspor tidak tumbuh cukup kuat, maka pasar akan menilai neraca eksternal Indonesia lebih rentan,” ujarnya.

Josua menilai rupiah sebenarnya sudah berada di bawah nilai wajarnya. Berdasarkan model fair value berbasis real effective exchange rate (REER), nilai wajar USD/IDR diperkirakan berada di bawah Rp 17.000 per dolar AS.

Namun, ia menegaskan kondisi undervalued tidak otomatis membuat rupiah segera menguat karena pasar masih dibayangi kekhawatiran terhadap harga minyak, defisit fiskal, arus modal keluar, dan ketidakpastian kebijakan.

“Penguatan menuju nilai wajarnya membutuhkan perubahan sentimen: harga minyak lebih stabil, tekanan dolar turun, arus asing lebih berkelanjutan, dan komunikasi kebijakan fiskal-moneter makin meyakinkan,” jelasnya.

Untuk akhir 2026, Josua memperkirakan rupiah berpeluang bergerak ke kisaran Rp 16.800-Rp 17.200 per dolar AS jika tekanan musiman mereda, harga minyak stabil, dan arus asing tetap masuk ke SRBI serta SBN.

Namun dalam skenario tekanan, rupiah masih berpotensi kembali menguji level Rp 17.500 hingga Rp 18.000 per dolar AS apabila harga minyak tetap tinggi dan arus keluar modal berlanjut.

“Peluang penguatan ada, tetapi belum cukup kuat untuk menyebut rupiah pasti kembali cepat ke Rp 16.500,” ujarnya.

Josua menyarankan BI tetap menjaga keseimbangan antara menarik aliran modal dan menghindari ketergantungan berlebihan pada dana jangka pendek.

“SRBI masih perlu dipakai, tetapi harus dilengkapi dengan penguatan pasokan devisa yang lebih struktural melalui optimalisasi devisa hasil ekspor, perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, pengendalian impor energi, dan pendalaman lindung nilai valas,” jelasnya.

Josua juga menilai pemerintah perlu membantu dari sisi fiskal dengan menjaga subsidi energi tetap terukur, memperkuat penerimaan negara tanpa menekan daya beli, serta memastikan konsistensi kebijakan agar premi risiko Indonesia tidak meningkat.

Ekonom: Rupiah bisa "rebound" jika "policy mix" fiskal-moneter membaik

Kamis, 28 Mei 2026 15:12 WIB

<https://www.antaraneews.com/berita/5585463/ekonom-rupiah-bisa-rebound-jika-policy-mix-fiskal-moneter-membaik?page=all>

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhru Fulvian memandang nilai tukar rupiah memiliki ruang rebound yang cukup besar apabila bauran kebijakan (policy mix) membaik serta pembagian beban (burden sharing) yang seimbang antara fiskal dan moneter.

Ia memperkirakan, potensi penguatan kembali rupiah bisa mencapai level Rp16.800-17.000 per dolar AS jika koordinasi fiskal dan moneter solid. Untuk diketahui, rupiah di pasar offshore kini menembus level Rp17.800 per dolar AS saat pasar domestik libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5) dan Kamis (28/5).

“Level rupiah saat ini menurut saya terlalu lemah dibanding kapasitas ekonomi Indonesia sebenarnya,” kata Fakhru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Fakhru berpendapat, stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bank Indonesia (BI), sehingga dibutuhkan keseimbangan bauran kebijakan antara fiskal dan moneter.

Ia mencatat bahwa pasar mencermati konsistensi arah kebijakan pemerintah dan BI. Oleh sebab itu, koordinasi kebijakan dipandang sangat penting di tengah tekanan global yang besar.

“Kalau BI sudah menetapkan kebijakan, tetapi fiscal stance dan komunikasi kebijakan belum sinkron, maka tekanan terhadap rupiah tetap besar,” kata dia.

Adapun BI belum lama ini menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 50 basis poin (bps) ke level 5,25 persen.

Menurut Fakhru, keputusan bank sentral tersebut penting untuk memulihkan kredibilitas dan menjaga anchor pasar. Langkah tersebut juga penting agar pasar melihat bahwa BI serius menjaga stabilitas rupiah dan inflasi jangka menengah.

“BI mulai kembali ke pendekatan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve seperti era 2018,” kata dia.

Di sisi lain, menurut dia, fiscal stance Indonesia juga harus mulai menyesuaikan diri dengan realitas global yang baru. Ia menilai, saat ini dunia memasuki era inflasi struktural yang lebih tinggi, fragmentasi geopolitik, biaya energi yang mahal, serta supply chain yang lebih kompleks.

Ia mengingatkan bahwa pasar obligasi sangat sensitif terhadap persepsi arah fiskal. Jika investor mulai khawatir terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), stabilitas eksternal, dan arah subsidi, maka yield obligasi akan naik karena premi risiko meningkat.

Menurutnya, struktur suku bunga domestik saat ini juga belum sepenuhnya sehat.

Suku bunga SRBI yang tinggi dinilai efektif menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek. Namun, jika bertahan terlalu lama, kondisi tersebut dinilai berisiko menyedot likuiditas ke instrumen moneter, meningkatkan biaya dana, dan menghambat kredit ke sektor produktif.

“Setelah stabilitas pulih, yield curve SBN harus mulai dinormalisasi sehingga memancing capital flow secara bertahap,” jelas Fakhrul.

Secara keseluruhan, ia menilai bahwa Indonesia perlu untuk memulai membangun struktur ekonomi yang lebih anti-fragile.

“Kita perlu burden sharing yang lebih seimbang antara fiskal, moneter, sektor energi, dan sektor riil. Karena kalau rupiah terus menjadi penanggung terakhir dari semua tekanan ekonomi, maka volatilitas akan terus berulang,” kata Fakhrul.

Esensi insentif fiskal pegiat literasi

Kamis, 28 Mei 2026 12:21 WIB

Lucky Akbar

<https://www.antaraneews.com/berita/5585288/esensi-insentif-fiskal-pegiat-literasi?page=all>

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia pada tahun 2026 mengambil langkah bersejarah bagi dunia literasi nasional.

Melalui kebijakan baru yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah menetapkan skema Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 1,5 persen bagi penulis dan pengarang buku yang memperoleh royalti atas karya ber-ISBN.

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi nasional semester II-2026 dan dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap ekosistem literasi yang selama ini berjalan dalam tekanan ekonomi cukup berat.

Langkah tersebut bukan sekadar perubahan tarif pajak. Di balik angka 1,5 persen itu terdapat pesan penting bahwa negara mulai melihat literasi sebagai instrumen pembangunan manusia, bukan semata aktivitas budaya.

Dalam berbagai riset UNESCO, tingkat literasi suatu bangsa memiliki korelasi langsung terhadap produktivitas ekonomi, kualitas demokrasi, serta daya inovasi nasional. Negara-negara dengan indeks literasi tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan yang lebih baik dibanding negara dengan budaya baca rendah.

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam sektor literasi. Data Programme for International Student Assessment (PISA) beberapa tahun terakhir menunjukkan kemampuan membaca pelajar Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD.

Di sisi lain, riset Perpustakaan Nasional RI juga menunjukkan bahwa minat baca masyarakat meningkat, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan produksi buku bermutu dan jumlah penulis profesional. Kondisi inilah yang mendorong pentingnya intervensi fiskal dari negara.

Dasar hukum

Secara normatif, kebijakan pajak terhadap royalti penulis selama ini berlandaskan beberapa regulasi utama perpajakan Indonesia. Pertama adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir

diubah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam ketentuan tersebut, royalti dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan.

Kedua, Pasal 23 UU PPh mengatur bahwa atas penghasilan berupa royalti dilakukan pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. Tarif umum pemotongan sebesar 15 persen dari jumlah bruto atau berdasarkan norma tertentu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Ketiga, terdapat PER-1/PJ/2023 yang mengatur petunjuk teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas berbagai jenis penghasilan termasuk royalti penulis buku. Dalam praktiknya, aturan ini menjadi dasar perhitungan efektif royalti penulis selama beberapa tahun terakhir.

Keempat, perubahan kebijakan 2026 akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang secara khusus mengatur PPh final 1,5 persen untuk penulis dan pengarang buku ber-ISBN. Sampai saat ini PMK teknis masih disiapkan pemerintah, tetapi substansi utamanya telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Dalam perspektif hukum pajak, penggunaan skema PPh final sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah menerapkan PPh final untuk sektor UMKM, jasa konstruksi, persewaan tanah dan bangunan, serta pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Tujuan utamanya adalah simplifikasi administrasi dan peningkatan kepastian hukum perpajakan.

Sebelum muncul kebijakan PPh final 1,5 persen, penghasilan royalti penulis dikenai PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final. Berdasarkan ketentuan perpajakan sebelumnya, royalti dikenai pemotongan sebesar 15 persen dari perkiraan penghasilan neto. Dalam praktik administrasi perpajakan, formulasi umum yang digunakan adalah 15 persen dikalikan 40 persen dari jumlah bruto royalti sebagaimana diatur dalam PER-1/PJ/2023.

Karena bersifat tidak final, pemotongan tersebut hanyalah kredit pajak. Pada akhir tahun pajak, seluruh penghasilan penulis tetap digabungkan dengan penghasilan lain dan dikenai tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Akibatnya, banyak penulis masih menghadapi kemungkinan kurang bayar ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Fenomena tersebut sesungguhnya juga ditemukan dalam berbagai kajian ekonomi kreatif. Laporan UNESCO mengenai industri penerbitan global menyebutkan bahwa penulis umumnya hanya menerima royalti antara 5 persen hingga 15 persen dari harga jual buku. Di Indonesia, angka efektifnya bahkan sering lebih kecil setelah dipotong biaya distribusi, promosi, dan pajak.

Dampak sosial

Kebijakan fiskal terhadap penulis bukan hanya berdimensi ekonomi, melainkan juga sosial dan budaya. Dalam teori pembangunan modern, literasi merupakan instrumen mobilitas sosial. Semakin tinggi akses masyarakat terhadap buku dan pengetahuan, semakin besar peluang peningkatan kualitas hidup.

Riset United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan bahwa tingkat literasi memiliki hubungan erat dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas demokrasi. Negara dengan budaya baca kuat umumnya memiliki partisipasi publik lebih tinggi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam distribusi literasi. Banyak daerah masih kekurangan buku berkualitas, minim penulis lokal, dan memiliki keterbatasan akses penerbitan. Ketika profesi penulis tidak menjanjikan secara ekonomi, regenerasi penulis pun menjadi lambat.

Insentif pajak dapat menjadi salah satu katalis perubahan. Walaupun bukan solusi tunggal, kebijakan ini memberikan pengakuan simbolik bahwa profesi penulis memiliki nilai strategis bagi negara. Dalam psikologi ekonomi, pengakuan negara terhadap suatu profesi dapat meningkatkan legitimasi sosial dan minat generasi muda untuk menekuni bidang tersebut.

Sektor penerbitan merupakan bagian dari ekonomi kreatif nasional. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa tahun terakhir menunjukkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat. Sub-sektor penerbitan, konten digital, dan intelektual menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi berbasis ide.

Namun sektor kreatif memiliki karakter unik. Produk kreatif tidak selalu menghasilkan keuntungan cepat, tetapi memiliki dampak jangka panjang terhadap budaya dan pendidikan bangsa. Karena itu banyak negara memberikan berbagai insentif fiskal kepada industri kreatif, termasuk pembebasan pajak, tax rebate, hingga subsidi produksi.

Kebijakan PPh final 1,5 persen dapat dibaca sebagai bagian dari paradigma baru kebijakan fiskal Indonesia yang lebih adaptif terhadap ekonomi kreatif. Negara mulai memahami bahwa pencipta karya membutuhkan perlindungan ekonomi agar tetap produktif menghasilkan pengetahuan.

Di berbagai negara maju, pemerintah bahkan memberikan hibah langsung kepada penulis dan peneliti. Kanada memiliki Canada Council for the Arts yang mendukung penulis melalui bantuan dana. Korea Selatan memberi insentif besar pada industri konten dan penerbitan untuk memperkuat ekspor budaya. Jepang memiliki berbagai skema subsidi penerbitan akademik dan penelitian.

Indonesia memang belum sampai pada tahap itu. Namun penurunan tarif pajak merupakan langkah awal yang cukup progresif.

Salah satu manfaat terbesar dari sistem PPh final adalah kepastian hukum. Dalam teori administrasi perpajakan modern, kepastian menjadi faktor utama peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Banyak penulis selama ini kesulitan memahami mekanisme pengkreditan pajak royalti, pelaporan SPT, hingga penghitungan tarif progresif. Kompleksitas tersebut membuat sebagian pelaku kreatif enggan masuk sistem formal perpajakan.

Dengan tarif final yang rendah dan sederhana, pemerintah sebenarnya sedang memperluas basis kepatuhan melalui pendekatan persuasif. Strategi ini sejalan dengan konsep compliance cost reduction yang dianut banyak negara modern.

Selain itu, sistem final juga mengurangi potensi sengketa perpajakan. Ketika tarif dan mekanisme sudah pasti sejak awal, ruang interpretasi menjadi lebih kecil. Bagi penulis independen, kepastian semacam ini sangat penting karena mereka umumnya tidak memiliki konsultan pajak profesional.

Walaupun disambut positif, kebijakan ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Pertama adalah implementasi teknis. Pemerintah perlu memastikan definisi “penulis” dan “buku” dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Kedua, perlu ada integrasi data ISBN, penerbit, dan sistem perpajakan digital agar pemotongan pajak berjalan efektif. Di era ekonomi digital, banyak penulis menerbitkan buku secara independen melalui platform daring sehingga mekanisme pengawasan harus adaptif.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif pajak benar-benar dinikmati penulis, bukan justru menjadi keuntungan tambahan pihak lain dalam rantai distribusi penerbitan.

Keempat, kebijakan fiskal sebaiknya diiringi penguatan ekosistem literasi secara menyeluruh. Pajak rendah tidak akan cukup jika harga buku tetap mahal, distribusi terbatas, dan budaya baca belum berkembang kuat.

Indonesia memiliki potensi besar menuju arah tersebut. Jumlah penduduk muda yang besar, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya konsumsi konten menjadi peluang penting. Namun tanpa keberpihakan kebijakan publik, profesi penulis akan tetap berada di pinggir arus pembangunan ekonomi.

Karena itu, insentif fiskal bagi penulis seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang negara terhadap kualitas manusia Indonesia. Negara tidak sedang “mengurangi pajak” semata, melainkan sedang menanam modal sosial dan intelektual untuk masa depan.

Jawa Tengah Catat Pertumbuhan Ekonomi dan Swasembada Pangan yang Mengesankan di 2026

Kamis, 28 Mei 2026 05:46 WIB

Daffa Rizky Saputra

<https://www.fokusrembang.com/berita/fr-26213029837/jawa-tengah-catat-pertumbuhan-ekonomi-dan-swasembada-pangan-yang-mengesankan-di-2026/>

Fokus Rembang | JAKARTA – Capaian pertumbuhan ekonomi dan program swasembada pangan di Jawa Tengah pada tahun 2026 mendapatkan pengakuan positif dari berbagai pihak. Hal ini terungkap dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang berlangsung di Balai Kartini Grand Ballroom, Jakarta, pada hari Senin kemarin.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi, memberikan pujian kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, atas keberhasilan program swasembada pangan yang dirancang berdasarkan analisis potensi daerah. Frederica menekankan pentingnya strategi yang tepat dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Makanan

“Pak Luthfi memiliki program yang fokus pada padi dan jagung yang sangat mendukung ketahanan pangan nasional,” tutur Frederica saat membuka acara. Ia menambahkan bahwa upaya tersebut merupakan wujud komitmen yang kuat untuk memajukan wilayah sesuai dengan potensi yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Frederica juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor jasa keuangan untuk mendukung program-program yang telah direncanakan di daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi padi di Jawa Tengah hingga Triwulan I 2026 telah mencapai 4.696.422 ton. Capaian ini mencerminkan 44,48 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 10,5 juta ton. Angka ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah berada di jalur yang tepat untuk mencapai swasembada pangan.

Sementara itu, program-program yang dicanangkan oleh Gubernur Luthfi juga mencakup pengembangan pertanian berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Frederica menambahkan bahwa OJK berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian.

Konferensi ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, dan praktisi ekonomi. Diskusi yang berlangsung dalam acara ini berfokus pada sinergi kebijakan lintas sektor untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari hasil diskusi, terlihat bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan. Dengan adanya dukungan yang kuat dari semua pihak, diharapkan Jawa Tengah dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai salah satu provinsi yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Makanan

Secara ringkas, pertumbuhan ekonomi dan program swasembada pangan di Jawa Tengah pada tahun 2026 menunjukkan hasil yang memuaskan. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai sektor, diharapkan provinsi ini dapat terus melangkah maju menuju ketahanan pangan yang lebih baik.

Pemkab Banyumas revisi tarif retribusi pasar

Kamis, 28 Mei 2026 15:51 WIB

<https://jateng.antaranews.com/berita/633451/pemkab-banyumas-revisi-tarif-retribusi-pasar>

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merevisi tarif retribusi pasar melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2026 sebagai upaya melindungi pedagang di tengah kondisi ekonomi yang sulit sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran retribusi.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis siang, mengatakan peninjauan ulang tarif dilakukan karena kenaikan retribusi hingga 300 persen yang sebelumnya diberlakukan dinilai memberatkan pedagang dan menyebabkan rendahnya kepatuhan pembayaran.

“Dulu kenaikannya sampai 300 persen karena selama 15 tahun tidak pernah dinaikkan. Tapi dalam situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang, itu tidak berpihak kepada pedagang,” katanya usai Sosialisasi Perbup Nomor 8 Tahun 2026 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi.

Menurut dia, tingkat kepatuhan pembayaran retribusi saat tarif lama diberlakukan hanya sekitar 40 persen sehingga pendapatan daerah tidak optimal dan piutang retribusi terus menumpuk.

Ia optimistis penyesuaian tarif yang lebih realistis akan meningkatkan kepatuhan pedagang hingga mendekati 100 persen.

Sadewo mengatakan sebelum menandatangani aturan tersebut, dia meminta Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas melakukan kajian bersama akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan berdiskusi dengan pedagang pasar.

Ia menegaskan pemerintah daerah ke depan akan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan yang berdampak langsung terhadap warga.

Sementara itu, Kepala DPKUKM Banyumas Gatot Eko Purwadi mengatakan peninjauan kembali tarif retribusi dilakukan setelah muncul penolakan pedagang terhadap kenaikan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Menurut dia, hasil kajian menunjukkan penyesuaian tarif berdasarkan akumulasi inflasi sejak 2011 hingga 2024 sebesar 51,19 persen menjadi opsi paling ideal.

“Yang dijadikan rujukan adalah Perda Nomor 19 Tahun 2011. Inflasi dari 2011 sampai 2024 dihitung, hasilnya kenaikan paling ideal sebesar 51,19 persen,” katanya.

Menurut dia, besaran tarif baru berbeda pada setiap tipe pasar mulai tipe A hingga tipe D.

Sebagai contoh, tarif retribusi pasar tipe A yang sebelumnya mencapai Rp50 ribu per meter persegi per bulan kini turun menjadi sekitar Rp23.300 per meter persegi per bulan atau turun sekitar 53 persen dibanding tarif sebelumnya.

Ia mengatakan Perbup Nomor 8 Tahun 2026 telah ditetapkan pada 16 April 2026 dan mulai diterapkan setelah dilakukan sosialisasi kepada petugas pemungut serta pengelola pasar.

Jika terdapat pedagang yang terlanjur membayar lebih sebelum sosialisasi dilakukan, kelebihan pembayaran akan diperhitungkan untuk pembayaran bulan berikutnya.

Terkait pendapatan asli daerah (PAD), ia mengakui target pendapatan dari retribusi pasar memang menurun dibanding proyeksi sebelumnya sebesar Rp22,5 miliar.

Namun dengan meningkatnya kepatuhan pedagang, pihaknya optimistis realisasi pendapatan tetap dapat mencapai sekitar Rp13 miliar pada 2026.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kabupaten Banyumas “Satria Banyumas (Sabamas)” Pundi Sukarno mengapresiasi langkah Bupati Banyumas dan jajaran pemerintah daerah yang dinilai telah memperhatikan kondisi pedagang pasar.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati dan stakeholder lainnya karena sudah memperhatikan kondisi pedagang,” katanya.

Ia mengatakan pedagang memahami penurunan tarif retribusi berpotensi menurunkan PAD sehingga pihaknya mendorong seluruh pedagang membayar retribusi secara tepat waktu.

Menurut dia, hasil pembayaran retribusi nantinya akan kembali kepada pedagang melalui program revitalisasi maupun perbaikan fasilitas pasar.

Ia juga mengharapkan pemerintah daerah ke depan lebih banyak melibatkan pedagang dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional.

Ia menilai langkah peninjauan ulang tarif retribusi menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat kecil di tengah kondisi ekonomi yang sulit.